

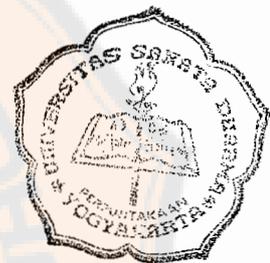
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MASA KEPRESIDENAN ABDURRAHAMAN WAHID

PERIODE TAHUN 1999 – 2001

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Yulita Aryanti Widiuntari

NIM : 011314003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

SKRIPSI

**MASA KEPRESIDENAN ABDURRAHMAN WAHID
PERIODE TAHUN 1999 – 2001**

Oleh :

Yulita Aryanti Widiuntari

NIM : 011314003

Telah disetujui oleh

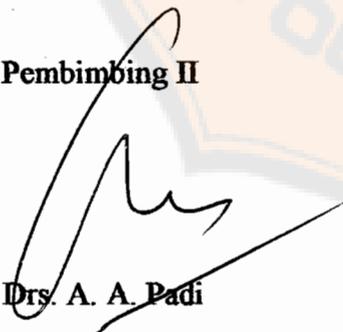
Pembimbing I



Drs. Sutarjo Adikusilo J. R.

Tanggal 30 November 2005

Pembimbing II



Drs. A. A. Padi

Tanggal 4 Januari 2006

SKRIPSI

**MASA KEPRESIDENAN ABDURRAHMAN WAHID
PERIODE TAHUN 1999 – 2001**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Yulita Aryanti Widiuntari

NIM : 011314003

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 28 Januari 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Drs. Sutardjo Adisusilo J. R.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota : Drs. Sutardjo Adisusilo J. R.
Anggota : Drs. A.A. Padi
Anggota 1 : Drs. A. K. Wiharyanto

Tanda Tangan



Yogyakarta, 28 Januari 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



T. Sarkim
Drs. T. Sarkim, M. Ed., Ph. D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Perluaslah kebahagiaan Anda dengan membagikannya kepada orang lain
Semakin besar bentangan pelangi, semakin jelas binarnya
(J. Donald Walters)

lihatlah Tuhan sebagai sahabat paling sejati

Mereka yang bijak adalah
Seseorang yang bisa memahami tempatnya di dalam kehidupan ini
(Hellen Keller)

Cinta bukanlah yang membuat dunia ini berputar,
tapi cintalah yang memberi arti perputaran dunia ini
(Franklin Jones)

Pengalaman sesaat kadangkala tidak kalah berharganya
dengan pengalaman seumur hidup
(Oliver Wendell Holmes)

Setialah pada apa yang benar dan baik dalam diri sahabat-sahabat Anda,
namun jangan mendorong kelemahan mereka.
Jadilah seperti sinar mentari : memberikan hidup dan penyembuhan kepada
Sesama
(J. Donald Walters)

PERSEMBAHAN

Atas dasar cinta, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✦ *Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis*
- ✦ *Kakek dan Nenek yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat bagi penulis*
- ✦ *Adik-adikku Vitalis Ari Widyaningsih dan Agustinus Bayu Kurniawan, terima kasih atas doa dan dukungannya*
- ✦ *Fransiskus Asisi Cahyo Nugroho, terima kasih atas cinta, perhatian, support dan kesetiannya*
- ✦ *Om, Bulik, Mas Suhar dan Mas Budi, terima kasih atas segala bantuannya*
- ✦ *Sobatku Jovita Rja Caturwardani, Agustina Vinastuningrum dan sobatku SMA Monica, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan bantuannya*
- ✦ *Temanku Mediarum dan Rita Puspita, terima kasih atas segala bantuan dan supportnya*
- ✦ *Teman-temanku angkatan'01, Mini, Wanti, Deni, Edi, Bondan, Wahyu Indah dan teman-teman kos Gatot Kaca 8, Bekti, Martin, Wriwik, Rosa terima kasih atas semua bantuannya*
- ✦ *Yuyun (S. Inggris) dan Novra (PBSID) terima kasih atas semua bantuannya*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN

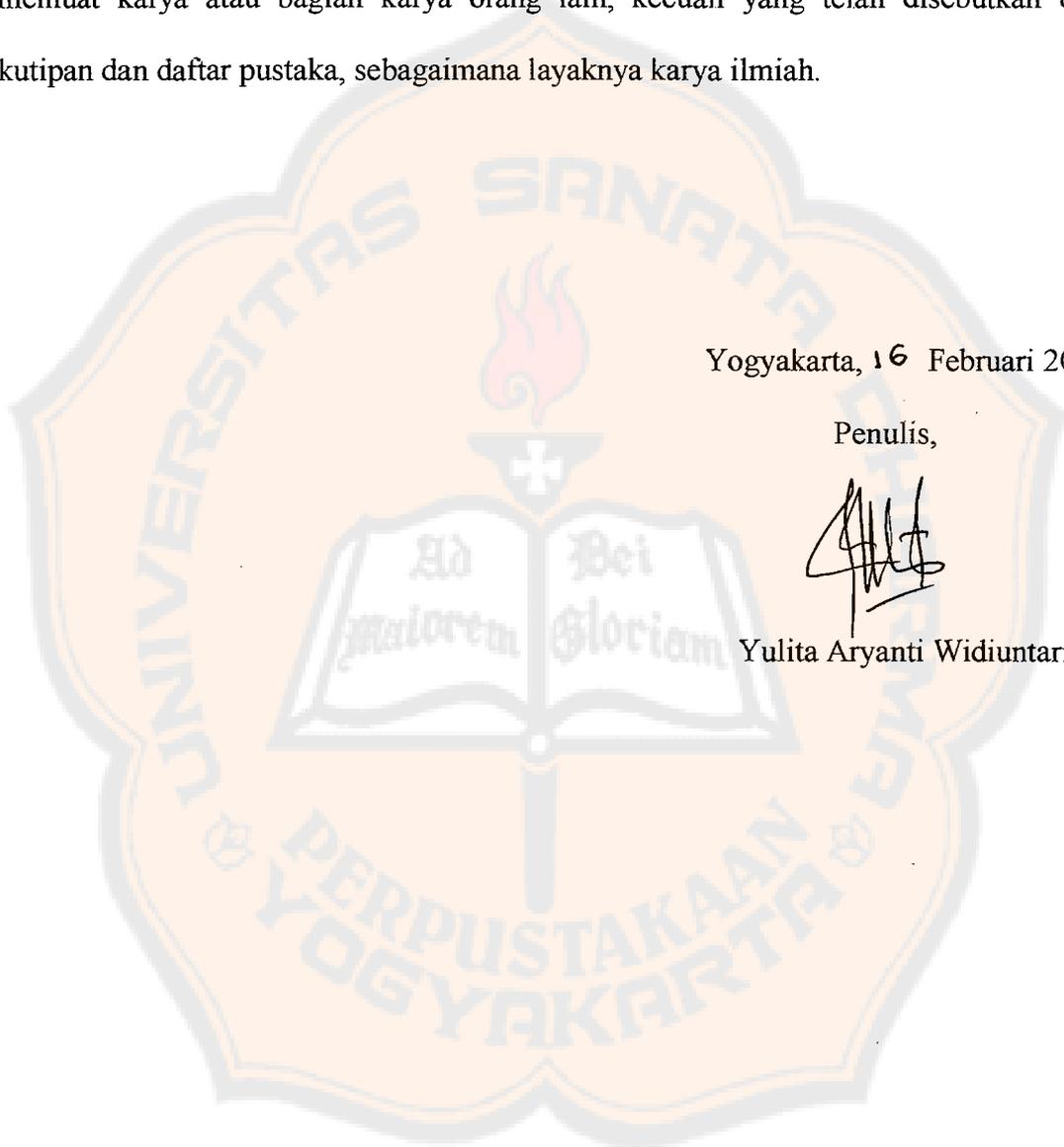
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Februari 2006

Penulis,



Yulita Aryanti Widiuntari



ABSTRAK

MASA KEPRESIDENAN ABDURRAHMAN WAHID

PERIODE TAHUN 1999-2001

Oleh : Yulita Aryanti Widiuntari

NIM 011314003

Skripsi berjudul Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001 ini menjawab empat permasalahan. Pertama, apa latar belakang Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden Republik Indonesia. Kedua, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Ketiga, bagaimana Abdurrahman Wahid melaksanakan pemerintahannya dan apa pengaruhnya terhadap Indonesia. Keempat, faktor-faktor apa yang menyebabkan Abdurrahman Wahid kehilangan jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia selama periode 1999 – 2001.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan psikologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden Republik Indonesia selama periode 1999 – 2001 adalah karena beliau memiliki partai politik yang besar dalam pemilu, beliau dipandang sebagai tokoh yang memiliki kharisma, Indonesia belum bisa menerima wanita sebagai presiden karena adanya dominasi gender dalam perpolitikan Indonesia. Alasan berikutnya adalah adanya kegagalan pemerintahan B.J. Habibie.

Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid menyangkut rencana awal beliau sebelum menjalankan pemerintahannya baik dalam bidang ~~politik~~ ekonomi, pertahanan, sosial, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan wujud dari kebijakan-kebijakannya dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, sosial dan HAM. Adapun penyebab jatuhnya beliau sebagai presiden karena adanya konflik diantara elite politik disamping kurangnya koresponsivan terhadap masalah-masalah sosial dan kegagalannya dalam mengatasi krisis ekonomi.

ABSTRACT

**PRESIDENTIAL ERA OF ABDURRAHMAN WAHID
FROM 1999-2001**

By : Yulita Aryanti Widiuntari

NIM 011314003

This thesis titled "Presidential Era of Abdurrahman Wahid from 1999 – 2001" was intended to answer four problems. First, what were the backgrounds of Abdurrahman Wahid being elected to be president of Republic of Indonesia (RI)? Second, what were Abdurrahman Wahid's policies when he was in service as RI president? Third, how did Abdurrahman Wahid perform his government and what were the impacts to Indonesia? Fourth, which factors caused Abdurrahman Wahid lost his position as RI president for 1999–2001 periods?

The used method in this research was historical method. The steps in writing historical method included selecting topic, heuristics, resources critique, data interpretation, and historiography. This research used political and psychological approaches.

The results of this research were as follows. The background of Abdurrahman Wahid to be elected as president of Republic of Indonesia for the periods of 1999 –2001 was because he had a big political party in election. He was viewed as a charismatic figure. Moreover, Indonesian could not accept woman as their president due to gender domination in Indonesian politics. And, the next reason was the failure of B.J Habibie's government.

The policies of Abdurrahman Wahid concerned with initial plans before he implemented his government in fields of politics, economy, defense, social, law and Human Rights.

Abdurrahman Wahid's government was manifestation of his policies in political, economic, defense, social, law and human rights sectors. While he lost position of president due to conflicts among political elite, his less responsiveness to social problems and his failure in coping with economic crises.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MASA KEPRESIDENAN ABDURRAHMAN WAHID PERIODE TAHUN 1999-2001” dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidika pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyapaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Adisusilo J.R., selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs.A.A. Padi, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi bekal pengetahuan dan membimbing penulis selama kuliah.
7. Yang tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, bantuan baik moril maupun materiil dan cintanya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adikku Vitalis Ari Widyaningsih, Agustinus Bayu Kurniawan dan kakakku yang tercinta Fransiskus Asisi Cahyo Nugroho terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Teman-temanku Jovita Ria Caturwardani, Agustina Vinastuningrum, Monica terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan bantuannya.
10. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, Februari 2006

Penulis,

Yulita Aryanti Widiuntari



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Landasan Teori	10
G. Hipotesis	39
H. Metode Penelitian dan Pendekatan	40
I. Sistematika Penulisan	48

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II. LATAR BELAKANG ABDURRAHMAN WAHID TERPILIH MENJADI PRESIDEN	50
A. Biografi Abdurrahman Wahid	50
A.1. Pendidikan yang Dijalani Abdurrahman Wahid	51
A.2. Paradigma Pemikiran Abdurrahman Wahid.....	54
A.3. Abdurrahman Wahid sebagai kalangan Islamis yang Nasionalis.....	56
B. Latar Belakang Abdurrahman Wahid Terpilih Menjadi Presiden	58
B.1. Situasi Politik Indonesia Pasca Pemilu 1999	58
B.2. Pemerintahan B.J.Habibie yang Dirundung Masalah	61
B.3. Jalannya Politik Sidang Istimewa MPR.....	67
BAB III. KEBIJAKAN ABDURRAHMAN WAHID	73
A. Kebijakan di Bidang Politik	73
B. Kebijakan di Bidang Ekonomi	78
C. Kebijakan di Bidang Keamanan	79
D. Kebijakan di Bidang Sosial	81
E. Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM	84
BAB IV. PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID PERIODE TAHUN 1999 – 2001	87
A. Kondisi Indonesia	87
A.1. Bidang Politik.....	87
A.2. Bidang Ekonomi	91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A.3. Bidang Keamanan	99
A.4. Bidang Sosial	102
A.5. Bidang Hukum dan HAM	106
B. Indonesia Pada Awal Pemerintahan Abdurrahman Wahid.....	110
C. Politik Dalam Negeri Abdurrahman Wahid.....	117
D. Politik Luar Negeri Abdurrahman Wahid	123
F. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid bagi Indonesia	134
F. 1. Bidang Politik	135
F. 2. Bidang Ekonomi	139
F. 3. Bidang Keamanan.....	144
F. 4. Bidang Sosial	145
F. 5. Bidang Hukum dan HAM	146
BAB V. JATUHNYA ABDURRAHMAN WAHID DARI KURSI PRESIDEN	150
A. Faktor Politik	150
B. Faktor Sosial	163
C. Faktor Ekonomi	165
BAB V. PENUTUP	169
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang Jawa Timur, 4 Agustus 1940.¹ Abdurrahman Wahid ini tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia terutama perannya dalam politik. Karir politiknya dimulai sejak ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktar Situbondo tahun 1984.² Karir lain yang pernah ia jalani antara lain adalah sebagai Pengajar Pesantren, Dekan Universitas Hasyim Ashari Fakultas Ushuludin, Ketua Balai Seni Jakarta, Penemu Pesantren Ciganjur, Ketua Umum Nahdatul Ulama, Ketua Forum Demokrasi, Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia,³ menjadi anggota MPR pada tahun 1999 dan sebagai presiden Republik Indonesia periode tahun 1999 – 2001.

Karier lain yang dirintis oleh Abdurrahman Wahid di bidang politik adalah keikutsertaan beliau dalam dialog nasional, yang mana terselenggaranya dialog nasional ini memberi pengaruh yang sangat besar bagi perpolitikan Indonesia. Bersama dengan para mahasiswa Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, Abdurrahman Wahid memprakarsai terselenggaranya dialog nasional. Dialog nasional yang dipelopori oleh Abdurrahman Wahid ini dikenal dengan sebutan Dialog Ciganjur, karena memang dialog tersebut diselenggarakan di kediamannya di Ciganjur pada tanggal 10 November 1998. Hadir dalam dialog tersebut adalah

¹ -----, *Ensiklopedi tokoh Indonesia*. 2005 Hlm 1 dalam <http://www.tokohnasionalindonesia.com/ensiklopedi/a/abdulrachman-wahid/index.shtm!>

² Mustafa Ismail, *Melawan Melalui Lelucon*, 2000 dalam *Tempo*. 2003: <http://www.gusdur.net/indonesia/detail.asp?catName=&contentOID>

³ -----, *Ensiklopedi Tokoh Indonesia*. *op. cit* hlm. 1

empat tokoh reformis yakni Megawati Soekarnoputeri, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Abdurrahman Wahid sendiri. Tujuan diselenggarakan dialog nasional adalah sebagai upaya untuk menyamakan visi dan pola pikir dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, selain itu dialog nasional juga dapat diteruskan sebagai upaya mengkaji semua permasalahan yang sedang berlangsung.

Pada dasarnya salah satu tujuan dari reformasi adalah mewujudkan negara yang demokratis. Tidak ada cara lain dalam mewujudkan demokrasi kecuali melalui cara-cara demokratis. Demokrasi diciptakan melalui perundingan yang menghasilkan kompromi atau perjanjian, pemilihan umum serta penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan. Melalui dialog diharapkan dapat dihasilkan gagasan-gagasan besar yang bermanfaat untuk menyelesaikan krisis yang melanda bangsa dan negara ini. Kini satu-satunya jalur formal yang menjadi harapan bangsa untuk memperoleh suatu pemerintahan *legitimate* dalam usaha mengatasi krisis bertumpu pada pemilu 1999. Namun, jika pemilu 1999 gagal, bencana mungkin saja akan kembali menimpa Indonesia, kecuali jika seluruh komponen bangsa sepakat untuk memilih dialog nasional sebagai cara untuk mengatasi konflik dan menentukan pilihan-pilihan terbaik bagi masa depan bangsa.⁴

Sebelum Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan B. J. Habibie, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan B. J. Habibie. Selama kekuasaannya B. J. Habibie dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan reformasinya. Habibie dinilai gagal karena beberapa

⁴ I Made Leo Wiratma, *Perjalanan Sebuah Dialog Nasional*, 1999, Analisa CSIS, tahun XXVIII. No. 1

faktor antara lain B. J. Habibie telah memaksakan referendum atas Timor Timur dengan dua opsi yaitu otonomi luas dan merdeka yang ternyata dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan. Pemberian opsi ini dinilai gegabah karena dianggap telah melampaui kewenangan dan tanpa mengkonsultasikan kepada DPR, Habibie juga dinilai lalai dalam menjalankan ketetapan MPR No. II/1998, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme, adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, yang menurut pengamat politik Eep Saefulloh 75 persen mengandung elemen federalisme dan menurut UU baru ini semua urusan pemerintahan sudah diserahkan ke daerah otonom, tetapi untuk urusan agama, peradilan, moneter, luar negeri, dan hankam tetap ditangani pemerintah pusat. UU ini terbentuk pada saat pemerintahan B. J. Habibie padahal beliau tidak setuju dengan konsep federasi,⁵ karena beberapa faktor tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid diangkat sebagai presiden RI.⁶ Ia dipilih secara demokratis dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan rakyat (SU MPR) tahun 1999.⁷ Di sini masyarakat Indonesia banyak berharap kepemimpinan Abdurrahman Wahid dapat memberikan perubahan bagi kondisi Indonesia.

Terpilihnya Abdurrahman Wahid ini disambut berbagai kalangan luas sebagai pemberi harapan bagi rakyat di masa depan. Terpilihnya orang nomor satu

⁵ Farid Gaban. dkk. *Yang Gelisah di Pelukan Ibu Pertiwi*. Tempo no 37/XVIII/15-21 November 1999. hlm. 42

⁶ Arief Mudatsir Madan, *Sidang Umum MPR RI Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, 2000, Jakarta: FIS.hlm.42

⁷ *Idem*.

NU ini juga memberi harapan banyak pihak untuk dapat merekatkan rakyat Indonesia di mana waktu itu terdapat cobaan akan disintegrasi Bangsa. Harapan itu muncul karena waktu itu Abdurrahman Wahid dipandang sebagai orang atau sosok yang bisa diterima di hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan ada yang mengidentifikasikan Abdurrahman Wahid sebagai “Bapak Bangsa.”

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden memberikan suasana baru untuk tercapainya suatu reformasi Indonesia. Ini terbukti bahwa terbentuknya kabinet persatuan nasional dibawah duet kepemimpinan Abdurrahman Wahid dengan Megawati pada tanggal 26 Oktober 1999 pada dasarnya merupakan akhir dari rangkaian proses inisial institusionalisasi reformasi politik di Indonesia. Pemilihan Umum (pemilu) 1999, merupakan awal dari proses institusionalisasi yang telah berlangsung secara *fair* dan demokratis. Sidang Umum MPR (SU MPR) 1999 terlaksana secara demokratis dan terbuka hingga membawa nuansa akuntabilitas yang memadai. Di samping itu sejumlah perubahan mendasar dalam setting sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia telah dihasilkan oleh SU MPR 1999. Salah satu perubahan itu seperti Amandemen UUD 1945 dan GBHN 1999-2004. Memang telah menyerap berbagai aspek dari tuntutan reformasi. Beberapa pembaharuan dalam struktur pemerintahan RI dari eksekutif dan legislatif seperti tercakup dalam amandemen UUD 1945 dan kebijakan tentang desentralisasi dan otonomi luas seperti tertulis dalam GBHN 1999-2004, adalah beberapa contoh terpenuhinya aspek-aspek tuntutan reformasi. Lebih dari itu, amandemen terhadap UUD 1945 pada dasarnya telah meneguhkan komitmen rakyat Indonesia untuk

sekedar mengembangkan konstitusi atas dasar prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga untuk melahirkan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.⁸

Amandemen UUD 1945 merupakan upaya untuk menelaborasi konstitusionalisme dengan menata kembali distribusi kekuasaan antara poros-poros kekuasaan agar ada mekanisme *chec and balance*. Lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang mempunyai peran penting dalam amandemen tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga permusyawaratan rakyat (MPR). Sebab selain MPR pembawa amanat dengan pengemban aspirasi rakyat, DPR sendiri merupakan bagian dari kekuatan lembaga legislatif sendiri. Gagasan amandemen UUD 1945 ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa selama menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulisnya, Indonesia tidak pernah demokratis.

Namun demikian, pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid tidak mendatangkan hasil yang optimal dan maksimal. Banyak sekali kecaman-kecaman yang datang dan dilontarkan kepada Abdurrahman Wahid waktu itu. Hal ini disebabkan karena Abdurrahman Wahid sering mengambil langkah-langkah yang soliter dan terkesan tidak mempedulikan para politisi di DPR.⁹ Kesombongan dan keegoisan dari Abdurrahman Wahid ini membuat dia tidak mendapatkan dukungan dan simpati dari berbagai kalangan lagi. Faktor yang kedua menyatakan bahwa Abdurrahman Wahid terlalu sering mengacaukan banyak hal yang semestinya tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa Abdurrahman Wahid sebenarnya tidak dapat membedakan mana yang rasional dan irasional.

⁸ T. A. Legowo, *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999*, 1999, Analisa CSIS, tahun XVIII/1999, No. 4 tahun 1999

⁹ Rizal Mallarangeng. *Tiga Faktor Penyebab SI MPR 2001* dalam *Kompas*: 22-07-01: <http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=115>

Singkatnya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Abdurrahman Wahid waktu itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan otoritas bangsa. Yang terjadi waktu itu adalah kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah dan munculnya aspirasi nasionalisme lokal pada tingkat massa. Bentuk kerusuhan yang pertama diwakili oleh konflik-konflik Maluku, Poso, Aceh dan Irian Jaya.¹⁰ Melihat situasi yang demikian itu, semestinya pemerintahan Abdurrahman Wahid harus berusaha sekuat tenaga dalam meyakinkan rakyat Aceh dan membuka mata rakyat Aceh bahwa Indonesia bukanlah sebatas orde baru dan orde lama, tetapi lebih merupakan sebuah upaya terus-menerus untuk merealisasikan gagasan tentang kebebasan dan keadilan bagi setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke.¹¹

Kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya yaitu memecat beberapa anggota kabinetnya tanpa sepengetahuan Wakil Presiden Megawati, terkuaknya kasus Bollogate dan Bruneigate yang secara tidak langsung melibatkan Abdurrahman Wahid. Kasus ini menimbulkan memorandum II yang tidak diperhatikan oleh Abdurrahman Wahid akhirnya DPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Abdurrahman Wahid akhirnya kehilangan jabatannya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia setelah dirinya menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR. Bahkan mengeluarkan Dekrit, antara lain berisi tentang

¹⁰ Rizal Mallarangeng, *Akankah Sejarah Berulang*, 2000 dalam *Kompas* 17-08-00: [http:// www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=106](http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=106)

¹¹ *Idem*.

pembubaran MPR. Akhirnya MPR mengangkat wakil Presiden Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2001.

B. Permasalahan

1. Apa yang melatarbelakangi Abdurrahman Wahid diangkat sebagai presiden RI periode tahun 1999 – 2001?
2. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden?
3. Bagaimana pemerintahan yang dijalankan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden RI yang keempat dan dampaknya bagi bangsa Indonesia?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Abdurrahman Wahid kehilangan jabatannya sebagai presiden RI periode tahun 1999-2001 ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dilihat melalui dua aspek yang berbeda yaitu tujuan secara khusus dan tujuan secara umum. Adapun tujuan secara khusus dan umum dari penulisan ini adalah :

1. Mendeskripsikan latar belakang Abdurrahman Wahid dipilih dan diangkat menjadi presiden RI periode tahun 1999-2001.
2. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid periode tahun 1999-2001.

3. Mendeskripsikan pemerintahan Abdurrahman Wahid selama menjalankan pemerintahannya dan dampaknya bagi bangsa dan negara Indonesia.
4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid kehilangan jabatannya sebagai presiden RI periode tahun 1999-2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini akan menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai sejarah politik di Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya karya ilmiah tentang studi sejarah politik.

E. Kajian Pustaka

Sumber utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber primer serta sumber sekunder sebagai pendukung. Adapun sumber-sumber buku itu adalah :

1. Sumber primer

Prisma Pemikiran Gus Dur, buku ini ditulis oleh K. H. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Buku ini memperkenalkan pemikiran-pemikiran lama Gus Dur mengenai hubungan

agama dan ideologi, negara dan gerakan keagamaan, hak asasi manusia, budaya dan integrasi nasional, pesantren.

2. Sumber sekunder

Biografi Gus Dur, buku ini ditulis oleh Greg Barton pada tahun 2001 yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Buku ini berisi tentang pengaruh liberalisme Islam dan sumbangan beliau pada perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi.

Rakyat Indonesia Menggugat Gus Dur, buku ini ditulis oleh Arsyil A' la al-Maududi pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh Widha Press Yogyakarta. Buku ini berisi tentang upaya kodifikasi terhadap berbagai gugatan, pernyataan dan kritikan terhadap Gus Dur, dari berbagai sumber yang jelas dan bisa ditelusuri sehingga benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan selain itu buku ini bermaksud menyalurkan suara rakyat tentang Gus Dur.

Prisma Pemikiran Gus Dur, buku ini ditulis oleh K. H. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Buku ini memperkenalkan pemikiran-pemikiran lama Gus Dur mengenai hubungan agama dan ideologi, negara dan gerakan keagamaan, hak asasi manusia, budaya dan integrasi nasional, pesantren.

Gila Gus Dur buku ini ditulis oleh Ahmad Suedy dan Ulli Asbar Abdalla pada tahun 2000 yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta. Buku ini berisi tentang wacana pembaca mengenai Gus Dur dari pendapat beberapa tokoh yang mengamati perjalanan Gus Dur.

Biografi Politik Gus Dur, buku ini ditulis oleh Ahmad Bahar pada tahun 1999 yang diterbitkan oleh Bina Utama Jakarta. Buku ini mengulas tentang masa kepresidenan Abdurrahman Wahid.

F. Landasan Teori

Berkaitan dengan judul skripsi “ Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid periode tahun 1999-2001” ini ada beberapa konsep yang perlu dipahami:

1. Bentuk Pemerintahan

- 1) Pemerintahan dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif. Contoh: menurut UUD 1945 pemerintah adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri.
- 2) Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara yang termasuk DPR. Bentuk pemerintah yang terkenal adalah *monarki* (kerajaan) dan republik. Kerajaan atau *monarki* adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu *monarki* dapat berupa kaisar atau syah. Republik adalah negara dan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagaimana kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.¹²

¹² C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 21

2. Sistem Pemerintahan Negara

Yang dimaksud dengan pemerintahan adalah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah pelaksana (eksekutif) kebijakan umum. Pemerintah dan pemerintahan di sini memiliki suatu perbedaan yaitu pemerintahan lebih menyangkut tugas dan kewenangan sedangkan pemerintah lebih mengarah pada aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara tersebut.

Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua yaitu pengertian pemerintahan dalam arti sempit dan pengertian pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja, yaitu yang dilaksanakan oleh kepala pemerintahan dan kabinet sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹³

3. Perbedaan sistem Parleментар dan Sistem Presidensiil

a. Sistem Parleментар (*Parliamentary executive Cabinet system*)

Esensi sistem ini adalah pertanggungjawaban badan eksekutif kepada badan legeslatif. Titik sentral pembahasan sistem pemerintahan parlementer terbatas pada hubungan badan legeslatif dan eksekutif. Badan eksekutif bertanggungjawab kepada badan legeslatif, karena eksekutif dibentuk atas persetujuan dan kepercayaan yang diberikan legeslatif. Berapa lama eksekutif memegang kepercayaan itu tergantung pada adanya mayoritas dalam legeslatif yang mendukungnya. Pertanggung-jawaban eksekutif ini disebabkan oleh karena eksekutif dipilih dan diangkat badan

legeslatif baik dari luar maupun dari kalangan parlemen sendiri. Badan eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer merupakan mandataris parlemen dan setiap waktu mandat yang diberikan dapat dicabut. pencabutan mandat ini merupakan tindakan terakhir parlemen yaitu apabila eksekutif tidak dapat memberikan pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya dinilai tidak memuaskan dalam parlemen.¹⁴

Ciri-ciri dasar dari sistem parlementer adalah:¹⁵

- 1) Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
- 2) Anggota dan penimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Sebagian besar atau seluruh anggota kabinet juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda yaitu sebagai legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti memegang pemerintahan adalah partai yang memenangkan pemilihan umum atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang mencapai suara mayoritas.
- 3) Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini berarti parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala dari kelompok anggota tidak mendapat dukungan mayoritas dalam DPR.

¹³ Umaruddin Masdar, dkk. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. 1999. Yogyakarta: LKIS. hlm. 133

¹⁴ Rusadi Kantaprawiro. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. 1983. Bandung: Sinar Baru. hlm. 140

¹⁵ A. K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam Teori dan Praktek*, Djakarta, Pembangunan, 1956, hlm. 27

- 4) Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, perdana menteri dapat meminta presiden untuk membubarkan parlemen, kemudian menetapkan waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru (menurut UUD 1950, lamanya 3 hari).
- 5) Fungsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan kepala negara (presiden/raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

b. Sistem Presidensiil

Ciri-ciri dasar dari sistem presidensiil adalah:¹⁶

- 1) Kepala pemerintahan disebut presiden dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dengan proses pendakwaan luar biasa).
- 2) Kepala pemerintahan presidensiil dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, dan perdana menteri dipilih oleh badan legislatif.
- 3) Memiliki eksekutif nonkolegal (1 orang)

Jadi dapat dikatakan mengapa skripsi ini berjudul Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid karena selain sebagai perdana menteri (kepala pemerintahan), ia juga sebagai kepala negara.

¹⁶ Arend Ljphart, *Sistem Pemerintahan Parlemen Dan Presidensiil Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1995, hlm. 5

Suatu negara memiliki nilai yang positif apabila suatu negara itu dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah sebuah kerangka mendasar di mana kegiatan wira usaha (pedagang, petani, buruh dan lain-lain) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil. Pemerintah yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya. Tanpa suatu pemerintahan yang baik, suatu bangsa akan sulit untuk mencapai peningkatan kualitas sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa.¹⁷

Adapun prinsip atau asas pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

- a. Demokrasi, berprinsip dari, untuk dan oleh rakyat. Dengan demikian kekuasaan yang dimilikinya didapat dari rakyat melalui pemilihan umum dan bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat dan dilakukan oleh orang-orang yang mendapat mandat dari rakyat.
- b. Produktif, yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang baik menghasilkan kebijakan atau peraturan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya segelintir orang.
- c. Terawasi yaitu pemerintahan yang baik harus dapat diawasi oleh rakyat, baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya.¹⁸

¹⁷ Umaruddin Masdar. *ibid.*, hlm. 134

¹⁸ Umaruddin Masdar. *ibid.*, hlm. 137

Sedang Sistem Pemerintahan yang ditegaskan dalam UUD adalah:¹⁹

a. Indonesia

Adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), negara Indonesia berdasar atas hukum bukan pada kekuasaan belaka.

b. Sistem Konstitusi

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan terbatas).

c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di samping itu pokok-pokok pikiran dari sistem pemerintahan Indonesia adalah :

1. Indonesia adalah negara hukum
2. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh suatu badan yang diberi nama MPR.
3. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
5. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

¹⁹ C. S. T. Kansil. *op. cit.*, hlm. 36

Secara garis besar kekuasaan MPR, Presiden, dan DPR berdasarkan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. MPR

MPR adalah lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Dua tugas MPR adalah mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, MPR juga memiliki wewenang menetapkan UUD dan GBHN ini sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945, MPR juga memiliki wewenang mengubah UUD dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir dan putusan perubahan UUD ini bisa diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 37 ayat (1) dan (2). Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 jumlah anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian; 500 orang anggota DPR, 135 orang Utusan Daerah (5 orang dari setiap propinsi) dan Utusan Golongan 35 orang.²⁰

b. Presiden

Presiden menurut UUD 1945 adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara atau penyelenggara pemerintahan negara yang tinggi. Ada enam kekuasaan presiden menurut UUD 1945 yaitu :

- 1) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan UU.

²⁰ Umaruddin Masdar. *op. cit.*, hlm. 145

- 2) Kekuasaan administratif yaitu kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- 3) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat UU bersama DPR, membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
- 4) Kekuasaan militer yaitu kekuasaan presiden sebagai Panglima tertinggi ABRI dan kekuasaan untuk menyatakan perang atas persetujuan DPR.
- 5) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
- 6) Kekuasaan diplomatik yaitu kekuasaan untuk mengangkat duta dalam konsul serta menerima duta dari negara lain.

Sebagai catatan, bahwa kekuasaan presiden dalam sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensiil. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer presiden berfungsi hanya sebagai kepala negara. Sedang sistem kabinet presidensiil, presiden di samping berfungsi sebagai kepala negara juga sebagai kepala eksekutif. Sistem kabinet presidensiil ini merupakan suatu sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia.²¹ Sedang kepresidenan adalah lembaga pemerintahan yang dikepalai oleh presiden.

c. DPR

²¹ Umaruddin Masdar. *op. cit.*, hlm 147

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya terdiri dari wakil partai yang dipilih melalui pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Adapun tugas dan wewenang DPR antara lain :

- 1) Bersama-sama presiden membuat UU.
- 2) Bersama-sama presiden menetapkan APBN.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
- 4) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Sedang hak-hak yang dimiliki oleh DPR diantaranya:²²

- 1) Meminta keterangan kepada presiden.
- 2) Mengadakan penyelidikan.
- 3) Mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- 4) Mengajukan pernyataan pendapat.
- 5) Mengajukan RUU.
- 6) Mengajukan atau menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu.

Untuk dapat menjalankan tugasnya DPR dibantu oleh wakil-wakilnya yaitu DPR I (DPR tingkat propinsi), DPR II (DPR tingkat kabupaten atau kotamadya).

4. Bentuk Negara

a. Negara Kesatuan

Bentuk negara kesatuan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak ada negara dalam negara

²² Umaruddin Masdar. *ibid.*, hlm. 149

2) Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh secara intern maupun ekstern.

3) Hanya memiliki satu konstitusi/UUD

Penyelenggara negara kesatuan ada dua sistem, yaitu :

1) Negara kesatuan dengan Sistem Sentralisasi

Penerapan sistem ini pemerintah pusat menjalankan seluruh bidang kekuasaan pemerintahan, sedang daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan peraturan dan perintah dari pemerintah pusat. Jadi daerah tidak berhak mengadakan peraturan sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi adalah :

- (a) Memperkuat kesatuan politik dan mencegah keinginan daerah untuk memisahkan diri.
- (b) Adanya keseragaman peraturan negara di seluruh wilayah negara sehingga tercipta kesederhanaan hukum.
- (c) Penghasilan daerah dapat disebar ke seluruh wilayah negara.

Kerugian-kerugian sistem sentralisasi adalah :

- (b) Persoalan negara tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, karena semuanya harus diputuskan oleh pemerintah pusat.
- (c) Tidak semua peraturan dapat dilaksanakan dengan baik karena kondisi daerah belum tentu sama.
- (d) Rakyat di daerah tidak dapat kesempatan untuk menentukan dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri (tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi).

2) Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi

Penerapan dari sistem ini, pemerintah pusat tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, sebagaimana kekuasaan negara diberikan kepada daerah-daerah, dengan tujuan agar daerah dapat menentukan dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri, dengan demikian pemerintah pusat hanya menentukan urusan yang bersifat penting dan umum. Urusan yang menjadi kepentingan daerah dapat diatur oleh daerah sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah pusat. Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri disebut daerah otonom.

b. Negara Serikat

Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa bagian, dengan kedaulatan penuh ada pada gabungan dari negara-negara bagian itu. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²³

- 4) Ada negara dalam negara.
- 5) Kedaulatan ekstern berada ditangan pemerintah pusat/pemerintah federal.
- 6) Kedaulatan intern berada ditangan pemerintah bagian.
- 7) Terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi negara federal dan konstitusi negara bagian.

5. Pemerintahan Kabinet

Pemerintahan kabinet adalah pemerintahan melalui kementerian eksekutif yang dipilih melalui kekuasaan tertinggi dari mayoritas legislatif

bertindak sebagai komite eksekutifnya, mengarahkan kerja perdebatannya, mewakili partai yang sama dan prinsip-prinsip yang sama terikat oleh rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap partai dan dapat dibubarkan kapan saja apabila kementerian kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan yang diwakilinya. Pemerintahan kabinet merupakan sistem pemerintahan yang paling sederhana.

6. Tugas Pemerintah

Tugas pemerintahan adalah menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan (Pasal 82 UUDS RI).

7. Macam-macam Kabinet

a. Kabinet Presidensiil

Kabinet Presidensiil adalah kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan dipegang oleh presiden sendiri. Presiden merangkap memegang jabatan perdana menteri, para menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR melainkan kepada presiden saja.

b. Kabinet Parlementer

Kabinet Parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang hidup di dalam parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.

b. Kabinet Koalisi

²³ C. S. T. Kansil. *ibid.*, Hlm.4

Kabinet koalisi adalah kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa partai yang bersama-sama mempunyai wakil yang duduk dalam DPR yang jumlahnya lebih dari separuh jumlah anggota seluruhnya.

Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang mendasarkan pada prinsip kebebasan individu. Pemerintah hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali menyangkut kepentingan umum. Kebebasan yang menyangkut individu tidak mendapat campur tangan dari pemerintah akan tetapi yang menyangkut kepentingan umum tetap dilakukan oleh negara. Maka ada kemungkinan yang minoritas bisa menguasai yang mayoritas. Pelaksanaannya dalam pemerintahan menggunakan sistem parlementer yang berarti pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kali ada ketidakcocokan maka DPR bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, sehingga dalam demokrasi wajar bila dalam waktu singkat kabinet dapat berganti-ganti.²⁴

Menurut Locke yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno, kekuasaan negara liberal adalah penguasa menerima kekuasaannya dari masyarakat demi suatu tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat. Maka penggunaan kekuasaan itu hanya sah dalam rangka tujuan itu dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi negara tidak berhak untuk mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencampuri segala bidang kehidupan masyarakat. Negara tidak mempunyai legitimasi untuk

²⁴ Miriam Bidiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1993. Jakarta:Gramedia. Hlm. 50

mengurus segala-galanya. Inti paham liberal tentang negara adalah bahwa kekuasaan negara harus semaksimal mungkin.²⁵

8. Partai Politik

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat. Teori kedua mengatakan bahwa partai politik dibentuk karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, di mana perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan krisis seperti legimitasi, integrasi, dan partisipasi. Untuk dapat mengatasi ketiga permasalahan tersebut maka perlu dibentuk partai politik. Sedang teori ketiga mengatakan bahwa partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Dengan demikian teori ketiga ini memiliki kesamaan dengan teori kedua yang menyatakan bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan dari modernisasi.²⁶

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.²⁷

²⁵ Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik*. 1987. Jakarta:Gramedia. hlm. 229

²⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 1992, Jakarta : PT Gramedia Widiasrama Indonesia, hlm. 113

²⁷ Miriam Budiarto, *op. Cit.*, hlm.160

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.²⁸

Menurut pendapat R. H. Soltav, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.²⁹

Menurut pendapat Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda.³⁰

Secara garis besar fungsi partai politik adalah :

- a) Sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
- b) Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
- c) Partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

²⁸ Miriam Budiarmo, *ibid.*, hlm161

²⁹ *Idem.*

- d) Pemandu kepentingan yaitu kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- e) Komunikasi politik yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya.
- f) Partai politik berfungsi untuk mengendalikan konflik, menampung aspirasi, membawa permasalahan ke dalam musyawarah DPR untuk mendapatkan penyelesaian.³¹

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, fungsi partai politik adalah:³²

- 1) Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan Permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- 3) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

9. Klasifikasi Partai



³⁰ Miriam Budiarto, *ibid.*, hlm162

³¹ Umaruddin Masdar, *op. Cit.*, hlm 107

³² *Idem*

Klasifikasi partai dalam pemilu 1999 yaitu partai yang mendominasi dalam pemilihan umum 1999 adalah Golkar yang memiliki segmen pasar yang bersifat majemuk (berasal dari berbagai golongan), PAN, PKB dan PPP yang bersegmen pasar sama terutama dalam memperebutkan Islam Moderat, PKB lebih berpijak pada NU yang tradisional dan PDI lebih pada partai yang berjiwa nasionalis dengan segmen pasar yang nasionalis pula. Tiap segmen memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat pada posisi suara anggota MPR. Dalam anggota MPR posisi suara tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu wakil partai yang dipilih dalam pemilu serta anggota-anggota lain yang diangkat sebagai anggota tambahan yaitu ABRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Adapun prosentase dari kedua anggota MPR di atas adalah:³³

1. Wakil partai yang dipilih dalam pemilu jumlah anggota 462 dengan prosentase 66%
2. Anggota-anggota yang diangkat berjumlah 238 orang dengan prosentase 34% dari jumlah total. Anggota-anggota itu terdiri dari :
 - ABRI dengan jumlah anggota 38 orang (5,4%)
 - Utusan Daerah dengan jumlah anggota 138 orang (19,3%)
 - Utusan Golongan dengan jumlah anggota 65 orang (9,3%)

Untuk memenangkan pemilu, maka kekuatan politik harus mengumpulkan mayoritas 51% suara atau 351 kursi di MPR. Pada pemilu tahun 1999 perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid dengan jumlah suara 373 di atas PDI Perjuangan, dengan selisih 60 suara.

³³ J.Kristiadi, *Partai Politik dan Kemampuan Kompetisi Menggalang Dukungan 1999*, Analisis CSIS: Centre for Strategic International Studies, hlm. 143

- a. Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya:³⁴
- 1) Partai Masa : Mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak lebar. Kelemahan dari partai ini adalah masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung dibawah partai masih cenderung untuk melaksanakan kepentingan masing-masing terutama pada saat-saat kritis, sehingga dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memusatkan diri dan mendirikan partai baru.
 - 2) Partai Kader : partai ini lebih mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang ditetapkan.
- b. Dilihat dari segi sifat dan orientasi:³⁵
- 1) Partai Lindungan (*patronage party*) : Umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan.

³⁴ Miriam Budiarjo, *op., cit.* hlm. 16

- 2) Partai Ideologi/Partai Azas : Mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa percobaan.

c. Fungsi partai-partai dalam negara demokrasi

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik

Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (*the rulers*) dengan mereka yang diperintah (*the ruled*). Proses di mana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

- 2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Proses di mana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- 3) Sebagai sarana rekrutmen politik

³⁵ Miriam Budiarmo, *ibid.*, hlm. 166-167

Rekrutmen politik adalah proses di mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

4) Sebagai sarana pengatur konflik

Negara demokrasi masyarakatnya bersifat terbuka. Adanya perbedaan dan persaingan merupakan hal yang wajar.

Dalam sistem politik ada empat variabel yaitu:³⁶

1) Kekuasaan

Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2) Kepentingan

Tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok politik.

3) Kebijakan

Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.

4) Budaya politik

Orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* ialah:³⁷

- a) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus pula menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

³⁶ Miriam Budiarjo, *ibid.*, hlm 49

- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial trbunds*)
- c) Pemilihan umum yang bebas
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
- f) Pendidikan kewarganegaraan

Berdasarkan konsep di atas, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat.

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan ciri-ciri tidak ada negara dalam negara, pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh secara intern maupun ekstern, hanya memiliki satu konstitusi yaitu UUD.

Sedang sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensiil yaitu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan disebut presiden dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh UUD. Kepala pemerintahan (presiden) dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau melalui badan pemilihan. Untuk itu kabinet yang dijalankan oleh Indonesia adalah kabinet presidensiil. Kabinet presidensiil adalah kabinet di mana pertanggung jawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden sendiri. Para menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR melainkan kepada presiden.

Pada masa reformasi, Indonesia dihadapkan dalam beberapa cobaan terutama dalam politik (pemerintahan). Hal tersebut datang dan terlihat jelas saat

³⁷ Miriam Budiarmo, *ibid.*, hlm. 60

berakhirnya pemerintahan Soeharto, awal pemerintahan B. J. Habibie sampai pemerintahan Abdurrahman Wahid periode tahun 1999-2001, akan tetapi alangkah baiknya apabila kita meninjau keadaan (kondisi) politik sebelum Abdurrahman Wahid diangkat sebagai presiden RI.

Perkembangan politik di tanah air pada catur wulan ke tiga tahun 1998 dan Januari 1999 masih diselimuti awan kelabu. Hal ini disebabkan karena berbagai persoalan tetap menggantung, dan selalu menghasilkan ketidakpastian. Selain masih menghadapi masalah legitimasi, pemerintahan B. J. Habibie secara terus menerus digerogeti oleh berbagai isu-isu yang makin menggoyangkan kredibilitasnya di mata masyarakat baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Di sisi lain SI MPR sebagai upaya mengatasi persoalan-persoalan tersebut boleh dikatakan tidak sepenuhnya berhasil, karena beberapa bagian dari proses dan hasil SI MPR cenderung menimbulkan kontroversi dan permasalahan baru. Keadaan yang demikian membuat perjalanan bangsa ini menjadi semakin sulit untuk melepaskan diri dari krisis yang berkepanjangan.

Seiring dengan proses SI MPR yang kontroversial, di masyarakat muncul fenomena baru. Setelah 32 tahun berada dalam tekanan rezim Orde Baru, masyarakat kini nampak berada dalam suasana euforia kebebasan di mana setiap orang seolah-olah dapat berbuat sesukanya tanpa sanksi. Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Orang seolah-olah dapat melakukan apa saja yang ingin dilakukannya tanpa rasa takut atas sanksi hukum. SI MPR pun mampu menghasilkan "kepatuhan publik" sehingga berbagai tindakan anarki seperti penculikan, kerusuhan, perusakan dan pembakaran yang sering disertai dengan

penjarahan, perampokan, pembunuhan hingga pemerkosaan praktis tidak tercegah.

Persoalan-persoalan di atas sebenarnya hanya menunjukkan bahwa otoritas politik sipil maupun militer nampaknya tidak lagi memiliki kemampuan untuk secara bijaksana mengarahkan proses transformasi demokrasi melalui cara atau jalan damai. Oleh karena itu muncul gagasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan melalui jalur informal, yang lebih fleksibel, praktis dan sederhana dalam bentuk dialog nasional.

Salah satu tujuan dari gagasan diselenggarakannya dialog nasional adalah untuk menyamakan misi dan pola pikir dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul dari kondisi dan situasi Indonesia pada waktu itu. Pencetus pertama diselenggarakan dialog nasional adalah Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar. Dialog nasional di sini merupakan wahana berkumpulnya seluruh komponen bangsa yang diwakili oleh para tokoh masyarakat yang merasa terpanggil untuk merefleksikan diri dengan pikiran jernih untuk saling memberi dan menerima, didasarkan kepada suatu kepentingan yang lebih besar yaitu menyelamatkan bangsa.

Salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam dialog nasional “dialog nasional” adalah K. H. Abdurrahman Wahid. Bersama dengan para mahasiswa yang tergabung dalam Forum komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung dan Universitas Siliwangi, telah memprakarsai sebuah dialog yang dilaksanakan di kediamannya di Cigantur, Jakarta selatan pada tanggal 10 November 1998. Hadir dalam dialog tersebut empat tokoh reformis yaitu

Megawati Soekarno Puteri, Amien Rais, Sri sultan Hamengkubuwono X dan Abdurrahman Wahid sendiri. Dialog Ciganjur ini menghasilkan 8 butir kesepakatan yaitu:³⁸

1. Menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Kebangsaan dan Kesatuan RI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperdayakan lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang mencerminkan kepentingan rakyat bukan penguasa.
3. Mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat sebagai asas perjuangan dalam proses pembangunan bangsa kearah masyarakat adil dan makmur.
4. Pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa yang akan dating.
5. Segera dilaksanakannya pemilu yang jujur dan pemilu merupakan jalan demokratis untuk mengakhiri pemerintah transisi yang dipimpin oleh B. J. Habibie, sekaligus sebagai cara untuk menetapkan pemerintah yang legitimate.
6. Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap paling lama 6 tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

³⁸ I Made Leo Pratama, *Perjalanan Sebuah Dialog Nasional*, 1999, Analisis CSIS: Centre for Strategic International Studies, hlm.8

7. Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar lagi untuk menghadapi dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Mendesak seluruh pengamanan swakarsa SI MPR untuk segera membubarkan diri.

Meski dilakukan secara informal, artinya hasilnya tidak mengikat warga Negara secara langsung, pertemuan itu secara moral mempunyai pengaruh besar yaitu :³⁹

1. Ketokohan para peserta pertemuan dapat mengundang atau menarik dukungan yang luas terhadap hasil-hasil pertemuan.
2. Dari segi substansi, kesepakatan Ciganjur dapat menjadi acuan dialog formal.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid terus melakukan terobosan dengan melakukan pertemuan-pertemuan secara parsial. Gagasan-gagasan dan usaha-usaha dialog informal antara tokoh-tokoh nasional terus bergulir dengan jumlah anggota semakin luas.⁴⁰

Meski telah berlangsung dan semakin bertambah anggota dalam dialog nasional, namun dialog nasional tidak luput dari masalah pro dan kontra. Pro dan kontra itu antara lain :

1. Dialog nasional yang sedang berlangsung terkesan elitis karena hanya melibatkan tokoh-tokoh elit baik dari masyarakat maupun pemerintah.

³⁹ I Made Leo Pratama, *ibid.*, hlm.9

⁴⁰ I Made Leo Pratama, *ibid.*, hlm.10

2. Ditengah mendesaknya persoalan bangsa yang harus diselesaikan, masih ada pihak yang mempersoalkan dan tidak menyetujui diselenggarakannya dialog nasional.
3. Melibatkan Soeharto dalam dialog nasional dipandang oleh banyak kalangan sebagai hal yang mustahil akan tetapi Abdurrahman Wahid menilai bahwa Soeharto masih memiliki kekuatan riil yang cukup besar.
4. Dialog nasional merupakan forum informal sehingga apapun hasilnya tidak akan mengikat seluruh warga Negara.

Diakui atau tidak, nampaknya beberapa substansi hasil dari rangkaian dialog nasional telah membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di negeri ini. Sebagian kesepakatan Ciganjur misalnya nampak diakomodasikan dalam beberapa bagian ketetapan-ketetapan yang dihasiikan SI MPR 1998, termasuk ketetapan tentang pemilu. Oleh karena itu, pekerjaan berat dalam rangka dialog nasional tetapi harus dilakukan, baik menyongsong maupun sesudah pemilu 1999.

Dialog nasional dapat diteruskan sebagai upaya mengkaji permasalahan yang berkembang secara berkesinambungan. Jika pada saat tertentu proses politik yang sedang berlangsung tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, maka dialog nasional dapat menjadi lembaga kontrol informal yang mewakili masyarakat, sebab menarik pelajaran dari masa orde baru semua proses politik dapat diatur atau direayasa sedemikian rupa bahkan seringkali inkonstitusional di mana tidak satu (orang, kelompok atau institusi) pun dapat memberikan koreksi atas proses-proses politik yang menyimpang. Dialog

nasional dapat menjadi semacam kekuatan pengimbang dan salah satu alat kontrol masyarakat terhadap sebuah rezim yang sedang berkuasa.

Selain dialog nasional wujud dari reformasi bagi bangsa Indonesia, terbentuknya kabinet persatuan nasional di bawah duet kepemimpinan Abdurrahman Wahid-Mega pada tanggal 26 Oktober 1999 pada dasarnya merupakan akhir dari rangkaian proses inisial institusionalisasi politik di Indonesia. Pemilihan Umum 1999 merupakan awal dari proses institusionalisasi ini, telah berlangsung secara relatif *fair* dan demokratis. Demikian juga SU MPR 1999 terlaksana secara demokratis dan terbuka sehingga membawa nuansa akuntabilitas yang memadai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan bagian dari agenda SU MPR 1999, pun terlihat menyajikan suasana baru bagi pengembangan kultur demokratis Indonesia.

Oleh karena itu, masa depan Indonesia bukan hanya tergantung pada bagaimana pemerintah baru dibawah duet Abdurrahman Wahid-Mega menyelesaikan berbagai masalah krisis ekonomi dan sosial-politik, tetapi juga bagaimana “rezim reformasi” yakni sinergi keseluruhan jajaran pemerintah baru yang terdiri dari lembaga-lembaga MPR, DPR, Presiden dan MA melanjutkan proses institusionalisasi reformasi selanjutnya secara optimal.

Untuk itu masalah pokok yang harus segera ditangani oleh duet Abdurrahman Wahid-Mega adalah mewujudkan proses reformasi politik dan hukum (demokrasi) dan mengatasi masalah krisis ekonomi. Indikasi pertama yang menunjukkan komitmen duet kepemimpinan atas masalah tersebut adalah pada profil kabinet yang dibentuk. Akan tetapi, kabinet Abdurrahman Wahid

nampaknya kurang memenuhi harapan publik. Kabinet Abdurrahman Wahid dinilai lebih merupakan kabinet kompromi yang mengakomodasikan banyak segmen masyarakat dan kekuatan politik atau dengan kata lain kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid hanyalah kabinet yang berbasis partai-partai politik.

Pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid akan berhasil, apabila pemerintah yang baru ini memperhatikan beberapa hal sebagai kuncinya yaitu apabila berhasil konsolidasi terutama dalam pembagian tugas dan fungsi antar lembaga-lembaga negara hal ini diikuti dengan langkah-langkah rezim transisi dalam merealisasikan tuntutan-tuntutan reformasi, dan langkah-langkah kabinet dalam menindaklanjuti berbagai kasus yang berkaitan dengan usaha menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, dengan menancapkan landasan-landasan reformasi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Proyeksi optimis tersebut memiliki beberapa alasan antara lain *pertama* terbentuknya rezim transisi dan kabinet Abdurrahman Wahid-Mega pada akhirnya relatif memperoleh penerimaan yang luas (*acceptable*). *Kedua* meski dikritik karena kurang memperhatikan profesionalisme, kabinet Abdurrahman Wahid-Mega relatif *acceptable* karena merekrut orang-orang yang relatif kuat untuk menggalang kesatuan dan koordinasi dalam kabinet. Secara lebih khusus, kepemimpinan Abdurrahman Wahid adalah kepemimpinan yang aspiratif dalam arti mau mendengarkan kritik secara terbuka. *Keempat* keseluruhan jajaran rezim mempunyai komitmen yang sama terhadap reformasi, demokratisasi dan keterbukaan dan yang terakhir gerakan mahasiswa dan kaum cendekiawan untuk

tetap kritis dan beroposisi terhadap kekuasaan, serta pers yang bebas akan merupakan institusi kontrol terhadap rezim transisi secara keseluruhan dan oleh karena itu mencegah rezim ini menjadi rezim otoriter.⁴¹

Hal tersebut membuktikan bahwa terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden, dianggap sebagai simbol bagi kerukunan nasional yang melahirkan harapan baru bagi terwujudnya Indonesia yang baru juga. Bila dilihat begitu besar harapan dari rakyat Indonesia ini membuat beban yang sangat besar pula bagi kedua pemimpin baru.⁴²

Selain itu terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI yang keempat juga disambut berbagai kalangan luas sebagai pemberi harapan bagi rakyat di masa depan.

Untuk itu ada tiga hal yang penting yang nampaknya harus segera ditindaklanjuti oleh cabinet Abdurrahman Wahid. Hal penting itu adalah harapan dari rakyat Indonesia. Tiga hal penting tersebut antara lain *pertama* adalah penuntasan kasus Soeharto dan masalah KKN lainnya termasuk kasus Bank Bali. Ini penting untuk membuktikan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid-Mega benar-benar mempunyai komitmen untuk memutus hubungan dengan kesalahan-kesalahan rezim masa lampau, dan untuk menegakkan suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. *Kedua* adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, mulai dari kasus tragedi Trisakti hingga masalah Aceh dan Ambon. Ini untuk membuktikan bahwa pemerintah baru benar-benar mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum yang adil di Indonesia. *Rule of law* menjadi

⁴¹ T.A.Legowo, *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999,1999*,CSIS:Centre for Strategic International Studies,hlm.380

bagian yang sangat signifikan bagi pertumbuhan demokrasi. *Ketiga* adalah penanganan secara benar krisis ekonomi. Langkah yang tepat dalam menangani masalah ini akan dengan sendirinya menumbuhkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional bahwa pemerintahan ini benar-benar serius ingin menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Meski demikian pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid dapat dikatakan tidak berhasil. Ini disebabkan karena banyaknya kritikan-kritikan yang dilontarkan padanya. Dalam pemerintahannya, Abdurrahman Wahid mendapatkan banyak kecaman terutama dalam masalah Aceh, Timor Timur, kasus Buloggate dan Brunaiggate.

Masalah tersebut ternyata tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Abdurrahman Wahid. Di sisi lain Abdurrahman Wahid juga menolak untuk memberikan pertanggung jawaban dalam SI MPR dan bahkan mengeluarkan Dekrit antara lain berisi pembubaran MPR. Abdurrahman Wahid akhirnya kehilangan jabatannya sebagai presiden dan pada tanggal 24 Juli 2001 MPR mengangkat wakil presiden Megawati sebagai presiden RI.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

⁴² Arief Mudatsir Mandan. *op. cit.*, hlm.42

⁴³ T. A. Legowo, *op.cit.*, hlm.381

1. Kalau Abdurrahman Wahid diangkat menjadi presiden RI yang keempat , maka salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah perkembangan politik/pemerintahan Habbie yang tidak baik.
2. Kalau Pemerintahan yang dijalankan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden berjalan baik, maka beliau akan dapat menangani masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.
3. Kalau pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan HAM sudah terealisasi dalam pemerintahan, maka pemerintahanyapun dapat berjalan dengan baik.
4. Kalau tidak terjadi perseteruan elit politik, maka Abdurrahman Wahid tidak akan kehilangan jabatannya sebagai presiden RI.

H. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metodologi

Sejarah sebagai ilmu memiliki metode-metode ilmiah seperti halnya ilmu lainnya. Metode ilmiah dalam penelitian sejarah digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisa fakta-fakta yang ada sehingga dapat diketahui secara tepat mengenai kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi masa lampau. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh menempuh proses itu disebut *historiografi* (penulisan sejarah), dengan menggunakan metode sejarah dan *historiografi*, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-

banyaknya dari masa lampau manusia.⁴⁴ Metode analisa sejarah ini mencakup empat hal yaitu :

- a. Pemilihan subyek untuk diselidiki
- b. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut.
- c. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya.
- d. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang sudah terbukti.⁴⁵

Penelitian ini menyangkut obyek sejarah, sehingga metode sejarah adalah yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Louis Gottschlac ada lima tahap yang harus dilalui untuk dapat merekontruksi suatu peristiwa sejarah yaitu:⁴⁶

- a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik di sini merupakan salah satu langkah kerja yang pertama yang harus dijalankan oleh seorang penulis agar apa yang ingin diketengahkan dalam penulisannya menjadi jelas lebih-lebih di mata pembaca sendiri. Untuk itu diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan yaitu:

- 1) Topik harus memiliki nilai, yaitu topik di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat.

⁴⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (terj)*, 1986, Jakarta:Universitas Indonesia Press, hlm. 32

⁴⁵ Louis Gottschalk, *ibid.*, hlm. 34

⁴⁶ *Idem.*

- 2) Topik harus orisinal yang berarti bahwa apa yang ditulis belum pernah ditulis oleh orang lain.
 - 3) Topik harus praktis yang berarti bahwa pemilihan topik di sini apabila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan banyak waktu.
 - 4) Topik harus memiliki kesatuan tema dan topik di sini harus berangkat dari suatu permasalahan.
- b. Pengumpulan sumber (Heuristik)

Banyak macam dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian sejarah. Untuk memilih suatu subyek dan mengumpulkan informasi mengenai subyek itu, maka diperlukan beberapa sumber yaitu sumber tulisan dan lisan. Sumber tulisan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang disampaikan dari seorang saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Sumber primer bisa disampaikan dalam bentuk tertulis yang berupa dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, surat kabar, internet dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Sumber lisan yaitu sumber yang dapat dicari melalui wawancara. Sedang dalam skripsi ini penulis lebih menggunakan sumber sekunder yang lebih pada studi pustaka. Sumber-sumber tersebut penulis peroleh melalui buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa dan berbagai sumber atau literatur yang ada di perpustakaan Sanatha Dharma, perpustakaan daerah Yogyakarta dan diberbagai tempat lainnya. Sumber-sumber itu

berupa buku-buku pusataka dan majalah, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku yang mengulas tentang biografi Abdurrahman Wahid seperti Gila Gus Dur, Biografi gus Dur, Gus Dur Kyai Nyentrik Jadi Presiden, majalah terbitan sejaman dengan peristiwa yang sedang berlangsung sebagai contoh CSIS tahun XXX/2001, Tempo No.44/XXVIII tahun 2000.

Dalam skripsi ini penulis tidak menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, karena penulis sulit menemui langsung Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang sangat sibuk.

c. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah pengumpulan data. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan otensitas sumber. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber adalah uji terhadap data pada penelitian. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.⁴⁷ Salah satu cara yang dilakukan adalah kritik intern dengan membandingkan sumber supaya diketahui kebenarannya. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penulis melakukan kririk sumber dengan cara melihat dan mengkaji apakah sumber tersebut dapat dipercaya

⁴⁷ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 1995, Jakarta : Yayasan Benteng Budaya

kebenarannya dan bersifat obyektif, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipercaya dan relevan. Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi sejarah.

Bukti bahwa penulis sudah melakukan kritik sumber khususnya kritik intern yaitu pada sumber buku dan majalah. Penulis membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya yaitu antara majalah dengan buku-buku yang penulis gunakan, ternyata antara buku dengan majalah terdapat kesamaan dalam hal data-data dan informasi yang terkandung di dalamnya, sebagai contoh buku Arsyil'Ala Al-Maudi, *Rakyat Indonesia Menggugat Gus Dur*, 2000, Yogyakarta:WIDHAH PRESS dengan majalah karangan I Made Leo Wiratama, *Kemelut Politik Demokrasi dan Konstitusi*, 2000, Analisa CSIS tahun XXX/2001. Kedua sumber tersebut menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid bersalah dalam menangani masalah dana Yanatera Bulog, namun alasan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut berbeda. Arsyil'Ala Al-Maudi menjelaskan bahwa dana tersebut dipergunakan oleh Abdurrahman Wahid untuk urusan pribadi, namun I Made Leo Wiratama menjelaskan bahwa kesalahan Abdurrahman Wahid adalah tidak melaporkan dana tersebut dalam lembaran negara/berita negara. Maka dalam skripsi ini penulis lebih mendasarkan pada pendapat I Made Leo Wiratama, karena hampir semua sumber majalah seperti M.Sudibjo, *Proses Menuju SI MPR dan Ketatanegaraan RI*, 2001, CSIS dan M.Taufikgurohman, *Akhir dari Bulan Madu*, 2000,

Tempo yang penulis baca menyatakan hal yang sama dengan pendapat I Made Leo Wiratama.

d. Interpretasi data (Analisa data)

Analisis sumber atau interpretasi dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu mengurangi subyektifitas yang biasa muncul dalam historiografi. Sejarah dalam obyektif (peristiwa) yang diamati dan dimasukkan ke pikiran subyek tidak akan murni tetapi akan murni apabila diberi warna sesuai kacamata subyek, artinya interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu peristiwa. Sebagai contoh mengapa dekrit Soekarno bisa diterima oleh banyak kalangan daripada dekrit yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid, karena dekrit Soekarno disetujui oleh beberapa pihak seperti ABRI, PNI dan PKI.⁴⁸ Sedangkan dekrit yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid tidak disetujui oleh beberapa pihak seperti MPR, DPR dan ABRI.⁴⁹

e. Penulisan sejarah (historiografi)

⁴⁸ G.Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, 1988. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 113

⁴⁹ M.Djadijono, *Pemerintahan Baru, Program Kerja dan Prospeknya*, 2001, CSIS: Centre of Strategic and International Studies. hlm. 225

Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber sejarah yang terkait di dalamnya, yang memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi.

Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut diantaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Di samping itu dalam penelitian ini mencakup beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis diantaranya: topik, latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dari penulisan ini, manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, jadwal penelitian dan sumber yang terakhir yaitu daftar pustaka

Sedang metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskripsi analitis, yakni model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual. Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi Abdurrahman Wahid diangkat sebagai presiden RI periode tahun 1999 sampai 2001, masalah kedua bagaimana pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden RI, masalah ketiga apa kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid serta dampak bagi bangsa dan negara Indonesia, masalah keempat apa

faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid kehilangan jabatannya sebagai Presiden RI.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan psikologi. Adapun yang akan dianalisis dalam pendekatan politik adalah bagaimana distribusi kekuasaan terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu negara selanjutnya bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu mengakhiri masa tugas Abdurrahman Wahid.

Sedang untuk pendekatan psikologi adalah pendekatan yang berorientasikan pada tingkah laku manusia. Syarat utama dari pendekatan ini adalah tingkah laku manusia yang berorientasi umum. Masalah dalam pendekatan psikologi ini adalah pada tingkah laku manusia baik tingkah laku dalam maupun tingkah laku luar. Penganalisa dari tingkah laku tersebut mesti membuat ketentuan dengan hadirnya suatu organisme atau sebagai penengah antara rangsangan dari luar dan kemungkinan adanya tanggapan. Seperti yang diketahui pada dasarnya sifat dari manusia adalah halus dan selalu hidup dalam kebersamaan, namun karena adanya rangsangan dari luar yang tidak sesuai dengan sifat dasar manusia tersebut maka sifat manusia yang semula halus akan mengalami perubahan.⁴⁸

⁴⁸ Robert F. Berchover. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York : A Free Press Paperback. hlm. 25

Pendekatan psikologis ini penulis gunakan untuk mengkaji Biografi dari Abdurrahman Wahid yang akan ditulis pada bab II. Melalui pendekatan psikologis ini, penulis dapat menguraikan sifat dasar Abdurrahman Wahid. Sifat dasar itu dapat kita ketahui dari biografi Abdurrahman Wahid. Dalam biografi Abdurrahman Wahid tersebut penulis menguraikan sifat dasar beliau yang semula memiliki kepribadian yang alim selayaknya para santri mengalami perubahan menjadi seorang politikus yang dikenal dengan manuver-manuvernya. Perubahan sifat dasar dari Abdurrahman Wahid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingginya pendidikan yang telah beliau tempuh, seringnya komunikasi dengan orang-orang di luar pesantren dan banyaknya hubungan yang beliau rintis dengan negara-negara lain, serta kondisi Indonesia dan rakyat Indonesia yang sangat memperhatikan dan butuh perhatian yang sangat serius.

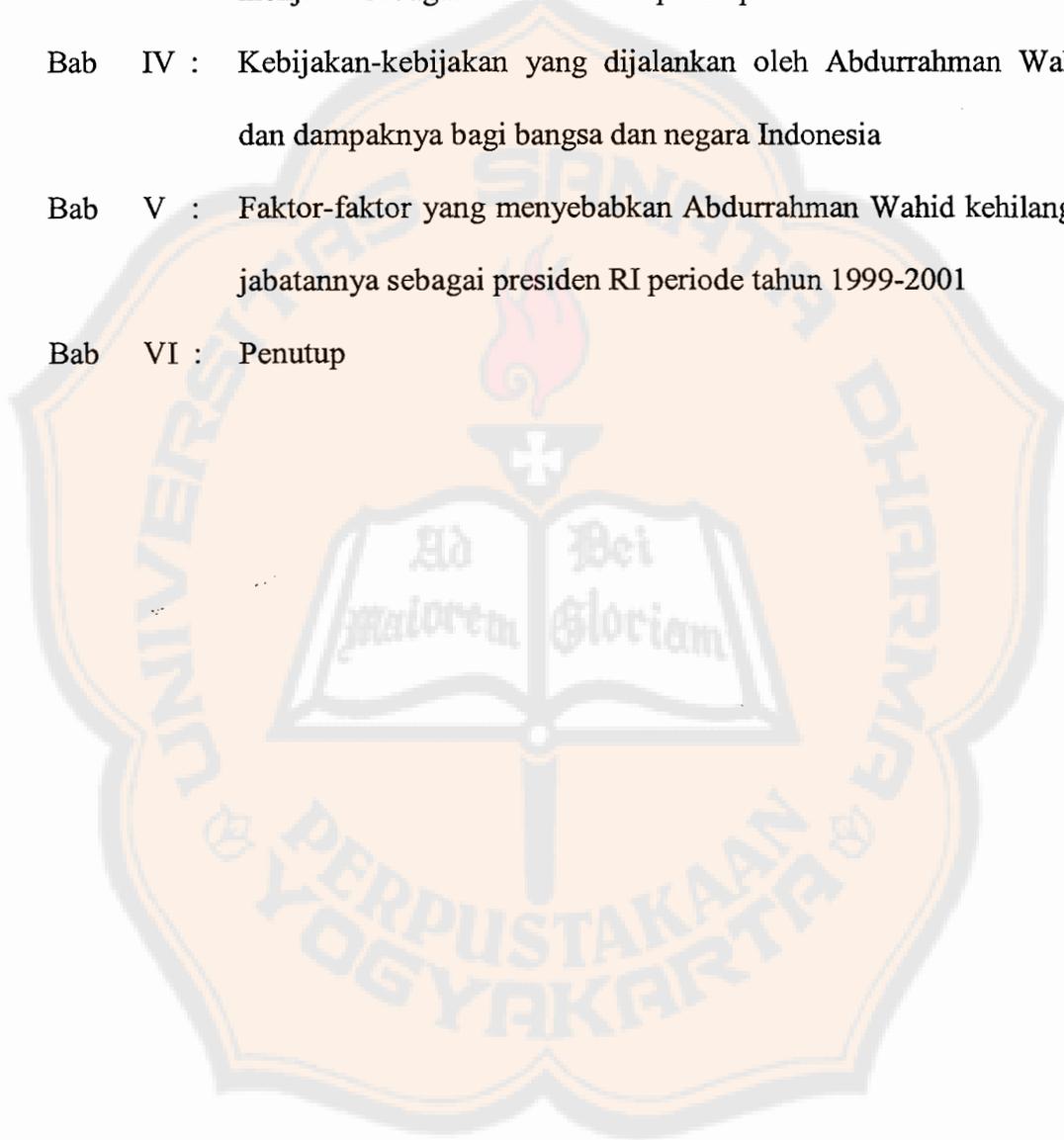
I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis tunjukkan untuk memaparkan secara garis besar masa kepresidenan Abdurrahman Wahid periode tahun 1999 – 2001. Adapun kerangka dari penulisan ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini penulis lebih memaparkan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II : Latar belakang Abdulrahman Wahid diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat.
- Bab III : Pemerintahan yang dijalankan Abdulrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia
- Bab IV : Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Abdulrahman Wahid dan dampaknya bagi bangsa dan negara Indonesia
- Bab V : Faktor-faktor yang menyebabkan Abdulrahman Wahid kehilangan jabatannya sebagai presiden RI periode tahun 1999-2001
- Bab VI : Penutup



BAB II

LATAR BELAKANG ABDURRAHMAN WAHID
TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN



A. Biografi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah tokoh yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan tokoh intelektual yang memiliki ide-ide yang sangat cemerlang. Sikapnya yang demokratis dan humanis ini memberikan kesan yang dalam bagi sebagian besar masyarakat. Citra humanis Abdurrahman Wahid ini sanggup membawa citra politik yang positif yang melampaui garis-garis sektarianisme yang harus diakui, karena masih eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁰

Untuk mengetahui siapakah Abdurrahman Wahid, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang hidupnya. Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Beliau dilahirkan dari keluarga Santri. Kakek kandung Abdurrahman Wahid adalah Hasyim Asy'ri, pendiri ormas besar NU (Nahdatul Ulama). Sedang ayahnya adalah K. H. Hasyim.⁵¹

Masa kecil Abdurrahman Wahid ini sama dengan kehidupan anak-anak kecil lainnya. Abdurrahman Wahid di sini juga memiliki cita-cita yang sama dengan teman-teman seusianya. Cita-cita Abdurrahman Wahid sejak kecil adalah ingin menjadi ABRI.

⁵⁰Ahmad Bahar, *Biografi Politik Abdurrahman Wahid*, 1999, Jakarta: Bina Utama, hlm. 2

⁵¹ *Idem*.

Namun sayang cita-cita Abdurrahman Wahid kandas ditengah jalan, karena dalam perkembangannya beliau justru lebih berminat pada ilmu sastra, humaniora, filsafat dan agama.⁵² Selain itu beliau juga menggeluti sepak bola, seni, catur bahkan nonton film.⁵³ Apresiasi Abdurrahman Wahid terhadap film jauh lebih serius daripada temen-teman sebayanya.⁵⁴

Sedang Ilmu sastra yang beliau tekuni dan gemari adalah sastra picisan yang berisi tentang cerita-cerita pendekar silat dari Cina terutama tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis Indonesia keturunan Cina.

Sebagaimana seorang remaja lainnya, Abdurrahman Wahid memiliki hobi membaca. Disini Abdurrahman Wahid sangat tertarik dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan PD II, novel-novel besar Inggris, Prancis, Rusia, tulisan-tulisan ahli-ahli teori sosial Eropa.

Hobi yang dimiliki oleh Abdurrahman Wahid tersebut, membuat beliau memiliki sifat kemanusiaan atau manusiawi. Cintanya akan kemanusiaan ini mulai beliau bina melalui kegemarannya dalam membaca sastra.

A. 1. Pendidikan yang Dijalani oleh Abdurrahman Wahid

Pendidikan Abdurrahman Wahid diawali dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berlokasi di Jakarta, kemudian pada tahun 1956 beliau melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta, selanjutnya beliau menjadi santri di pesantren Tambak Beras Jombang kurang lebih 4 tahun yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1963. Pendidikan tingginya beliau jalani dengan menjadi

⁵² Darmawan, *op. cit.*, hlm. 34

⁵³ Ahmad Bahar, *op. cit.*, hlm. 3

⁵⁴ Greg Balton, *op. cit.*, hlm. 51

mahasiswa di Department Of Higher Islamic and Arabic Studies di Universitas Al-azhar Kairo dan juga di fakultas Sastra di Universitas Baghdad Irak pada tahun 1970.⁵⁵

Perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid tidak berjalan mulus, di dalamnya juga ada riak-riak kecil yang menjadi penghambatnya, yang dimaksud riak-riak kecil disini adalah kegagalan. Kegagalan ini pernah beliau alami saat beliau sekolah di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Yogyakarta. Di SMEP inilah Abdurrahman Wahid pernah mengalami kegagalan dalam studinya dan tidak naik kelas.

Dalam perkembangannya, Abdurrahman Wahid sangat menekuni agama. Hal ini sangat cocok dengan cita-cita sang ibu yang menginginkan puteranya mewarisi sang kakek dan ayahndanya untuk mengembangkan pesantren dan ilmu agama secara luas.

Pada masa mudanya Abdurrahman Wahid adalah sosok seorang yang rajin belajar. Selama tiga tahun Abdurrahman Wahid ini menjadi santri di Pesantren Tegalrejo Magelang.⁵⁶ Semangatnya dalam belajar membuat Abdurrahman Wahid merasa tidak puas kalau hanya menjadi santri di Pesantren Tegalrejo Magelang. Ia masih ingin menambah ilmu dari pesantren lain dan pesantren yang menjadi pilihannya waktu itu adalah pesantren Denanyar, Jombang. Pesantren itu dibawah asuhan kakeknya sendiri yaitu K. H. Bisri Syansuri.⁵⁷ Yang kedua beliau juga menimba ilmu di Yogyakarta dibawah pimpinan KH. ali Ma'shum, Krapyak,

⁵⁵ Ahmad Bahar, *op. cit.*, hlm. 3

⁵⁶ Darmawan, *op. cit.*, hlm. 34

⁵⁷ Darmawan, *op. cit.*, hlm. 34. 35

selanjutnya Abdurrahman Wahid menjadi santri (murid) dari Kyai Wahab Hasbullah di Pesantren Tambak Beras, Jombang pada tahun 1959 sampai tahun 1963.

Selama di Pesantren, Abdurrahman Wahid banyak menghabiskan waktunya dengan menimba ilmu dari para gurunya. Di pagi hari Abdurrahman Wahid mengaji dengan Kyai pengasuh pesantren yang bernama Kyai KH. Fatah, selanjutnya pada siang hari ia mengajar para santri dan slesai mengajar Abdurrahman Wahid kembali lagi untuk menimba ilmu kepada Kyai lain seperti KH. Masduki yang kemudian dilanjutkan mengaji kitab dengan Ustadz sang kakek.

Dengan ketekunan dan kegigihannya dalam menimba ilmu, membuat Abdurrahman Wahid banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan para santri yang lain. Bahkan diusianya yang relatif muda ini, Abdurrahman Wahid telah fasih dalam menggunakan bahasa arab. Hal ini sangat membantunya dalam melanjutkan kuliahnya di Mesir.⁵⁸

Perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid sebenarnya sangat menarik untuk dikaji. Kemauan dan semangatnya di dunia pendidikan sungguh luar biasa. Bila dilihat hampir setiap waktu beliau gunakan untuk belajar dan menambah ilmu. Jadi tidak mengherankan apabila Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh intelektual yang memiliki ide-ide yang sangat cemerlang. Ini berkat pendidikan yang selama ini beliau jalani. Adapun hasil yang diperoleh oleh Abdurrahman Wahid adalah karier beliau menjadi semakin nampak.

Abdurrahman Wahid mulai merintis kariernya yang pertama di Jombang yaitu sebagai tenaga pengajar. Untuk langkah selanjutnya Abdurrahman Wahid ini

⁵⁸ Darmawan, *ibid.*, hlm. 35

mulai terjun diberbagai bidang antara lain sebagai guru Madrasah Muallimat di Tambak beras tepatnya di Jombang pada tahun 1959-1963, beliau juga sebagai Dosen dan Dekan Fakultas Ushuludin Universitas Hasyim As'ari, Jombang pada tahun 1972 sampai 1974. Jabatan lain yang pernah dijalani oleh Abdurrahman Wahid adalah sebagai sekretaris Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang selama 5 tahun (1974-1979), sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ciganjur di Jakarta Selatan pada tahun 1979, sebagai konsultan diberbagai lembaga dan departemen, ketua DPH Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1983-1985, Presiden World Conference Of Religion and Peace, ketua umum PBNU dari tahun 1984 sampai tahun 1999.⁵⁹

Di sisi lain Abdurrahman Wahid juga memperoleh beberapa penghargaan Magsaysay dari pemerintah Filipina atas usahanya dalam membangun hubungan antar agama di Indonesia pada tahun 1993, penghargaan kedua beliau peroleh dari pemerintah Mesir pada tahun 1991 yaitu penghargaan Dakwah.

Demikianlah perjalanan hidup Abdurrahman Wahid melalui pendidikan sampai kariernya yang beliau jalani sampai sekarang. Hal itu membuat tokoh yang bernama Abdurrahman Wahid menjadi terkenal dan tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia dan dunia.

A.2.Paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid

Politik merupakan puncak karier dari Abdurrahman Wahid. Karier politik Abdurrahman wahid mulai dirintis sekitar tahun 1980 yaitu ketika beliau banyak

⁵⁹ Darmawan, *ibidi.*, hlm. 36

bersinggungan dengan gagasan-gagasan atau ide-ide pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, agama, pribumisasi Islam, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Banyak sekali ide dan gagasan Abdurrahman Wahid dinilai sebagai manuver politik yang mengejutkan banyak pihak khususnya pemerintah, dan sejak itu Abdurrahman Wahid dipandang sebagai tokoh yang tidak lepas dari pemerintah.⁶⁰

Sebagai politikus, Abdurrahman Wahid ini dikenal sebagai sosok yang demokrat yang memilikiorientasi pemikiran yang tidak sempit. Visi hidupnya adalah untuk seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok apalagi kepentingan individu. Dihadapan masyarakat, Abdurrahman Wahid ini mempunyai karakteristik yang sangat luwes terutama dalam menjalin hubungan dengan sesama, dengan demikian figure Abdurrahman wahid bagi rakyat tidak perlu diragukan karena bagi masyarakat yang terdiri dari aneka macam kelompok dan etnis. Mereka menganggap Abdurrahman Wahid adalah orang yang terbaik.⁶¹

Abdurrahman Wahid disini termasuk tokoh intelektual yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berwawasan kedepan. Cara pandang Abdurrahman Wahid dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di Indonesia dapat dikatakan selalu memiliki nuansa khas dan spesifik. Hal ini dapat memberikan suatu petunjuk bahwa Abdurrahman Wahid memiliki cara pandang tersendiri, memiliki visi juga memiliki jawaban tersendiri atas segala problem yang ada. Meskipun dari kecil beliau dibesarkan di pesantren yang sangat kental dengan didikan ilmu-ilmu klasik, namun Abdurrahman Wahid mampu berfikir secara modern. Hal ini membuat

⁶⁰ Ahmad Bahar, *op. cit.*, hlm. 36

⁶¹ Darmawan, *op. cit.*, hlm. 11

Abdurrahman Wahid dikategorikan sebagai tokoh cendekiawan yang memiliki ide-ide yang sangat cemerlang.⁶²

Dalam membangun pemikirannya, Abdurrahman Wahid mengawali pemikirannya dengan paradigma atau menggunakan metode dan metodologi khazanah Intelektual Sunni Klasik yang dirumuskan dalam beberapa kitab fiqh dengan harapan pemikiran yang dilahirkan bukan saja mapan secara metodologis, melainkan lebih responsive terhadap persoalan aktual karena sifatnya yang adaptif dan elektik.⁶³

Kuatnya pengaruh khazanah intelektual Sunni tradisional dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, pada akhirnya melahirkan corak pemikiran yang oleh Greg Balton disebut sebagai liberal, progresif dan inklusif.⁶⁴

Adapun paradigma pemikiran dari Abdurrahman Wahid yang eksklusif itu adalah bahwa politik kebudayaan bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai atau tradisi lama yang masih relevan dan mengadopsi nilai-nilai atau tradisi baru yang masih relevan. Relevansi nilai atau tradisi itu sendiri diukur berdasarkan pertimbangan keselamatan manusia dan prinsip-prinsip dasar kesejahteraan umat-umat yang dirumuskan dan difungsionalisasikan secara luas.⁶⁵

A.3. Abdurrahman Wahid Sebagai Kalangan Islamis yang Nasionalis

Abdurrahman Wahid adalah seseorang yang dianggap sebagai Kyai sekaligus politikus. Bila dilihat dari latarbelakangnya, Abdurrahman Wahid adalah seseorang yang hidup dari kalangan pesantren.

⁶² Ahmad Bahar, *ibid.*, hlm. 14

⁶³ Ahmad Bahar, *ibid.*, hlm. 16

⁶⁴ Ahmad Bahr, *ibid.*, hlm. 17

⁶⁵ Ahmad Bahar, *ibid.*, hlm. 18

Sementara itu Abdurrahman Wahid yang aktivitasnya banyak berkecimpung dalam berorganisasi dan kiprahnya dalam kegiatan kemasyarakatan telah memasuki wilayah-wilayah politik, maka tidak mengherankan apabila banyak kalangan menilai bahwa dia adalah seorang Kyai sekaligus politikus.

Bagi Abdurrahman Wahid berpolitik itu diperbolehkan dengan syarat berpolitik untuk kepentingan pengabdian bukan untuk kepentingan perebutan kursi. Abdurrahman Wahid juga memberi pandangan bahwa Kyai adalah manusia jadi kyai juga memiliki keinginan berpolitik.

Politik menurut Abdurrahman Wahid adalah politik yang lebih berorientasi pada pengabdian. Dalam politiknya Abdurrahman Wahid berusaha memperjuangkan kebebasan berbicara, berserikat dan berpendapat. Jadi tidak mengherankan bahwa gagasan-gagasan beliau lebih bersinggungan pada ide-ide pluralisme, demokrasi, Hak Asasi Manusia, agama, pribumisasi Islam dan kebebasan berpendapat.

Sebagai benang merah dari konsep politik Abdurrahman Wahid adalah Islam dan politik saling berkaitan, artinya Islam tidak akan pernah terlepas dari politik. Politik dalam Islam haruslah transparatif. Islam harus mampu melakukan differensiasi. Islam harus mampu mengubah masyarakat. Risalah Nabi muhamad merupakan risalah transformatif dan emansipatif. Menurut Abdurrahman Wahid politik sangat penting, terutama dalam kontak pemberdayaan suatu masyarakat. Yang dimaksud penting adalah memberi peluang kepada masyarakat untuk mengatakan pendapat dan pikirannya secara jujur.

B. Latar belakang Abdurrahman Wahid terpilih Menjadi Presiden RI pada Tahun 1999-2001

B.1. Situasi Politik Indonesia Pasca Pemilu 1999

Memasuki periode transisi pasca Orde Baru, bangsa Indonesia tampaknya masih menghadapi tantangan besar, karena masih lekatnya ketidakpastian ekonomi dan politik sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan dan belum adanya kejelasan mengenai arah reformasi di masa yang akan datang. Berbagai kendala proses transisi masih terasa di berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam perilaku politik yang tidak produktif, belum mampunya UUD 1945 menjawab realitas struktur politik multipartai dalam kerangka “Republik”.

Pemilihan umum 1999 mencerminkan perlawanan terbuka dari mayoritas pemilih terhadap *status quo* atau kehendak kuat dari rakyat yang mayoritas menghendaki adanya suatu perubahan. Perolehan Golkar sebagai perlambang kekuatan *status quo* yang pada pemilu 1997 mencapai lebih dari 70% mengalami penurunan menjadi 26% pada pemilu tahun 1999. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1999 rakyat Indonesia mulai ikut berpartisipasi dalam menyongsong pemilihan umum. Untuk itu dapat dikatakan bahwa rakyat Indonesia sudah memiliki kematangan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Partisipasi politik yang cukup tinggi dan konstruktif ini dipadukan dengan orientasi pilihan mereka. Hal ini mencerminkan terjadinya gerakan sosial menuju paradigma baru sebagaimana telah terjadi di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju.

Hal tersebut memberi dampak kuatnya ikatan-ikatan primodialisme sebagaimana terlihat dari tema-tema agama, kedaerahan dan tokoh-tokoh kharismatik yang dianggap sebagai ujung tombak perolehan suara bagi mayoritas partai besar.

Seandainya para elit politik mampu memanfaatkan kharismanya untuk memadukan antara rasionalitas dan ikatan-ikatan primordial para pemilihnya, maka kita bisa mengharapkan proses transisi dari rezim otoriter ke rezim yang lebih demokratik berlangsung dengan mulus. Sebagai contoh kemenangan PDI-Perjuangan dalam pemilu tahun 1999 memberikan persoalan baru. hal ini disebabkan adanya beberapa argumen yang menyatakan bahwa ketua umum Megawati tidak secara otomatis menjadi partai yang memerintah dan menjadi kepala negara (presiden). Alasan dari permasalahan di atas adalah :

- Kemenangan yang diperoleh Megawati tidak mencapai *single party*. Waktu itu PDI-Perjuangan mendapatkan kursi 153, padahal untuk menjadi presiden beliau harus mengumpulkan suara 351 jadi Megawati masih kurang 198 suara.
- Sistem kepartaian dan pemilihan presiden yang berlaku di Indonesia saat ini belum memberikan jaminan ke arah itu.
- Sistem kepartaian Indonesia yang menganut *ruling party* justru lebih dikatakan partai-partai adalah milik pemerintah, jadi perolehan kursi tidak secara otomatis menjadikan PDI Perjuangan menjadi partai yang memerintah.
- Isu gender, SARA khususnya agama, kesukuan, latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan pengalaman menjadi presiden sangat diperhitungkan.
- Adanya pendapat bahwa Megawati adalah sosok orang yang cenderung banyak diam atau tidak banyak bicara.

Namun pada kenyataannya tidak demikian, para elit politik dewasa ini belum menunjukkan perilaku yang matang. Dalam menanggapi paradigma baru, mayoritas

mereka menggunakan pendekatan lama. Pemilu multipartai yang tidak menghasilkan pemenang, mayoritas membawa konsekuensi akan pentingnya negosiasi dan kompromi. Pendekatan yang mereka lakukan lebih bersifat personal dan emosional, padahal yang dituntut adalah yang bersifat institusional dan rasional.

Salah satu situasi politik yang paling menonjol pasca pemilu 1999 adalah ketidakberdayaan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensiil untuk menjawab realitas politik baru yang bercirikan multipartai tanpa ada yang memiliki posisi mayoritas. Dampak dari ini adalah pada pemilihan presiden dan pembentukan kabinet yaitu pada pembagian kekuasaan bisa berlangsung mulus, ini mengingat penentuan kunci (presiden, MPR, Ketua DPR serta anggota-anggota kabinet) tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua apakah keberadaan menteri-menteri pada kabinet "aliansi" atau "koalisi" lebih mewakili pribadi atau partai.

Kedua kemungkinan dapat di atas cenderung membuat pemerintahan tidak stabil atau rentan terhadap perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar. Hal ini mengingat bahwa di masa mendatang MPR akan lebih ketat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah lewat Sidang MPR yang telah ditetapkan setiap tahun sekali. Di dalam sistem presidensiil, kejatuhan pemerintah akan memiliki konsekuensi yang lebih pelik daripada di dalam sistem parlementer.

Dalam hal ini makin dipandang penting terbentuknya konsensus atas sejumlah persoalan sehingga bisa meminimalisasikan resiko pergantian pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek selama perbedaan-perbedaan yang tidak substansial. Seiring dengan dituntut pula perubahan-perubahan pada konstitusi demi mengharmoniskan sistem hukum dan ketatanegaraan, karena yang ada dan berlaku dewasa ini sudah tidak memadai lagi untuk menjawab realitas baru

B.2. Pemerintahan B.J. Habibie yang Dirundung Masalah

Munculnya nama Abdurrahman Wahid dalam bursa calon presiden berawal dari situasi ketiadaan figur pemimpin ideal yang bisa diterima oleh sekelompok masyarakat. Saat itu, kekuatan politik terpolarasi menjadi dua kubu yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Megawati Soekarnoputri, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kurang *akseptabel* bagi keseluruhan masyarakat. Ini tampak dari serangkaian penolakan yang mengkristal menjelang dan selama Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 1999. B. J. Habibie pada awalnya cukup kuat, akan tetapi memasuki bulan Agustus 1999 ada dua kejadian yang menghancurkan kariernya. Kejadian penting itu adalah kemenangan kelompok pro-kemerdekaan dalam jejak pendapat di Timor Timur, terkuaknya skandal Bank Bali dan masalah lain yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Habibie seperti KKN dan penanganan akan hak asasi manusia.⁶⁶

Mengenai masalah Timor Timur, B. J. Habibie menyatakan “Meningat masyarakat Timor Timur sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati jejak pendapat itu, karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa kita harus menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada Majelis yang terhormat berkenan membahas jejak pendapat tersebut dan berkenan pula menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan

⁶⁶ Darmawan, *ibid.*, hlm. 10

secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. ”

Selanjutnya Habibie menyatakan “sesuai ketentuan pasal 6 persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mensahkan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat dan damai. Jika ini kita laksanakan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁶⁷

Pernyataan Habibie tersebut diperkuat oleh Interuksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1999 tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di daerah propinsi Timor Timur. Adapun isi dari Undang-undang itu adalah :⁶⁸

- a. Bahwa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal yang disaksikan oleh sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Mei 1999 di New York dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa nomor 1264 tahun 1999, yang menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan di daerah propinsi Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dilaksanakan secara damai dan tertib.
- b. Bahwa dalam keadaan ketertiban dan keamanan di daerah propinsi Timor Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer, telah memungkinkan dilaksanakannya pemulihan kehidupan masyarakat.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk lebih mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah propinsi Timor Timur

⁶⁷ Arief Mudatsir, *op. cit.*, hlm. 118

dipandang perlu mengeluarkan Intruksi Presiden tentang pemulihan kehidupan masyarakat di daerah Propinsi Timor Timur.

Kemerdekaan Timor Timur ini dianggap sebagai kesalahan Habibie. Sebab opsi referendum adalah kebijakan Habibie secara personal yang kemudian justru menjadi bumerang bagi perjalanan politiknya. Sementara itu, skandal Bank Bali meruntuhkan kepercayaan internasional. Berlarut-larutnya penanganan skandal Bank Bali ini menyebabkan IMF atau dana moneter Internasional dan Bank Dunia untuk menghentikan aliran pinjamannya bagi Indonesia. Skandal yang ditetapkan itu membuat kurs (nilai mata uang) rupiah Indonesia melemah dari Rp. 6.800,00 per dolar AS menjadi Rp. 8.300,00 per dolar AS.⁶⁹ Skandal bank Bali ini memunculkan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999 tentang Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form oleh Price Waterhouse Coopers tentang Bank Bali. Adapun isi dari UU itu adalah:⁷⁰

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini dan guna terwujudnya transparansi, serta menghindarkan kesimpangsiuran informasi mengenai laporan audit dalam bentuk Long Form oleh Price Waterhouse Coopers tentang Bank Bali, dipandang perlu untuk mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Intruksi Presiden.

⁶⁸ Darmawan, *op. cit.*, hlm. 11

⁶⁹ Darmawan, *op. cit.*, hlm. 10

⁷⁰ *Idem.*

Keputusan B. J. Habibie mengeluarkan memorandum atas Timor Timur, dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara yang mendasarkan diri pada Pancasila yang berasaskan Persatuan dan Kesatuan, dan perlu diingat bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke yang terpisahkan.

Apabila dicermati dan diperhatikan, Timor Timur merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, dan apabila memorandum tersebut terjadi maka Indonesia akan kehilangan salah satu bagian dari bangsanya. Di sisi lain hal tersebut akan memicu perpecahan Indonesia sendiri artinya bila satu pulau dengan mudah dapat memerdekakan dirinya, maka ini dapat memotivasi pulau besar lainnya untuk berusaha memisahkan diri dari Indonesia dan berusaha pula untuk membentuk negara sendiri (merdeka).

Di sisi lain, apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka Indonesia akan dengan mudah dikuasai oleh negara-negara besar dan Indonesia akan dijajah lagi. Jadi langkah yang ditempuh oleh B. J. Habibie dirasa sangat tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dampak yang akan terjadi. Sebagai contoh apabila Timor Timur berhasil merdeka maka pulau besar lainnya seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya akan termotivasi untuk memerdekakan diri dan berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia, padahal seperti yang kita ketahui Aceh merupakan pulau yang memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat kaya terutama minyak dan gas bumi, dan apabila pulau ini berhasil lepas dari Indonesia maka Indonesia akan kehilangan pemasukan di bidang ekonomi termasuk komoditi ekspor Indonesia akan berkurang.

Untuk itu apabila pemerintahan yang dipegang oleh B. J. Habibie ini tetap dilanjutkan, maka akan muncul banyak pertentangan baik dari para politisi maupun

dari kalangan masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan kalau kelak Habibie tetap terpilih menjadi Presiden, maka pemerintahan yang dijalankannya kelak akan merupakan pemerintahan yang berjalan dengan hasil yang tidak maksimal ibarat “sebuah pesawat yang hanya memiliki kokpit, dan tidak jelas mana sayapnya dan mana rodanya“. Ada tiga hal serius yang akan dialami oleh Habibie apabila beliau tetap mempertahankan jabatannya itu. Hal yang dianggap serius itu diantaranya :⁷¹

- a. Habibie tidak akan mempunyai sebuah lembaga Legislatif yang mendukung dengan kukuh. Sebagian besar kursi berada ditangan PDI-P, sebagian lagi ditangan Golkar juga PPP yang tidak akan selalu dapat diandalkan.
- b. Setelah keputusannya tentang masalah Timor Timur, beliau tidak dengan sendirinya dapat mengharapkan dukungan kekuatan dari TNI, baik dari dalam maupun dari luar parlemen.
- c. Dengan terjadinya Skandal Bank Bali, pemerintahan yang dijalankannya akan dirundung stigma yang tidak mudah untuk dihapus, juga dimata Lembaga Keuangan internasional, pawsar mata uang asing dan bursa modal global.

Ancaman lain yang akan menolak pencalonan B. J. Habibie menjadi presiden Republik Indonesia adalah langkah PDI-P untuk bekerjasama (akur) dengan TNI. Sebagai contoh Utusan Daerah dari Jakarta yang merupakan pihak TNI didukung oleh PDI-P untuk menjadi ketua DPRD, tidak mencalonkan siapapun menjadi Utusan Daerah. Hal ini akan memberi tambahan buat kursi PDI-P di MPR.

Meskipun demikian, pemerintahan yang dijalankan oleh B. J. Habibie juga mendatangkan sendi-sendi positif yang mencerminkan demokrasi (kebebasan

⁷¹ _____, *Mari Kita Sayangi Habibie*, 1999, . Jakarta;PT. Temprint, Tempo Edisi 27 Sept-30kt 1999. hlm. 15

berpendapat), apabila ini dilanjutkan dapat memberikan nilai-nilai yang negatif bagi bangsa Indonesia karena mayoritas rakyat Indonesia akan memanfaatkan demokrasi tersebut dalam rangka untuk memenuhi ambisinya. Akan tetapi bila demokrasi tersebut ada yang mengikat seperti hukum atau UUD maka hasil yang akan diterima akan cukup baik dan maksimal. Sebagai contohnya :

1. Dibawah pemerintahan B. J. Habibie para tahanan politik bebas mengeluarkan pendapat
2. Di masa pemerintahan B. J. Habibie ada kebebasan untuk mendirikan partai politik.
3. Di masa pemerintahan B. J. Habibie ada keberanian dari dirinya untuk meninjau kembali politik Indonesia terhadap Timor Timur. Referendum yang baru itu memang tergesa-gesa disiapkan, dan tidak cukup berkonsultasi ke kanan dan ke kiri, yang berakibat kondisi Indonesia semakin memburuk.

Tetapi ide tersebut memungkinkan rakyat Timor Leste bersuara bebas (bebas berpendapat) dan memilih untuk merdeka, ini merupakan salah satu keberanian yang dimiliki oleh B. J. Habibie yang patut dipuji.

Hal inilah yang menjadi faktor pendorong B. J. Habibie tidak boleh mencalonkan diri lagi menjadi Presiden Republik Indonesia dan yang paling mengesankan B. J. Habibie harus berhenti dari jabatannya menjadi presiden. Hal ini pulalah yang mendorong Abdurrahman Wahid ditetapkan menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-4.

Tahun 1999 adalah tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun ini bangsa Indonesia memulai proses demokrasi dalam rangka reformasi. Pada tahun itu pula bangsa Indonesia sedang dalam proses pemilihan presiden dan wakil

presiden. Tiga calon yang bersaing ketat adalah B. J. Habibie wakil dari golongan Karya (GOLKAR), Abdurrahman Wahid wakil dari poros tengah, Megawati Soekarnoputri wakil dari PDI-P. Namun dari tiga calon yang sama-sama kuat tersebut yang berhasil menduduki kursi kepresidenan adalah K. H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman Wahid dengan perolehan suara 373, Megawati Soekarnoputri dari fraksi PDI-P mendapatkan suara 313 dengan Abdurrahman Wahid selisih 60 suara.

B. 3. Jalannya Politik Sidang Istimewa MPR

Situasi politik nasional selama lima bulan yaitu pada bulan Februari-Juni 1999 belum begitu banyak mengalami perubahan. Keadaan tetap serba sulit dan tidak ada kepastian akan hukum, begitu pula kebijakan-kebijakan pemerintah yang berakhir dengan ketidakpastian.

Kegiatan politik dalam rangka SU MPR sudah mulai terfokus sejak bulan Februari tahun 1999. Di samping UU politik yang melandasi dan memberi pedoman, pelaksanaan pemilu telah disahkan dan ditetapkan. Partai-partai mulai melakukan konsolidasi secara intensif. Demikian pula pemerintah, meskipun perannya tidak terlalu menonjol akan tetapi bersama dengan masyarakat, mereka mulai memposisikan diri sesuai dengan kedudukan dan kepentingan.

Sesuai tuntutan reformasi untuk meningkatkan proses demokrasi, pada tanggal 1 Februari 1999 disahkan tiga Undang-Undang bidang politik yang menjadi dasar dan pedoman pemilihan umum. Tiga Undang-Undang itu terdiri dari :⁷²

⁷² M.Sudibjo, *Pemilu Pertama Pasca Soeharto.1999*, Analisis CSIS:Centre for Strategic and International, hlm.204

- 1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- 2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU ini menggantikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum yang beberapa kali telah diubah.
- 3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU ini menggantikan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang telah beberapa kali telah diubah.

Untuk pemilu tahun 1999 partai-partai politik peserta pemilu sudah mulai mempersiapkan calon-calon presiden. Mereka pada umumnya sudah siap terhadap calon-calon masing-masing. Bahkan jauh-jauh hari beberapa partai politik telah menawarkan calon presiden, meskipun kepastian pencalonan masih menunggu sesuai pemilu.

Rakyat diberi waktu untuk menilai calon-calon yang diajukan oleh partai-partai, karena begitu banyak calon-calon presiden yang muncul dalam pemilu 1999. Meskipun demikian pemilu tahun 1999 ini masih didominasi oleh lima partai besar yaitu PDI-Perjuangan, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Calon-calon dari partai besar itu antara lain :⁷³

- 1) B. J. Habibie
- 2) Sri Sultan Hamengkubuwono X
- 3) Abdurrahman Wahid (Abdurrahman Wahid)
- 4) Amien Rais
- 5) Megawati Soekarnoputri

⁷³Idem.

Kegiatan lain menjelang Sidang Umum MPR adalah para calon presiden melakukan debat pendapat capres yang disiarkan di beberapa stasiun televisi. Tujuan dari debat pendapat itu adalah agar rakyat tidak terjebak oleh latar belakang historis dan kharisma yang bersangkutan. Dengan demikian meskipun rakyat tidak langsung memilih presidennya, akan tetapi rakyat dapat memilih partai yang memiliki calon presiden yang mempunyai visi dan program-program yang jelas.

Kegiatan terakhir dari para calon presiden adalah melakukan kampanye. Kampanye ini mulai dilakukan pada tanggal 18 Mei-4 Juni 1999. Kampanye itu berlangsung relatif aman dan pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip luber dan jujur. Ada lima partai yang masih mendominasi dalam kampanye 1999. Lima partai itu dikategorikan masih memiliki masa pendukung yang banyak. Lima partai itu adalah PDI-Perjuangan, Golongan Karya, PPP, PAN dan PKB.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan secara proposional yang berdasar pada daftar stelsel, alasannya karena ketimpangan letak geografi dan demografi, luas wilayah Jawa dan luar Jawa, jumlah penduduk serta keberadaan tokoh-tokoh partai yang berpusat di Jawa. Untuk itu sistem proposional berdasarkan daftar stelsel ini dianggap paling sesuai untuk pemilu tahun 1999.

Subyek penyelenggara pemilu tahun 1999 juga mengalami perkembangan, meskipun tanggung jawabnya tetap ditangan presiden. Untuk pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 penyelenggara pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden.

Ketua KPU tidak ditunjuk oleh presiden melainkan dipilih oleh anggota-anggota KPU sendiri, sedang pengawasan pemilu dilakukan oleh badan yang independen yang disebut sebagai panitia pengawas yang keanggotaannya terdiri atas Hakim, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Isi dari UU itu adalah Panitia pengawas pemilihan umum adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggara atau pelaksanaan pemilihan umum guna menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Pelaksanaan pemilu tahun 1999 disamping memiliki prinsip asas *luber* juga memegang prinsip kejujuran dan adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Isi dari UU itu adalah Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Selain diawasi oleh Panitia Pengawas, lembaga-lembaga independen yang tumbuh dalam masyarakat atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan atas jalannya pemilihan umum. Ada sekitar 20 lembaga pemantau baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁷⁴

- Dari dalam negeri misalnya :
 - KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu)

⁷⁴ M.Sudibjo, *ibid.*, hlm.211

- Forum Rektor Yayasan Pembangunan SDM
- Lembaga Bantuan Konsultan Bagi Korban Pemberitaan Pers
- Komite Wartawan Reformasi Indonesia
- Komite Santri Pemantau Pemilu
- Forum Komunikasi Penerus Perjuangan Indonesia
- Yayasan Lembaga Pengkajian Pasifik
- University Network for Free and fair Election (UNFREL)
- Kantor Advokat dan Pengacara Hanafi Tanuwijaya
- Lembaga Sosial Masyarakat Masjid
- Yayasan Tsagafal Islamiyah Ceger
- *Institute for strategic Analysis election Watch for Free and fair Election.*
- Dari luar negeri
 - Carter Centre
 - Frederick Madman Foundation
 - Liasion Agency Inc
 - Embassy of The Republic Arab of Egypt
 - Archibald National Demokrtatic Institute As
 - European Union Eropa
 - Shignoka Eiwa College Japan

Pemilihan Umum tahun 1999 selain untuk memilih anggota DPR dan DPRD juga untuk mengisi keanggotaan MPR.

Inti dari bab II ini adalah, latar belakang Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden RI yang ke 4 yang pertama adalah ia seorang tokoh intelektual yang memiliki pendidikan tinggi dengan pandangan dan pemikiran yang berwawasan kedepan, ia seorang yang memiliki sikap yang demokrat serta humanis dengan visi hidupnya adalah untuk seluruh rakyat bukan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi, selain itu dihadapan masyarakat Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik yang sangat luwes terutama dalam menjalin hubungan dengan sesama meskipun dari kecil ia dibesarkan di pesantren yang kental dengan didikan ilmu-ilmu klasik namun Abdurrahman Wahid mampu berfikir secara modern. Latar belakang ke 2 adalah situasi politik Indonesia pasca pemilu tahun 1999 yang masih ada ikatan-ikatan primodialisme seperti latar belakang pendidikan, agama, suku, gender, tokoh kharismatik yang masih mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu tahun 1999, keinginan beberapa pihak yang mendukung Abdurrahman Wahid diantaranya Amin Rais untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden dengan beberapa pertimbangan diantaranya apabila Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai seorang Kyai dapat menduduki jabatan presiden maka kemungkinan mengubah Indonesia menjadi Islam akan lebih mudah. Latar belakang ke 3 adalah pemerintahan B.J.Habibie yang dirundung masalah misalnya keputusan B.J.Habibie mengeluarkan memorandum atas Timor Timur. Hal ini dianggap salah karena Indonesia adalah Negara yang mendasarkan diri pada Pancasila yang berasaskan Persatuan dan Kesatuan. Latar belakang yang ke 4 adalah partai Abdurrahman Wahid termasuk calon yang kuat dalam pemilu tahun 1999.

BAB III

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ABDURRAHMAN WAHID SELAMA
MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN**

Kebijakan merupakan pemikiran seseorang yang sudah terkait dengan situasi konkrit atau situasi tertentu. Kebijakan dapat diartikan sebagai rencana tindakan seseorang dalam menyelesaikan masalah dan kebijakan juga dapat dikatakan sebagai rencana penyelesaian masalah pada tataran konsep.

A. Kebijakan di Bidang Politik

Salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah bahwa Abdurrahman Wahid ini tidak mempercayai kabinet yang dipimpinnya sendiri. Hal ini menyebabkan muncul isu-isu mengenai *reshuffe* (perubahan susunan) dalam kabinetnya. Dari sini banyak orang mengira bahwa Abdurrahman Wahid akan menata kembali kabinetnya menjadi sesuatu yang dapat beliau percaya, sehingga beliau dapat memperbaiki legitimasi pemerintahannya. Demikian pula tidak seorangpun merasa yakin bahwa Abdurrahman Wahid sesungguhnya dapat mengontrol dan mengkonsolidasi tim dalam kabinetnya. Ini mungkin merupakan konsekuensi dari suatu kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari kalangan partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika ini yang menjadi persoalan, maka muncul pertanyaan siapakah orang-orang yang dipercaya dan didengar oleh Abdurrahman Wahid ?

Sesungguhnya yang paling penting adalah bukan yang memberi informasi kepada Abdurrahman Wahid, akan tetapi bagaimana Abdurrahman Wahid memahami informasi yang ia terima dan menggunakannya. Dalam beberapa hal Abdurrahman Wahid telah salah menafsirkan.

Selain masalah kabinet, Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut masalah disintegrasi bangsa. Kebijakan ini lebih diutamakan kepada rakyat Aceh.

Dalam kasus Aceh (khususnya) Abdurrahman Wahid telah menjanjikan beberapa hal di antaranya :⁷⁵

- a. Pemerintah berjanji akan menentukan sikap atas tuntutan referendum rakyat Aceh.
- b. Meyakinkan masyarakat Aceh tentang penegakkan HAM dengan mengadakan para pelanggarnya secara terbuka.
- c. Melakukan perundingan dengan segenap pihak yang bersangkutan dengan masalah Aceh.

Tiga hal tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah Aceh, Presiden Abdurrahman Wahid menghendaki penyelesaian secara politisi dengan mekanisme perundingan. Selain kebijakan-kebijakan di atas, Abdurrahman Wahid ini juga melakukan aksi global yang dikenal dengan *think locally and act globally* (berfikir secara khusus dan bertindak secara umum). Aksi global ini dipilih oleh Abdurrahman Wahid untuk mempertahankan bangsa (*nation*) dan membangun masyarakat yang madani (*civil society*).

⁷⁵ Arif Zulkifi, *Tegang di Aceh Bertemu di Jakarta*, TEMPO No.40/XXVIII/6-12 Desember 1999, hlm.23



Hal itu dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dengan sadar, ketika saling ketergantungan antar politik dalam dan politik luar negeri mengalami peningkatan dalam era globalisasi sekarang ini. Akan tetapi, sebenarnya hal serupa juga dijalankan oleh Soekarno yang menggunakan semangat antikolonialisme yang dibuktikan dalam Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang bertujuan untuk pembentukan bangsa (*nation building*). Demikian juga dengan Soeharto yang mendasarkan pada Shah Iran dan Marcos yang menggunakan ancaman perang dingin. Di mana pedoman itu merupakan bahaya bagi komunisme. Hal ini Soeharto lakukan untuk memperkuat posisi pemerintahannya (*state buliding*). Bahkan upaya membangun kekuasaan kepresidenan secara formal ataupun informal.

Tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid tersebut menunjukkan upaya dari Abdurrahman Wahid dalam mempertahankan *nation integration* (integrasi bangsa) dengan cara mencegah peran opini publik dunia dalam kasus Aceh ataupun potensi disintegrasi daerah-daerah di Indonesia. aksi ataupun tindakan itu secara awam memang kurang dipahami, bahkan dicemooh banyak orang, karena ketika negeri dalam keadaan darurat, Abdurrahman Wahid justru “jalan-jalan” ke luar negeri. Namun, dalam sejarah disintegrasi bangsa, seperti dianalisis oleh D. L. Horowitz (1985) dijelaskan bahwa disintegrasi (separatisme) lebih disebabkan karena adanya faktor dalam negeri dan kemenangan pusat atau daerah lebih ditentukan oleh negara-negara luar. Separatisme bukanlah hanya konflik antara pusat dan daerah, akan tetapi juga melibatkan negara-negara lain. Aliansi pusat ataupun

daerah dengan negara-negara luar dalam bidang militer, politik dan ekonomi menentukan kemenangan konflik separatisme.⁷⁶

Kekuatan global yang dilancarkan oleh Abdurrahman Wahid untuk membangun masyarakat madani (*civil society*) dan mengoreksi posisi TNI dengan mengeluarkan isu kudeta dari sebagian fraksi TNI. Pernyataan ini mengundang banyak perhatian terutama dari negara-negara besar dan donor Indonesia yang mengancam akan mengambil tindakan terhadap upaya tersebut.

Hal ini menunjukkan keadaan yang unik, sebab biasanya pemimpin negaralah yang sering diancam isu kudeta bukan presiden yang membuat isu kudeta kepada mereka yang berpotensi melakukan kudeta.

Di samping itu *Think Globally and act globally* juga dilakukan Abdurrahman Wahid dalam era globalisasi pasca perang dingin. Dalam era globalisasi ini, Abdurrahman Wahid menganut dua peradaban yaitu peradaban Yunani kuning dan putih. Yang dimaksud peradaban putih atau kristen adalah negara-negara Eropa-Amerika sedang yang dimaksud peradaban kuning atau konfusius adalah negara Cina, Jepang dan Asia Timur. Sedang untuk Indonesia sebenarnya berada dalam daerah peradaban kuning, apalagi terdapat rencana manila (1999) untuk membuat masyarakat Asia Timur yang terdiri dari ASEAN ditambah dengan Cina, Jepang dan Korea.

Posisi Indonesia seperti mendayung di antara dua karang. Pada zaman kemerdekaan, Indonesia menghadapi dilema antara komunis dan kapitalis. Upaya netral sebagai pihak ketiga dengan mencoba membuat *conefo* sepertinya tidak membuahkan hasil dan Indonesia dianggap lebih dekat dengan kubu "Komunisme

⁷⁶ Iwan Gardono Sudjatmiko, *ibid.*, hlm. 13

Asia” dengan adanya poros Jakarta-Peking-Pnom Penh dan Pyong Yang. Untuk itu dalam era globalisasi ini Abdurrahman Wahid lebih memilih tidak akan menghindari kedua karang itu yakni peradaban putih dan kuning, sebaliknya justru mencoba merangkul keduanya.

Adapun alasan-alasan dari Abdurrahman Wahid melakukan tindakan itu adalah :⁷⁷

- a. Kedekatan dengan peradaban kuning dilakukannya dalam angka bersifat politik dan ekonomi terutama dalam hal modal dari *overseas chinese*. artinya dengan membuat poros Jakarta-Beijing diharapkan asia Timur dan Indonesia dapat kompak untuk menjalin kerjasama.
- b. Sedang kutub putih Abdurrahman Wahid menghendaki modal dari mereka, termasuk Israel yang menjadi berita kontroversial.

Selain itu Abdurrahman Wahid juga mendekati kutub lain diluar peradaban kuning dan putih yaitu kutub budaya seperti di India. salah satu alasan Abdurrahman Wahid mendekati budaya di India karena kebudayaan India itu merupakan salah satu sumber kebudayaan kita, dan negara-negara muslim di Timur Tengah dengan nilai Islamnya yang diluar kebudayaan Indonesia masa kini.

Dengan melihat dinamika global, kita dapat lebih memahami mengapa Abdurrahman Wahid seperti memaksakan diri dan sering “jalan-jalan” ke luar negeri. Sebab lingkungan global mempunyai energi yang besar dalam membantu Indonesia. Sememntara itu, Abdurrahman Wahid dianggap besar. Hal ini tercermin dari *track record-nya* (profesi pendidikan) di dalam negeri sebab aktivis demokrasi dan hak asasi manusia serta aktivis muslim pluraris dalam forum-forum NGO

⁷⁷ *Idem.*

Internasional. Sampai saat ini Abdurrahman Wahid tampaknya cukup mensinergikan energinya dengan energi global untuk memepertahankan bangsa (*nation*) dan mengembangkan *civil society* (masyarakat madani) di Indonesia.

Dari sekian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam rangka membangun Indonesia yang madani pada dasarnya mengalami kegagalan-kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid terlalu kontroversi (berlawanan). Seperti halnya pemecatan beberapa kabinet karena dianggap terlibat korupsi (KKN). Tindakan Abdurrahman Wahid ini bisa dianggap tidak *fair*. Bila dilihat, mengapa penyelidikan korupsi (KKN) dilakukan pada saat orang telah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan (menteri). Padahal bila pencopotan beberapa menteri terjadi kinerja dari pangkal pemerintahan akan tidak maksimal, selain itu kredibilitas Abdurrahman Wahid sebagai presiden akan mengalami penurunan.

B. Kebijakan di Bidang Ekonomi

Adapun kebijakan ekonomi Abdurrahman Wahid antara lain adalah dikeluarkannya rancangan anggaran tahun 2000 periode 1 April-31 Desember. Rancangan anggaran ini dikeluarkan sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengubah tahun anggaran menjadi tahun kalender yang dimulai pada 1 Januari 2001. Untuk pertama kalinya anggaran disajikan secara transparan khususnya yang berkenaan dengan defisit sumber-sumber pembiayaan, DPR juga tidak hanya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

RAPBN pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya tidak mempunyai daya stimulasi yang besar terhadap ekonomi. Padahal bagi pertumbuhan ekonomi stimulasi fiskal (stimulasi keuangan) akan menjadi sumber penting terutama disaat sektor utama mulai bangkit dan memainkan peran yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi.

Salah satu strategi yang harus dilakukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah dengan memperluas dasar pengenaan pajak (tanpa perlu menaikkan tariff pajak) dan mengubah administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dan menaikkan penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB (Produk Domestik Bruto/pendapatan kotor luar negeri). kebijakan ini sebenarnya telah dituangkan secara jelas dalam LoI (*Leterrs of Intent*) antara pemerintahan Indonesia dengan lembaga IMF.

Usaha lain yang juga harus dilaksanakan dari pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk dapat memulihkan ekonomi adalah penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi lain sebagai contoh inventasi (penanaman modal) yang bersumber dari investor swasta khususnya investor asing. Untuk mencapai sasaran itu pemerintah sebaiknya menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

C. Kebijakan di Bidang Keamanan

Seperti yang diketahui, pemilihan presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati serta pembentukan Kabinet Persatuan Nasional memang dibayangi oleh berbagai masalah yang sangat rumit dan perlu penyelesaian secara

serius. Sementara kondisi Indonesia sedang porak poranda, terutama di bidang keamanan.

Di bidang keamanan Indonesia sedang terancam diintegrasikan bangsa. Disintegrasikan bangsa ini diawali dari tuntutan referendum rakyat Aceh yang menginginkan pemisahan diri dari Indonesia. Alasan Aceh menghendaki adanya referendum adalah karena rakyat Aceh tidak puas terhadap hasil kerja dan kebijakan-kebijakan dari pusat. Mereka menilai bahwa pemerintah selalu mengesampingkan kebutuhan dan perhatiannya rakyat Aceh.

Sementara ketidakpuasan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah ternyata mendorong rakyat dari pulau-pulau lain untuk melakukan hal yang sama meskipun permasalahannya yang berbeda seperti Maluku, Ambon dan Irian. Mereka lebih memperjuangkan hak asasi dan keadilan. di samping itu mereka juga menuntut agar pemerintah lebih cepat menyelesaikan masalah tersebut. Namun hal tersebut tidak segera mendapat penanganan dan penyelesaian secara cepat dari pemerintahan Abdurrahman Wahid, sehingga situasi Indonesia semakin runyam, perang antar saudara antar sukupun sampai terjadi.

Namun demikian, Abdurrahman Wahid tetap mencoba melakukan suatu tindakan. Adapun tindakan atau langkah awal yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam sebulan terakhir adalah menetapkan berbagai keputusan untuk menanggulangi masalah. Untuk menyelesaikan ketidakpuasan daerah khususnya Aceh, Abdurrahman Wahid melakukan beberapa tindakan diantaranya : ⁷⁸

1. Beliau memberikan perintah untuk mengadili pelanggar HAM

⁷⁸ Arif Zulkifi, *Tegang di Aceh Bertemu di Jakarta*, 1999, TEMPO no 40/XXVIII/6-12 Desember 1999.hlm.23

2. Beliau juga menjanjikan bahwa pemerintah akan menentukan sikap atas tuntutan referendum Aceh dalam sebulan kemudian dilanjutkan dengan perundingan selama 6 bulan. Bentuk konkrit dari sikap pemerintah dalam menanggapi referendum itu adalah :
 - a) Meyakinkan rakyat Aceh tentang penegakan HAM dengan mengadili para pelanggarnya secara terbuka
 - b) Melakukan perundingan dengan segenap pihak yang bersangkutan dengan masalah Aceh. Misalnya pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup di rumah Presiden Abdurrahman Wahid yaitu di Ciganjur. Pertemuan ini dihadiri oleh 60 tokoh Aceh diantaranya yang hadir adalah Tokoh Himpunan Dayah Aceh (HUDA), Thaliban, mahasiswa, LSM asal Aceh.

D. Kebijakan di Bidang Sosial

Sejak terpilih sebagai presiden, Abdurrahman Wahid menghadapi masalah yang sangat rumit terutama masalah yang menyangkut sosial yaitu disintegrasi bangsa. Disintegrasi ini sebagai akibat dari konflik yang sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Akibat disintegrasi ini adalah percekcoakan antar masyarakat, agama, budaya dan menelan banyak korban jiwa. Komitmen ini jelas akan dijadikan Sebagai landasan kebijakan sebagai pemimpin bangsa.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Abdurrahman Wahid tidak berbuat banyak. Namun demikian beliau tetap berusaha untuk menyelesaikannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan masalah disintegrasi bangsa adalah dengan melakukan pendekatan

intern yaitu dengan mendekati pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sebagai contoh Presiden mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakyat Aceh dalam usahanya menegosiasi suatu penyelesaian. Prioritas utama Abdurrahman Wahid untuk dapat menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencoba membujuk rakyat Aceh untuk menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya waktu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Bagi Abdurrahman Wahid penyelesaian masalah Aceh ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan Indonesia sudah kehilangan kendali atas Timor Timur. Hal ini memberikan dampak yakni kelambanan dalam penyelesaian masalah-masalah lain seperti masalah di Maluku, Ambon, Irian. Selain itu kelambanan dalam menangani suatu masalah mendorong munculnya kontravensi. Kontravensi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan, pertentangan atau pertikaian. Kontravensi ini ditandai oleh:⁷⁹

1. Gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang.
2. Perasaan (kebencian, keraguan) dapat berkembang terhadap kemungkinan kegunaan, keharusan atau penilaian terhadap suatu usul, buah pikiran, kepercayaan, doktrin atau rencana yang dikemukakan oleh orang perorang atau kelompok.

Bentuk kontravensi menurut Leopold Von Wiese dan Horward Becker ada lima yaitu :⁸⁰

⁷⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1990. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 103

⁸⁰ Soejno Soekanto, *ibid.*, hlm104

1. Yang umum meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan, perbuatan kekerasan dan mengacaukan pihak lain.
2. Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain dimuka umum, memaki-maki melalui surat-surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain.
3. Yang intensif mencakup penghasutan, menyebarkan desas-desus mengecewakan pihak lain.
4. Yang rahasia misalnya mengumumkan rahasia pihak lain
5. Yang taktis misalnya mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain.

Secara sosial masalah-masalah ataupun konflik yang terjadi di tanah air tidak dapat terselesaikan oleh Abdurrahman Wahid, hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak baik. Organisasi-organisasi pemerintahan tidak terealisasi dengan baik, tidak ada spesialisasi dalam pembagian kerja. Sehingga hasil dan kerja dari kabinet atau organ pemerintahan lain tidaklah maksimal.

Selain masalah disintegrasi, kebijakan lain yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam menjalankan pemerintahannya adalah memperhatikan perkembangan pendidikan Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah seorang presiden yang peduli akan perkembangan pendidikan Indonesia. Kepedulian yaitu beliau tunjukan dengan memberi perhatian kepada tenaga pengajar dan lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan swasta dan negeri.

Untuk menghindari persaingan antara swasta dan negeri maka, Abdurrahman Wahid menghapus dikotomi antara swasta dan negeri dengan harapan antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) jangan lagi menjadi saingan bagi sekolah-sekolah swasta.⁸¹

Kebijakan lain adalah beliau ingin dikalangan Perguruan Tinggi menghormati kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran, sebagai contoh, ia pernah mengadakan temu wicara dengan para rektor. Dalam pertemuannya, ia menghimbau kepada para rektor untuk selalu tetap menjunjung tinggi kebebasan berfikir dan kebebasan berpendapat di kampus.⁸²

E. Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, supremasi hukum belum begitu tercermin dengan baik, maka hasil yang dicapai dalam rangka menangani masalah yang melanda Indonesia tidaklah maksimal. Hakim dan petugas pengadilan bersifat korup, sulit menemukan pejabat yang jujur dalam melakukan tugasnya. Secara umum dapat dikatakan membangun kembali sistem peradilan sangatlah diperlukan suatu pemerintahan yang reformis. Sistem hukum merupakan salah satu alasan bagi kegagalan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hal ini disebabkan karena

⁸¹ Gun, *Depdiknas Jangan Jadi Saingan Sekolah Swasta*, 2000, CSIS: Centre for Strategic and International Studies. hlm.6

⁸² _____, *Arah Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, 2000, CSIS: Centre for Strategic and International Studies. hlm.44

pengadilan masih bekerjasama dengan unsur-unsur rezim lama, termasuk anggota DPR yang senior yang sangat ingin menghindari tuntutan hukum.⁸³

Dalam menangani masalah HAM (yang merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia) Abdurrahman Wahid tidak membuahkan suatu perdamaian karena pertumpahan darah dan korban masih berjatuh. Bila dicermati lahirnya pengadilan HAM tidak lain dan tidak bukan adalah membangun kembali supremasi hukum yang tercabik-cabik oleh kekuasaan yang telah menyimpang. Di samping itu salah satu tolok ukur apakah perubahan itu terjadi atau tidak adalah persoalan yang berkaitan dengan HAM.⁸⁴

Masalah hukum dan HAM membuat posisi Abdurrahman Wahid serba sulit. Kabinet yang dibangun sebagai kekuatan utama menggerakkan fungsi pemerintah tidak secara utuh dapat dikembangkan dan hasilnya pun tidak secara maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kebijakan Abdurrahman Wahid dalam rangka mengatasi masalah HAM adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) No.53/2001 tentang pembentukan pengadilan HAM dan memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta untuk mengadili pelanggaran HAM.⁸⁵ Untuk menegakkan HAM, beliau juga mengusulkan tidak diberlakukan TAP MPRS No.XXV/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ajaran marxisme, komunisme.⁸⁶

Alasan lain dihapuskannya TAP MPRS No.XXV/1996 tersebut adalah keinginan Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan hak yang sama dalam hukum

⁸³ Munir, *Gagasan Setelah 100 Hari Pemerintahan Gus Dur*, 2000, CSIS: Centre for Strategic Studies. hlm. 87

⁸⁴ Munir, *ibid.*, hlm. 111

⁸⁵ Kurie, *Situasi Hukum Dewasa Ini*. 2001. CSIS: Centre of Strategic and International Studies. hlm. 21

tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan agama. Pada prinsipnya Abdurrahman Wahid menganggap bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sama-sama ciptaan Tuhan untuk itu setiap manusia harus saling menghargai.

Inti dari bab 3 adalah kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid merupakan rencana atau tindakannya sebagai seorang presiden dalam menyelesaikan suatu masalah. Kebijakan Abdurrahman Wahid dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu bidang politik, Abdurrahman Wahid mulai tidak mempercayai kinerja dari kabinetnya untuk mengatasi masalah itu ia akan mengadakan *reshuffle* kabinet, kebijakan politik yang ke 2 yaitu dalam mengatasi masalah Aceh Abdurrahman Wahid menghendaki penyelesaian secara politisi dengan mekanisme perundingan. Kebijakan di bidang ekonomi yaitu untuk mengatasi krisis ekonomi Abdurrahman Wahid akan mengadakan kerjasama dengan IMF melalui surat kesepakatan bersama yang dikenal dengan sebutan LoI. Secara garis besar isi LoI ini adalah memperluas dasar pengenaan pajak dan mengubah administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto. Kebijakan di bidang keamanan diantaranya Abdurrahman Wahid telah menjanjikan bahwa pemerintahannya akan menentukan sikap atas beberapa masalah yang mengganggu keamanan Indonesia terutama masalah Aceh. Kebijakan di bidang social Abdurrahman Wahid diantaranya ia begitu memperhatikan perkembangan pendidikan Indonesia baik tenaga pengajar ataupun lembaga pendidikannya terutama lembaga pendidikan negeri dan swasta. Kebijakan Hukum dan HAM yaitu memberlakukan hak yang sama dalam hukum tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis dan agama.

⁸⁶ -----, *Gus Dur Pahlawan HAM*, dalam <http://yyeeye.blogspot.com>

BAB IV

PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID

PERIODE TAHUN 1999-2001

A. Kondisi Indonesia

Kondisi Indonesia sebelum pemerintahan Abdurrahman Wahid dapat dikatakan belum stabil. Ketidakstabilan tersebut disebabkan karena perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia masih pada taraf pemulihan. Di bidang politik bisa dilihat bahwa perkembangan politik di tanah air antara tahun 1998 dan tahun 1999 masih diselimuti awan kelabu karena berbagai persoalan tetap menggantung dan selalu diwarnai dengan ketidakpastian, sedang di bidang ekonomi yaitu masih terjadinya krisis ekonomi yang sampai sekarang Indonesia belum bisa mengatasinya.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam skripsi ini merupakan realisasi atau tindak lanjut dari kebijakan-kebijakannya. Pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid dibedakan menjadi beberapa bidang diantaranya :

A. 1. Bidang Politik

Selain masalah ekonomi, keterpurukan Indonesia ini juga dilatarbelakangi oleh masalah politik. Sebagaimana telah diketahui bahwa politik juga memiliki pengaruh yang besar dalam suatu negara. Pokok dari pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah realisasi dari kebijakannya yakni pergantian beberapa menteri dalam kabinetnya.

Alasan Abdurrahman Wahid menggantian dua menteri dalam pemerintahannya adalah kedua menteri tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi. Dua menteri itu adalah Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi.

Penggantian dua menteri tersebut selain menghebohkan berbagai kalangan tapi juga membuat para politisi gusar. Mungkin kurang diperhitungkan bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokrasi presidensiil, sementara kabinet yang dibentuk adalah kabinet koalisi yang juga dikenal sebagai kabinet pelangi. Dengan cetak dasar itu, rupanya sulit membangun sinergi antara Abdurrahman Wahid dan para menterinya dalam kabinetnya. Sebelum melakukan *reshuffle* (perubahan susunan) dalam kabinet, Presiden harus memperhatikan resiko yang akan terjadi, paling tidak Presiden harus memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan itu diantaranya sejauhmana perombakan kabinet akan dilakukan Abdurrahman Wahid dan sejauhmana partai-partai politik yang mendukung kabinet bisa toleran terhadap *reshuffle* (perubahan susunan) tersebut? Tidak kurang penting adalah seberapa besar resiko yang ditimbulkannya baik secara politis dan ekonomis.⁸⁷

Bicara tentang resiko, perlu diingat bahwa Abdurrahman Wahid adalah seorang pemimpin yang muncul di saat Indonesia sedang dilanda krisis. Legitimasi (pengesahannya) menjadi presiden telah melalui proses pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui pemilihan umum, akan tetapi bobot *emergency* (keadaan darurat) itulah yang benar-benar sangat menentukan keterpilihannya, artinya faktor penentu terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden karena kondisi Indonesia yang sedang dilanda krisis. Dan mungkin

⁸⁷-----, *Resiko Menggati Menteri*, 2000, Jakarta: PT Dian Rakyat. No.09/XXIX/1-7 Mei 2000. hlm.17

karena itu Abdurrahman Wahid melakukan hal-hal yang dipandang perlu seperti halnya pencopotan kedua menterinya, atau mengusulkan pencabutan Tap MPR No. XXV tahun 1966.⁸⁸

Pencabutan Tap MPR No. XXV tahun 1966 memunculkan beberapa reaksi. Reaksi dari pencabutan Tap MPR tersebut adalah “tersengatnya” PDI Perjuangan dan partai Golkar serta adanya penilaian dari pasar yang menyatakan bahwa tindakan dari Abdurrahman Wahid tidak tepat. Resikonyapun jadi sulit untuk ditanggulangi. Di sisi lain karena ekonomi juga belum pulih. Resiko itu memberi dampak di segala bidang kehidupan dan bahkan nasib bangsa seperti ikut dipertaruhkan. Tantangan yang harus dihadapi oleh Abdurrahman Wahid adalah meningkatkan sinergi dalam kabinetnya. Untuk itu kesibukkan sebagai kepala negara perlu dikurangi sehingga beliau dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas beliau selaku kepala pemerintahan.⁸⁹

Di samping masalah kabinet, Abdurrahman Wahid juga berhasil mengatasi ketegangan politik dalam penanganan masalah Timor Timur. Ketegangan politik Timor Timur berhasil beliau atasi dengan mengadakan pertemuan antara Abdurrahman Wahid, Wiranto dan KPP di Timor Timur yang hasilnya telah diumumkan pada tanggal 31 Januari 2000. Abdurrahman Wahid akhirnya memberhentikan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan menunjuk Menteri Dalam Negeri yaitu Surjadi Sudirdja sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Langkah tegas ini telah menunjukkan kekuatan pengaruh Abdurrahman Wahid di jajaran militer, dan

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Idem.*

secara umum, komitmen tegas Abdurrahman Wahid untuk memperbaiki demokrasi berdasarkan supremasi sipil. Tindakan Abdurrahman Wahid ini mendapat dukungan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu Panglima TNI dan staff Angkatan Darat juga mendukung keputusan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid dan Panglima TNI serta staff Angkatan Darat berjanji untuk tetap mempertahankannya, ini berarti bahwa mereka tidak akan mentolerir aksi apapun dari kelompok Wiranto yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri. Terlebih lagi, baik wakil menteri luar negeri Amerika Serikat untuk kawasan pasifik, Stanley Roth maupun Sekjen PBB yaitu Kofi Annan juga secara tegas mendukung tindakan Abdurrahman Wahid untuk menegakkan keadilan di Indonesia dan setuju untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar menunda pelaksanaan pengadilan Internasional.

Tindakan tegas yang diambil Abdurrahman Wahid ini didasarkan atas rekomendasi KPP HAM yang menyatakan bahwa 32 orang harus diinterogasi oleh Jaksa Agung untuk menentukan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia pasca jejak pendapat di Timor Timur pada tanggal 4 September 1999. Dalam Laporan KPP HAM tersebut Jenderal Wiranto merupakan pejabat senior tertinggi yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Bila dicermati tindakan Abdurrahman Wahid ini dapat dinilai positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai Presiden, beliau telah bertindak tegas untuk menginterogasi orang yang dianggap membahayakan bangsanya. Sedang negatifnya adalah apakah Presiden telah membaca laporan KPP HAM secara cermat dan teliti? Bila ini terjadi, maka pemerintahan yang dijalankan oleh

Abdurrahman Wahid dinilai tidak *fair*. Sebagai seorang kepala negara (presiden) Abdurrahman Wahid sebaiknya bersikap bijak artinya selain beliau mendengarkan pendapat dari kalangan masyarakat, tokoh masyarakat dan elit politik lainnya, beliau juga harus mendengarkan penjelasan dari Wiranto. Apalagi notabene Jenderal Wiranto saat itu adalah anak buah dari Abdurrahman Wahid dalam kabinetnya. Sikap Abdurrahman Wahid yang tidak terbuka ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia ini aman dan damai.

Sedang konflik di beberapa daerah terutama Aceh dan Maluku sudah mereda, dan hingga taraf tertentu keamanan telah dapat dipulihkan. Dalam kasus Aceh, setelah sukses diplomasi internasional Abdurrahman Wahid untuk menahan dukungan internasional terhadap separatis Aceh Merdeka, kaum separatis ini hanya sesekali saja melakukan serangan terhadap pasukan ataupun instalansi militer. Mereka jarang melakukan kotak senjata langsung dengan militer, akan tetapi mengubah taktik mereka dengan perang gerilya. Untuk Maluku, konflik tidak lagi terjadi dalam area luas dan tidak ada lagi pertikaian antar agama, tetapi cenderung menjadi konflik antara penduduk asli dan masyarakat pendatang. secara umum situasi Maluku dan Aceh telah membaik.

A. 2. Bidang Ekonomi

Keterpurukan Bangsa Indonesia ini terasa memprihatinkan terutama pada kinerja pemerintahan B. J. Habibie yang banyak menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memberikan dampak negatif bagi perjalanan hidup bangsa

Indonesia. Selain itu, terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang benar-benar terasa dampaknya. Dunia usaha mengalami kegoncangan yang memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia terutama pada dunia kerja. Ketidakstabilan ekonomi Indonesia ini memberikan dampak negatif bagi perkembangan dunia usaha terutama dunia kerja. Ketidakstabilan ekonomi Indonesia ini membuat dunia usaha terutama perusahaan-perusahaan melakukan PHK bagi sebagian karyawan-karyawannya sehingga tidak mengherankan apabila krisis ekonomi ini memunculkan banyak pengangguran dan PHKpun merebak di mana-mana. Dampak lain dari krisis ini adalah penanam modal mulai enggan menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Krisis ekonomi ini bagi bangsa Indonesia seperti mimpi buruk. Selain krisis yang terjadi saat ini, tampaknya krisis ini juga sulit untuk dipahami bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, Indonesia telah mengalami krisis. Lembaga keuangan, barang-barang modal mendekati kehancuran, keterpurukan nilai rupiah serta terjadinya stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang lebih buruk lagi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia ini telah meruntuhkan kinerja ekonomi makro dalam negeri yang dibuktikan dengan terjadinya stagnasi di bidang industri, manufaktur dan kurangnya lapangan pekerjaan di sektor non industri serta munculnya keresahan sosial di mana-mana sebagai akibat dari kelangkaan sembako (bahan-bahan kebutuhan pokok).⁹⁰

⁹⁰ Edi Cahyono, *Indonesia Demokratisasi di Era Globalisasi*. 1999. Jakarta: Internasional Neo Forum On Indonesia Development. hlm. 32

Di tengah lingkungan perekonomian dunia yang terus berubah, dengan intensitasnya yang semakin tinggi, Indonesia termasuk negara yang mengalami terpaan badai ekonomi yang takterperikan dan telah mencapai keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan hingga kini belum kunjung menunjukkan pemulihan yang berarti. Hal ini dapat dikatakan usaha dari rakyat Indonesia pada umumnya dan elit politik pada khususnya sangat kurang, sehingga hasil yang dicapai juga tidak maksimal. Hal tersebut memberikan beberapa faktor diantaranya :⁹¹

- a. Kredibilitas pemerintahan telah sampai pada titik rendah. Penyebab utamanya adalah karena langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menanggapi krisis selama ini bersifat tambal sulam dan cenderung mengambil jalan berputar-putar. Ketidakpastian komitmen dari para pejabat tinggi di pemerintahan juga tidak dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dengan sering berubahnya beberapa kebijakan pemerintahan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kecenderungan demikian tampaknya terjadi karena pemerintah sendiri belum mau menyadari secara jujur atau pemerintah sendiri sengaja menutupi sumber utama penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
- b. Perjalanan panjang rezim Soeharto yang selalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan telah menghasilkan *crony capitalism* (kelompok kapitalisme) yang justru membuat struktur perekonomian sangat rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal. Industri manufaktur sangat bergantung pada bahan baku impor dan tidak memiliki daya saing yang kuat. Sementara itu sektor pertanian tidak kunjung *mature* (matang atau siap) sebagai penopang laju industrialisasi.

⁹¹ Edi Cahyono. *ibid.*, hlm. 75

Yang terjadi adalah derap industrialisasi melalui serangkaian kebijakan yang cenderung merugikan sektor pertanian. Akibatnya sektor pertanian tidak mampu berkembang dan memperkuat *comparative advantage* (keuntungan besar) produk-produk ekspor Indonesia.

- c. Rezim dan birokrasi yang sangat korup membuat sendi-sendi perekonomian mengalami kerapuhan. Secara umum bisa dikatakan bahwa segala bentuk korupsi akan mengakibatkan arah alokasi sumber daya perekonomian menjurus pada kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan hasil yang optimal. Dalam keadaan demikian pertumbuhan ekonomi bisa saja terus berlangsung, terutama karena praktek-praktek korupsi lambat laun akan menggerogoti daya saing perekonomian.

Menurut Edi Cahyono, melemahnya landasan perekonomian itu akibat dari praktek-praktek korupsi yang juga berakibat pada memburuknya distribusi pendapatan dan pergeseran sumber pertumbuhan ditinjau dari komponen-komponen permintaan agregat (*aggregate demand*). Secara hipotesis sumber pertumbuhan cenderung mengarah pada komponen konsumsi privat (*private consumption*) serta dorongan memperbesar pengeluaran pemerintah, khususnya pengeluaran pembangunan yang berbentuk fisik, maksudnya pembangunan ekonomi pemerintah adalah pembangunan ekonomi lebih pada pembangunan yang berbentuk sarana dana prasarana yang hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi atau orang-orang kaya seperti pembangunan gedung-gedung bertingkat (hotel, kantor-kantor, pusat-pusat perbelanjaan). Selanjutnya lambat laun praktek-praktek korupsi akan merusak tatanan ekonomi

dan pembusukan politik yang disebabkan oleh perilaku penguasa atau elit politik di jajaran birokrasi. Keadaan makin buruk jika jajaran angkatan bersenjata (ABRI) juga terseret ke dalam jaringan-jaringan praktek korupsi, apalagi seandainya ABRI semakin terlibat pada kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹²

Melihat situasi krisis bangsa Indonesia ini, maka dampak paling besar yang akan dialami oleh bangsa Indonesia yaitu terkikisnya *trust* yakni hancurnya kredibilitas pemerintahan yang beriringan dengan memburuknya serba ketidakpastian dan ini dapat menyebabkan terkikisnya suatu *trust* (kepercayaan). Yang kini terjadi tidak hanya pudarnya *trust* masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya, melainkan juga antara kalangan luar negeri dengan pemerintah serta di antara sesama kelompok masyarakat.

Sementara krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terlihat dari respon masyarakat yang kerap berlawanan dengan tujuan dari berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah. Suatu kebijakan yang ditempuh pemerintah yang berupaya menumbuhkan eksistensi masyarakat ke arah kanan justru menimbulkan reaksi masyarakat kearah kiri dan sebaliknya. Hal ini terutama disebabkan oleh persepsi yang mengakumulasi di benak masyarakat terhadap berbagai langkah pemerintah yang tidak jelas arah dan tujuannya. Faktor lain adalah semakin lemahnya distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga mengakibatkan lunturnya solidaritas bangsa.⁹³

⁹² *Idem.*

⁹³ Edi Cahyono, *ibid.*, hlm. 78

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia diikuti dengan jatuhnya nilai rupiah. Nilai rupiah mengalami penurunan drastis yaitu pada pertengahan tahun 1997. Runtuhnya nilai rupiah berimbas pada kenaikan harga barang. Kenaikan tingkat harga secara umum memberikan pengaruh pada kebutuhan lain seperti makanan, perumahan, sandang atau pakain, kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi. Sebelum rupiah terperosok, tingkat inflasi Indonesia berada di bawah dua digit. Namun begitu krisis datang inflasi melejit sampai dua digit. Rupiah yang tidak bernilai ini semakin bertambah buruk ketika masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada bank-bank. Masyarakat lebih senang memegang uang sendiri daripada harus disimpan di bank.

Krisis ekonomi semakin memburuk dengan adanya pertentangan terbuka antar tokoh politik, kemudian kerusuhan sosial yang berlatar belakang etnis dan agama di beberapa daerah, serta ancaman disintegrasi bangsa secara tidak terduga mulai meningkat, hal ini terlihat sejak awal April tahun 2000. Gangguan ini memperbesar tekanan terhadap rupiah yang akhirnya menjadi 8000 per dolar AS pada April tahun 2000. Nilai ini merupakan nilai yang terendah sejak 15 Oktober 1999. Akhir Mei rupiah melemah menjadi 8.635 dolar AS.⁹⁴

Untuk mengurangi penderitaan itu, Indonesia mencoba mencari bantuan dari luar. Bantuan tersebut diperoleh Indonesia lewat IMF. Ada dua alasan mengapa Indonesia menjalin kerjasama dengan IMF. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sudah sejak zaman Presiden Soekarno tepatnya pada tanggal 21 Februari 1967 Indonesia telah menjadi anggota IMF akan tetapi belum berkekuatan hukum. Secara resmi Indonesia menjadi anggota IMF yaitu pada

tanggal 15 Januari 1998 melalui kesepakatan antara IMF dengan Indonesia. Kesepakatan itu diawali oleh Indonesia dengan menulis surat kesediaan Indonesia untuk menjadi anggota IMF yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan yaitu Mar'ie Muhamad dan Gubernur Bank Indonesia yaitu bapak Soedrajad Djiwandono.⁹⁵

Adapun program perbaikan ekonomi Indonesia melibatkan tujuh program. diantara tujuh program tersebut ada beberapa hal penting yaitu kerangka kerja makroekonomi, APBN, fiskal, sektor publik, kebijakan moneter, restrukturisasi korporasi dan perbankan serta beralihnya kekuasaan bulog yang semula memonopoli impor dan distribusi gula, gandum kini bulog hanya bias memonopoli beras. Meskipun Indonesia sudah menggalang dana kepada IMF, namun krisis juga tidak ujung usai.

Di sisi lain krisis ekonomi yang menimpa Indonesia menyebabkan ekspor produk konsumsi sederhana bukan lagi sebagai komoditi utama. Sebagai contoh migas. Lambat laun kontribusi minyak dan gas bumi dalam pencatatan ekspor berkurang. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran untuk tidak terus menerus mengandalkan minyak dan gas bumi sebagai hasil bumi yang utama akan tetapi kita juga perlu meningkatkan non migas sebagai komoditi ekspor. Tetapi pada kenyataanya tidak dapat mengurangi krisis ekonomi karena dalam praktek kerjanya Indonesia masih mengimpor bahan migas dan non migas dari luar negeri.

⁹⁴ B. E. Jllianery, *Indonesia dalam Krisis*, 2000, Jakarta:..... hlm. 9

⁹⁵ F. Harianto Santoso, *ibid.*, hlm. 13

Dasar supaya Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi ini adalah pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara maksimal. Namun, untuk dapat menjalankan program tersebut masih sangat sulit bagi Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia kurang memiliki semangat bekerja keras dan berkorban. Istilah orang Jawa mengatakan “*alon-alon waton kelakon*”.

Apabila prinsip tersebut berubah, maka dapat dikatakan perekonomian Indonesia akan membaik. Artinya semangat bekerja keras dalam rangka memberdayakan SDA dan SDM yang telah kita miliki sekarang ini, maka krisis yang terjadi di Indonesia lambat laun dapat teratasi.

Secara umum perkembangan ekonomi Indonesia disaat Abdurrahman Wahid dapat dikatakan mengalami pemulihan ekonomi. Pemulihan perekonomian mulai terlihat. Indikator makro ekonomi telah memperlihatkan hal yang positif. Salah satu kebijakan dibidang ekoomi yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid adalah menjalin kerjasama dengan IMF atau dengan badan dana moneter Internasional. IMF menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui LoI (*Letters of Intent*) atau Surat kesepakatan bersama. Secara spesifik LoI berisi serangkaian pernyataan yang mengklarifikasikan pembagian kerja serta tanggung jawab dan menetapkan batas-batas waktu bagi penyelesaian masalah restrukturisasi bank dan perusahaan.⁹⁶

LoI ini perama kali ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Januari 2000. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan setelah mengalami penundaan satu bulan. LoI (*Leterrs of Intent*) ini merupakan kebijakan

⁹⁶ -----, *Perkembangan Ekonomi dan Politik diawal Pemerintahan gus Dur, 2000*, CSIS: Centre for Statetegic National studies. Th. XXIX/2000. no. 1. hlm. 5

ekonomi pertama yang secara resmi disampaikan oleh Abdurrahman Wahid melalui pidato pengukuhan pada akhir bulan Oktober 1999. LoI ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri untuk anggaran tahun 2000. Salah satu strategi dari LoI adalah dengan memperluas dasar pengenaan pajak (tanpa perlu menaikkan tarif pajak) dan mengubah administrasi perpajakan untuk mengurangi penghindaran pajak dan menaikkan penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB (Produk Domestik Bruto).⁹⁷

A. 3. Bidang Keamanan

Keamanan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid kurang begitu baik. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahannya, Indonesia masih diselimuti ancaman disintegrasi bangsa oleh beberapa pulau besar di Indonesia misalnya Aceh, Ambon, Irian Jaya, Sulawesi Selatan dan beberapa pulau itu menghendaki adanya referendum. Referendum itu antara lain berisi hak untuk memutuskan apakah ingin terus bersama Indonesia atau membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat penuh.

Jika lepasnya Timor Timur adalah akhir bagi sebuah persoalan yang mengganggu selama dua dekade terakhir, maka lepasnya Aceh akan berakibat sebaliknya yaitu menambah persoalan yang sangat serius dan secara potensial justru akan lebih berbahaya daripada yang terjadi di Aceh sekarang. Apabila Aceh benar-benar lepas, maka daerah-daerah atau pulau-pulau lain di Indonesia akan meminta hak yang sama.

⁹⁷ *Idem.*



Sebagai contoh Aceh, referendum bagi Aceh adalah kelaziman yang bisa dating setiap saat dan diperdengarkan di beberapa tempat. Rakyat Aceh melakukan ini semua karena mereka sangat memperhitungkan sejarahnya. Sejarah panjang Aceh terdiri dari rangkaian perlawanan massal masyarakat Aceh terhadap dominasi kekuasaan pusat. Balasan tahun bukan waktu yang pendek untuk sebuah penderitaan Aceh, untuk suatu obyek kesewenang-wenangan militer atau kebijakan politik Indonesia.

Wujud kemarahan itu adalah tuntutan kemerdekaan. Mungkin ini bukan pilihan yang sempurna, akan tetapi Aceh tidak memiliki pilihan lain, dan yang pasti sejak perang kolonial dimulai yaitu pada tahun 1873, identitas Aceh adalah identitas perlawanan. Jika di masa lampau mereka melawan "kape" Belanda kini mereka melawan tentara dari Republik sendiri. Dan kita telah membiarkan kekejaman itu terjadi di Aceh.⁹⁸

Selain Aceh yang terancam disintegrasikan adalah Maluku. Maluku sebagai pulau besar juga ikut bergejolak yaitu dengan adanya konflik. Dalam ukuran ini, konflik yang terjadi di Maluku termasuk masih taraf usia yang muda. Namun demikian tanda-tanda berakhirnya suatu konflik belum terlihat jelas. Alasan yang menyebabkan sebuah konflik terus berlangsung karena adanya kekerasan dan perbedaan di dalamnya.

Kerusuhan Maluku meluas, ratusan korban tewas dalam sehari hingga menggoyangkan para politikus yang berada di Jakarta. Abdurrahman Wahid sangat lamban dalam bertindak dan menangani kerusuhan-kerusuhan tersebut. Kelambanan tindakan Abdurrahman Wahid ini disebabkan karena apa yang

⁹⁸ Arif Zulkifli. *Identitas Perlawanan Dari Aceh*. 2000. Jakarta:PT. Temprint. Tempo no. 44/XXVIII/ 3-9 Januari 2000. hlm. 81-82

menjadi kebijakan-kebijakannya hanya merupakan janji semata demi untuk meredam suasana tanpa adanya tindak lanjut. Korban terus berjatuh dan belum ada jaminan kapan nyawa manusia akan berhenti melayang. Yang paling penting bagi Abdurrahman Wahid dan pemerintahannya adalah meyakinkan rakyat bahwa Indonesia bukanlah sebatas orde lama dan Orde Baru, akan tetapi lebih merupakan sebuah upaya terus menerus untuk merealisasikan gagasan tentang kebebasan dan keadilan bagi setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke.⁹⁹

Konflik yang terjadi terutama pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini telah memberikan keprihatinan yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Konflik-konflik itu secara tidak langsung telah menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

Masyarakat Indonesia merasa sedih dan berduka atas banyaknya korban yang semakin meningkat baik korban luka, meninggal, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian. Rakyat Indonesia sangat menyesali rusaknya kehidupan bermasyarakat sebagai akibat konflik yang berkepanjangan. Selain itu konflik yang terjadi juga diwarnai oleh corak keagamaan, sehingga konflik yang terjadi semakin tajam dan sangat sulit mencari pemecahannya. Sedangkan agama sendiri telah mengajarkan persaudaraan antar sesama atas dasar cinta kasih, saling menghormati, toleransi dan saling mengampuni.¹⁰⁰

Keamanan Indonesia akan terwujud apabila konflik-konflik antar suku dan daerah dapat diatasi. Hanya dengan dihentikannya konflik maka kita sebagai bangsa Indonesia dapat bersama-sama menemukan penyelesaian melalui pendekatan perdamaian, jauh dari kekerasan serta sikap mau benar dan menang

⁹⁹ -----, *Hentikan Pertikaian dan Pembantaian*, 2000. Yayasan Hidup katolik. hlm.17-18

¹⁰⁰ *Idem.*

sendirir. Dihentikannya konflik akan menciptakan kondisi Indonesia yang berdasarkan pada persatuan dan kesatuan tanpa adanya perbedaan.

A. 4. Bidang Sosial

Sejak terpilih sebagai presiden, Abdurrahman Wahid menghadapi tantangan yang sangat besar yaitu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa ini sebagai akibat krisis dalam berbagai bidang yang telah menyulut konflik dengan isu agama dan suku di banyak daerah dan kota, bahkan sudah banyak menelan korban manusia. Sayangnya pemerintahan Abdurrahman Wahid belum serius dalam menangani konflik-konflik di beberapa daerah seperti Maluku, Aceh, Sulawesi Selatan. Konflik-konflik itu tidak mendapatkan prioritas tinggi dalam kebijakan pemerintah.¹⁰¹

Bila dilihat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk terdiri dari pelbagai aspek kehidupan yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, tingkat pendidikan dan agama. Dari satu sisi, kemajemukan ini sering kali menjadi fakta yang membanggakan terutama bagi golongan penguasa. Namun dari sisi lain ternyata kemajemukan ini seringkali menjadi salah satu alasan untuk memunculkan konflik sosial sebagai contoh konflik yang terjadi di Aceh, Maluku, Irian. Kesanggupan dan keseriusan untuk mengolah kemajemukan sosial sebagai modal pembangunan masyarakat masih tergolong sangat rendah.¹⁰²

Masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial yang bukan

¹⁰¹ Dr. William Chang OFM Cap. Menuju Indonesia Baru. 2000. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm. 12

¹⁰² *Idem.*

merupakan kelompok statis akan tetapi kelompok sosial yang setiap kali mengalami perkembangan dan perubahan. Selain itu beberapa kelompok sosial memiliki sifat lebih stabil daripada kelompok-kelompok sosial lainnya.

Salah satu akar gejolak dan kekacauan sosial belakangan ini adalah ketidakadilan sosial, manusia akan bereaksi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Masyarakat sedang bingung menghadapi kenyataan sosial ini. Ketidakadilan sosial akan dapat berkembang dalam suatu negara yang pada prinsipnya negara itu dapat menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

Masalah sosial lain yang dihadapi oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah masalah pengungsian Timor Timur yang berada di Indonesia. Adapun lokasi pengungsi Timor Timur yang berada di Indonesia adalah di Kupang tepatnya Atambua. Pengungsi Timor Timur yang berada di Indonesia dapat dikatakan sangat menderita. Mereka tinggal di lingkungan yang tidak bersih sehingga mudah terjangkit oleh penyakit. Daerah tempat tinggal mereka hanya berukuran 2x2 meter dengan penghuni 5-6 orang. Selain mereka dilanda kemiskinan, mereka juga mengalami kebingungan dan ketakutan. Mereka butuh perlindungan dan perawatan. Maka banyak pihak berharap agar pemerintahan Abdurrahman Wahid memperhatikan nasib para pengungsi itu.¹⁰³

Ancaman disintegrasi dari berbagai daerah membuat rakyat menjadi semakin menderita. Mereka bingung akan dibawa kemana republik Indonesia. Di samping itu kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjalankan

¹⁰³ Herman Bere, *Pengungsi Timor Kian Terpuruk* 2000, Jakarta: Yayasan Hidup Katolik

pemerintahannya tidak konsisten dalam mengatasi masalah yang ada.¹⁰⁴ Sebagai contoh, untuk menghadapi tuntutan referendum di beberapa daerah terutama di Aceh, Abdurrahman Wahid mencoba mengulur waktu. Ini merupakan taktik menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Taktik tersebut membuat daerah-daerah memiliki anggapan bahwa Abdurrahman Wahid butuh waktu untuk dapat mengabulkan permintaan tersebut. Namun bagi Abdurrahman Wahid tidaklah demikian karena dalam pikirannya bukanlah suatu referendum yang akan dikabulkan melainkan beliau akan menerapkan bentuk-bentuk otonomi.¹⁰⁵

Yang kedua, pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid yang sering membingungkan dan membuat masyarakat khawatir. Sebagai contoh bagaimana mungkin seorang presiden mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai kepala negara apabila ada sejumlah daerah yang memisahkan diri.¹⁰⁶ Bila dilihat, ancaman itu sangat berbahaya karena dengan adanya ancaman tersebut, Abdurrahman Wahid akan dianggap telah mengingkari kenyataan. Hal ini mengingat beliau adalah seorang presiden (kepala negara), tidak seharusnya seorang presiden memberikan ancaman. Seorang presiden seharusnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesengsaraan dan penderitaan semakin dirasakan oleh rakyat, ketika pusat sendiri tidak memberikan perlindungan dan perhatian yang layak. Hal ini disebabkan karena pemerintah sendiri sempat menjadi goyang akibat konflik yang

¹⁰⁴ Rizal Mallaraeng, *Akankah Sejarah Berulang* dalam <http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&id=106>

¹⁰⁵ Greg Balton, *op.cit.* hlm.363

¹⁰⁶ -----, *Ekonomi Pasca Gus Dur*, dalam http://www2.rnw.nl/rnw/id/tema/ekonomi.pasca_gus_dur.html.

mengarah pada disintegrasi bangsa. Ini membuktikan bahwa fondasi yang dibangun oleh pemerintah sendiri kurang kuat.

Selain masalah disintegrasi bangsa, Abdurrahman Wahid juga memberi perhatiannya pada bidang pendidikan realisasi kebijakannya di bidang pendidikan yaitu beliau memberi sambutan dalam Forum Rektor IV yang diselenggarakan di Semarang. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa kebebasan berfikir dan berpendapat di kampus merupakan esensi dari kehidupan. Selain itu Abdurrahman Wahid juga mengingatkan kepada para rektor untuk tidak membiarkan kepentingan lain di luar kepentingan akademis mendominasi kepentingan kampus.¹⁰⁷ Artinya para rektor harus bertindak tegas atau tidak memperbolehkan kepentingan-kepentingan birokratis dari luar maupun dari dalam kampus mendominasi cara hidup masyarakat yang akademis. Untuk itu para rektor perlu menyadari pentingnya arti kebebasan baik kebebasan berfikir maupun kebebasan dalam menyatakan pendapat. Untuk itu perlu adanya birokratisasi dengan tujuan sebagai koordinatif dalam menjalankan tugas. Kebebasan yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid adalah kebebasan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berarti.

Selain masalah kebebasan bagi para rektor, dalam pemerintahannya Abdurrahman Wahid juga menekankan pada masalah dikotomi antara swasta dan negeri. Menurut Abdurrahman Wahid tugas antara swasta dan negeri dalam menjalankan pendidikan sebaiknya ada perbedaan.¹⁰⁸ Artinya pihak Departemen

¹⁰⁷ -----, *Gus Dur: Rektor Harus junjung Kebebasan Berfikir*. 2000 CSIS: Centre of Strategic and International Studies. hlm. 44

¹⁰⁸ -----, *Gus: Depdiknas Jangan Jadi Saingan Sekolah Swasta*. 2000. CSIS: Centre of Strategic and International Studies. hlm. 6

Pendidikan Nasional (Depdiknas) hanya melakukan rintisan-rintisan dan membuat suatau rancangan atau konsep-konsep sedangkan pihak swasta lebih pada pelaksana atau lebih pada operasionalnya.

A. 5. Bidang Hukum dan HAM

Hampir setiap lapisan masyarakat menganggap bahwa hukum tidak berdaya. Hal ini sudah dirasakan sejak pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Semangat reformasi di bawah pimpinan tiga presiden yaitu B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri masih belum menemukan aktualitanya dalam menegakkan supremasi hukum. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bukannya berkurang melainkan semakin menggelembung. Di masa pemerintahan B. J. Habibie hampir dua pertiga persen reponden (masyarakat Indonesia pada umumnya) menyatakan tidak puas terhadap upaya pemerintahannya terutama dalam penanganan masalah KKN. Rakyat melihat pemerintahan yang dijalankan oleh B. J. Habibie terkesan masih sangat sangat ragu-ragu dalam bertindak.

Namun semenjak Abdurrahman Wahid duduk di kursi presiden reaksi publik positif. Hal ini dapat dikatakan bahwa duduknya Abdurrahman Wahid di kursi presiden meniupkan hawa baru dalam rangka penegakkan hukum. Jejak pendapat mengungkapkan hampir dua pertiga persen responden sangat yakin bahwa pemerintah mampu menyelesaikan pelanggaran HAM dan dapat pula mengungkapkan kasus-kasus korupsi.¹⁰⁹ Meski tidak dilakukan dalam bulan-bulan

¹⁰⁹ Toto Suryaningtyas. *Penegakan Hukum Baru sebatas ucapan*. 2000. Jakarta: buku Kompas.hlm.212

pertama pemerintahannya, pengangkatan pucuk pemimpin lembaga pemimpin yang kredibel dan bersih terjadi dalam pemerintahan beliau.

Akan tetapi kepuasan publik terhadap penegakkan hukum yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid semakin hari semakin turun tatkala presiden sendiri terkena isu tuduhan KKN pada kasus Yantera Bulog. Isi dari bantuan Yanatera Bulog adalah bantuan dana sebesar 35 miliar dari Sultan Brunai yaitu Sultan Hasanal Bolkiah kepada rakyat Aceh.¹¹⁰ Tuduhan yang menyatakan bahwa beliau terlibat KKN ini membuat popularitasnya turun. Bagi publik, pemerintahan manapun akan ditanggapi positif sepanjang kinerjanya memadai. Sebaliknya tanpa hasil nyata, pemimpin dengan kharisma atau dengan latar ulama tidak akan cukup menimbulkan kepercayaan rakyat.¹¹¹

Jadi dapat dikatakan hukum akan terus kuat dan tetap eksis di mata masyarakat (publik) apabila publik sendiri (masyarakat) percaya akan keberadaan hukum karena kepercayaan dari suatu masyarakat ini sangat mendominasi bagi tegaknya hukum. Artinya masyarakat memiliki pengaruh yang besar bagi tegaknya hukum-hukum di Indonesia dan hukum-hukum akan tetap eksis di mata masyarakat apabila masyarakat sendiri percaya bahwa hukum itu ada. Apabila masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap hukum, maka dimungkinkan penegakan hukum telah luntur dan sebagai imbasnya adalah lembaga-lembaga hukum seperti kehakiman, kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pengacara sampai KOMNAS HAM. Hukum sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap HAM ataupun gerakan separatis. Di sini kekuatan dari

¹¹⁰ -----Keluarnya Rp 35 Milyar Atas Perintah Presiden, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0-10/18/UTAMA/kalu01>

hukum benar-benar diuji. HAM dan gerakan separatis merupakan dari ketidakberdayaan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial.

Gerakan separatis adalah reaksi dari ketidakstabilan politik, ekonomi maupun budaya.¹¹² Gerakan separatis ini merupakan gerakan yang dilancarkan dalam rangka memperjuangkan keadilan. Gerakan separatis ini muncul di beberapa pulau di Indonesia misalnya Timor Timur, Aceh dan Papua. Gerakan separatis ini merupakan dampak dari krisis politik yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya mereka di sini merasa dianaktirikan di daerahnya sendiri.

Bila dicermati, alam Aceh dan Papua secara ekonomi banyak memberikan sumbangan kepada pemerintah pusat, akan tetapi kehidupan mereka mengalami kesulitan. Hal ini mendorong Timor Timur ingin lepas dari Indonesia dan mendirikan pemerintahan sendiri. Timor Timur berhasil lepas dari Indonesia pada tahun 1999, sedang Aceh dan Papua mendapatkan otonomi khusus.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sini terkait dengan TNI. Tentara sebagaimana selalu diamanatkan sejarah perjuangan militer Indonesia adalah tentara rakyat. Filosofi ini diambil dari fakta kiprah TNI diseputar kelahiran Republik sekaligus kelahiran TNI. Semangat ini senantiasa ditularkan kepada segenap generasi TNI, sejak pendidikan sampai pengucapan janji prajurit. Namun pandangan ini berbeda, karena rakyat Indonesia menganggap bahwa TNI tidak bisa menjadi pelindung bagi kesejahteraan dan keamanan rakyat.¹¹³

¹¹¹ *Idem.*

¹¹² Suwardiman.dkk.*Timor Timur, Aceh dan Papua*2002.Jakarta;Buku Kompas.hlm.265

¹¹³ Suwardiman.dkk.*Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI*2002.Jakarta:Buku Kompas.hlm.303

Semakin hari kesan tentara yang berasal dari rakyat semakin pudar. Hal ini membuat hubungan antara tentara dan rakyat semakin jauh. Rakyat menganggap tentara tidak lagi membantu rakyat melainkan lebih banyak melukai rakyat. Tentara dalam beberapa hal tidak lagi membantu rakyat, melainkan mengorbankan rakyat. Lebih parah lagi melukai rakyat tepatnya melukai perasaan hati rakyat seperti yang sempat terekam dalam beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tindakan Abdurrahman Wahid untuk mengatasi masalah HAM adalah mengeluarkan Keputusan Presiden no 53/2001 tentang peradilan HAM. Alasan utama pembentukan peradilan ini adalah karena adanya desakan dari luar terutama dari dunia internasional. Alasan yang ke dua adalah Indonesia masih dihadapkan pada pilihan dalam rangka menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan pelanggaran HAM daerah lain. Dimata internasional Indonesia dianggap selalu gagal dalam menangani kasus-kasus tersebut. Salah satu kendalanya adalah Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang menyangkut peradilan HAM.

Jadi apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid dalam menangani masalah HAM di beberapa daerah misalnya Timor Timur, Aceh dan daerah lain tidak terealisasi dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena Abdurrahman Wahid lebih memilih pendekatan secara intern daripada melalui jalur hukum.¹¹⁴

Melalui HAM Abdurrahman Wahid ingin membangun Indonesia baru yang damai bebas dari rasa benci dan permusuhan. Untuk itu diskriminasi perlu dihilangkan. Ini merupakan realisasi dari kebijakannya yaitu keinginan beliau

¹¹⁴ Kurie, *op.cit.*, hlm.21

mencaput Tap MPRS No.XXV/1966. Bentuk konkrit realisasi dari kebijakan ini adalah dihilangkannya diskriminasi terhadap etnis Cina.

Keputusan itu diperkuat dengan Inpres (Instruksi Presiden) No.6/2000 pada tanggal 17 januari 2000, dengan dicabutnya Inpres No.14/1967 tentang agama,kepercayaan dan adapt istiadat orang Cina, pada masa orde baru orang-orang Cina takut untuk bersembayang di Klenteng/melakukan budaya Tionghoa, namun sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun baru imlek diperingati dan dibuka dengan diselenggarakannya pertunjukkan barongsai.¹¹⁵

B. Indonesia pada Awal Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Pada saat Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Republik Indonesia yang keempat, kondisi Indonesia masih dalam keadaan krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik dan ekonomi yang rawan dan sulit terutama dalam mencari penyelesaian. Jadi dapat dikatakan hampir semua orang berpendapat, siapapun yang menjadi presiden kali ini akan menghadapi masalah yang sangat berat, dan bagi pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, masalah krisis Indonesia ini adalah tugas yang sangat berat dan yang harus dijalani.

Tantangan terbesar pertama bagi Abdurrahman Wahid adalah memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Ini mengingat rakyat Indonesia sudah mulai tidak percaya lagi akan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah krisis

¹¹⁵ *Idem.*

ini terus melilit. Krisis ekonomi dan moneter menjadi berlarut-larut. Hal ini juga tidak lepas dari kurangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sebagai fakta, B. J. Habibie yang menggantikan pemerintahan Soeharto oleh rakyat Indonesia dianggap kurang legitimate sehingga saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tidak memiliki modal apapun, meskipun secara fisik beliau tidak sempurna. Akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya Abdurrahman Wahid memiliki komitmen yang kuat yaitu keinginannya membangun Indonesia yang demokratis. Modal ini ditambah dengan modal yaitu wakil presiden yang waktu itu dipegang oleh Megawati Soekarnoputri.

Kondisi Indonesia yang sedang dilanda krisis berkepanjangan ini membuat rakyat Indonesia menaruh harapan terhadap pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, alasannya karena kedua tokoh puncak Republik Indonesia ini adalah dua sahabat lama yang keduanya sudah seperti saudara, sehingga rakyat berharap keduanya dapat bekerjasama secara wajar dan saling mengisis tanpa adanya suatu hambatan. Di pundak mereka berdualah diletakkan beban sedang persoalan multikompleks bangsa ini yang harus diselesaikan. Sedangkan dibahu mereka digantungkan harapan lebih dari 200 juta manusia Indonesia untuk dapat merasakan kehidupan yang layak sebagai rakyat, dan bangsa besar yang bermartabat serta terhormat. Begitu besar harapan rakyat Indonesia kepada kedua tokoh tersebut, akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai beberapa kelemahan yakni Abdurrahman Wahid memiliki hambatan dalam penglihatan dan gangguan kesehatan, dan yang

terakhir adalah keduanya sama sekali belum mempunyai pengalaman sebagai administratur pemerintahan.¹¹⁶

Krisis yang berkepanjangan yang dirasakan sampai pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan krisis yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 memberikan dampak langsung bagi rakyat Indonesia. Untuk itu ada tiga agenda penting yang harus segera dibereskan dan diperhatikan terutama pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Tiga agenda utama itu sangat terkait langsung dengan persoalan-persoalan yang sangat riil. Tiga agenda utama itu adalah :¹¹⁷

1. Stabilisasi rupiah
2. Menciptakan lapangan kerja serta stabilisasi harga kebutuhan pokok
3. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi perbankan

Selain persoalan ekonomi yang menjadi penyebab krisis di Indonesia, ada bidang lain yang juga menjadi penyebab terjadinya krisis di Indonesia yaitu bidang politik. Bidang politik ini tak kalah mendesaknya dengan bidang ekonomi. Artinya penyebab krisis di bidang politik di Indonesia akhir-akhir ini antara lain ancaman akan disintegrasi nasional yang nyata-nyata membutuhkan upaya rekonsiliasi nasional. Untuk mengatasi masalah ini sangat diharapkan akan adanya otonomi daerah atau perluasan akan otonomi daerah segera diwujudkan. Selain itu perlu juga adanya rekonsiliasi nasional dalam wujud pendekatan ke pelbagai elite nasional.

¹¹⁶ Edmond Monteiro, *Meringankan Beban Berat Gus Dur*. 1999. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm.29

¹¹⁷ *Idem*.

Sedang di sektor hukum yakni ketidakberdayaan hukum dalam menangani masalah yang ada. Masyarakat berharap kepada pemerintahan baru supaya hukum sebagai lembaga terbesar mendapat perhatian dan mereka harus merekomendasikan perlunya peradilan sebagai lembaga yang independent.

Krisis yang terjadi dan harus dihadapi oleh Abdurrahman Wahid adalah masalah utang luar negeri terutama dana dari IMF. Menurut pengamat ekonomi, tingkat konsumsi nasional dianggap tidak cukup dibandingkan dengan pendapatan. Untuk menutupi konsumsi inilah pemerintah memandang hutang dari luar negeri sebagai kebutuhan yang mutlak. hutang dari luar negeri secara sengaja atau tidak sengaja telah dijadikan alat dan cara secara agregat untuk meningkatkan konsumsi. Kebijakan luar negeri akhirnya telah menjadi ideologi yang utama, sehingga jika hutang tidak ada, maka ekonomi Indonesia akan menjadi lemah. Secara tidak langsung dapat dikatakan, secara ekonomi sebenarnya Indonesia belum mandiri dalam arti tanpa bantuan dari luar negeri Indonesia belum bisa membangun ekonominya. Dan secara teoritis dinyatakan, kegiatan hutang tidak akan pernah dihentikan. Krisis yang terjadi di Indonesia tampaknya juga tidak lepas dari perilaku pemerintah dan birokrasi yang cenderung berfoya-foya pada hutang. Keadaan semakin buruk karena DPR yang seharusnya berfungsi sebagai pengontrol tidak lebih dari boneka rezim yang berkuasa. Di sisi lain, kontrol dari media massa juga sangat lemah.

Masalah lain yang harus dihadapi oleh Abdurrahman Wahid adalah kerusuhan-kerusuhan yang waktu itu terjadi di Jakarta. Kerusuhan itu seperti tragedi Trisakti yang pada pemerintahan B. J. Habibie tidak dapat terselesaikan,

kasus Semanggi yang terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Umum MPR tanggal 13 dan 14 November 1998 di mana sampai Abdurrahman Wahid menjabat presiden siapa yang bertanggung jawab akan kasus tersebut belum terungkap.

Tugas lain yang tidak kalah penting yang harus dijalani oleh Abdurrahman Wahid adalah masih menggantungkannya status Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Rancangan Undang-Undang tersebut pada masa pemerintahan B. J. Habibie tidak ada tindaklanjutnya, karena ada reaksi keras dari kalangan mahasiswa, dari rakyat Aceh yang menginginkan adanya referendum, dari rakyat Ambon dengan masalah yang tidak jauh beda dengan masalah Aceh. Berbagai masalah terutama masalah-masalah warisan dari B. J. Habibie ini menuntut konsentrasi yang ekstra bagi pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid. Memang penyelesaian akan masalah-masalah tersebut bagi Abdurrahman Wahid tidaklah ringan. Paling tidak, masalah-masalah tersebut tidak akan tuntas dengan penyelesaian ditataran politis seperti saat pemilihan presiden dan wakil presiden dan Sidang Umum MPR yang sudah berlalu.

Melihat kondisi Indonesia yang semakin runyam itu, muncul beberapa keinginan baik dari elit politik maupun dari kalangan masyarakat. Keinginan mereka tidak lain adalah datangnya seorang pemimpin yang *credible*. Menjadi pemimpin memang tidaklah mudah, apalagi bila pemimpin tersebut telah memasuki dunia politik. Didalam dunia politik berbaur aneka kepentingan yang nyaris tidak teramalkan. Idiomnya, tentang hari ini kawan besok bisa lawan, hal ini memang efektif tepat untuk menggambarkan perilaku manusia yang

berkecimpung di dunia politik. Untuk itu karakteristik dari seorang pemimpin perlu diperhatikan. Karakteristik itu misalnya :¹¹⁸

- a. Seorang pemimpin harus memiliki kejujuran
- b. Seorang pemimpin harus memiliki pandangan kedepan
- c. Seorang pemimpin harus inspiratif
- d. Seorang pemimpin harus kompetensi
- e. Seorang pemimpin harus berpikiran adil
- f. Seorang pemimpin harus siap membantu apabila diperlukan
- g. Seorang pemimpin harus tegas dan berani
- h. Seorang pemimpin harus cerdas

Bagi bangsa Indonesia, karakteristik dari pemimpin tersebut (selama tiga dasawarsa) mengatakan bahwa kejujuran mendapat tempat yang terhormat bagi seorang pemimpin. Sementara visi, inspiratif, kompetensi bahkan kecerdasan menempati posisi di belakang kejujuran. Akan tetapi bagi Indonesia sekarang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri, artinya bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang untuk saat ini dinilai sangat sulit melahirkan pemimpin-pemimpin yang berdedikasi tinggi. Kesulitan ini disebabkan oleh dua pokok persoalan yaitu :¹¹⁹

- a. Pemimpin memang amat sedikit yang dilahirkan di bumi Ibu Pertiwi
- b. Sistem politik selama tiga dasawarsa lebih telah menelikung para calon pemimpin bangsa sedemikian rupa sehingga dedikasi itu menunjukkan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum terkooptasi oleh kepentingan politik.

¹¹⁸ Susanto, *Bermimpi Tentang Pemimpin*. 1999. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm.22

¹¹⁹ Susanto, *ibid.*, hlm.22

Pangkal adanya kecaman dan masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemimpin. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemimpin. Rakyat di sini mendambakan pemimpin yang memiliki karakteristik yang telah disebutkan diatas. Pemerintahan lama inilah yang sebenarnya menjadi sumber malapetaka bagi bangsa Indonesia sekarang ini. Dengan berbagai manuver politik yang tengah terjadi ini dapat memberikan dampak di bidang ekonomi. Maka tuntutan yang paling mendasar ialah reformasi disegala bidang termasuk mengikis habis sisa-sisa Orde Baru diganti dengan tokoh baru yang bersih terutama bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang paling penting membangun pemerintahan adalah hadirnya seorang pemimpin yang memiliki loyalitas yang tinggi dan memegang kepercayaan rakyat dan dunia internasional.

Melihat kondisi Indonesia yang buruk akibat krisis ekonomi, politik disintegrasi bangsa serta ancaman SARA munculah Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia keempat menggantikan B. J. Habibie. Abdurrahman Wahid dipandang sebagai tokoh yang memiliki kharisma karena dalam sejarah hidupnya bisa ditemukan sejumlah kiat-kiat yang adil dan bijaksana serta teras menjejukkan demi keutuhan bangsa. Sebagai contoh keinginan beliau untuk menghapus sekat-sekat yang membatasi unsur-unsur SARA. Beliau bertekad mempertahankan keutuhan wilayah bangsa Indonesia lewat tokoh pemersatu ini. Di sini kita hanya bisa berharap adanya kesejahteraan lahir dan batin di Indonesia. rasa aman dalam bermasyarakat dan bernegara dapat terjamin, dan semua ini bertolak dari kata kunci yaitu demokrasi.

C. Politik Dalam Negeri Abdurrahman Wahid

Untuk merealisasikan apa yang akan dijalankan oleh Abdurrahman Wahid, maka beliau perlu adanya kabinet yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas sebagai wakil dari rakyat. Kabinet baru di bawah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri ini dikenal sebagai Kabinet Persatuan Nasional. Terbentuknya Kabinet Persatuan Pembangunan di bawah duet kepemimpinan prsiden Abdurahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri (Mega) pada tanggal 26 Oktober 1999 pada dasarnya merupakan rangkaian inisial institusionalisasi reformasi politik di Indonesia. Proses ini paling tidak telah mengantarkan Indonesia pada makin terbukanya peluang demokratisasi. Pasangan Abdurrahman Wahid dengan Megawati Soekarnoputi (Mega) maupun kabinet yang dibentuknya merupakan usaha untuk mengatasi keresahan masyarakat, untuk meredam kekerasan dan untuk mencegah konflik lebih lanjut. Kabinet Abdurrahman Wahid ini dibentuk dengan kompromi politik yang kental.¹²⁰

Kompromi adalah proses tukar menukar, melepas dan mngurangi sesuatu agar memperoleh tambahan di pihak lain¹²¹. Hasil yang dicapai dari kabinet kompromi ini tidak dapat maksimal. Pada dasarnya kabinet kompomi yang dibentuk oleh Abdurahman Wahid tidaklah jelek, apalagi kalau memang terpaksa demi menyelamatkan sesuatu. Pada umumnya kompromi yang dilakukan oleh Abdurahman Wahid ditujukan untuk menjaga persatuan dengan membagi jatah sehingga semua unsur dapat terwakili. Akan tetapi dasar pembagian yang dipakai

¹²⁰ T.A.Legowo. *Politik Indonesia Pasca SU MPR*. 1999. Analisa CSIS. hlm.372

¹²¹ -----, *Kabinet Superkompromi*. 1999. Jakarta: PT Dian Rakyat. Vol. XXVIII no.35-43. hlm.15

memang terlampau banyak untuk bisa direkomendasikan dengan baik. Usaha yang hampir mustahil ini cukup menyulitkan (memusingkan) Abdurrahman Wahid karena persyaratan kecakapan dan integritas para calon menteri juga harus dipenuhi sebelumnya. Ini mengingat bahwa masa depan Indonesia bukan hanya tergantung pada bagaimana pemerintahan baru di bawah duet Abdurrahman Wahid dengan Megawati Soekarnoputri (Mega) menyelesaikan berbagai masalah krisis ekonomi dan sosial-politik, akan tetapi juga bagaimana rezim reformasi yaitu sinergi keseluruhan jajaran pemerintahan baru yang terdiri dari lembaga-lembaga MPR, DPR, Presiden, MA dan lembaga tinggi lainnya melanjutkan proses institusionalisasi reformasi selanjutnya secara optimal.

Masalah pokok yang harus segera ditindaklanjuti dan ditangani oleh Abdurrahman Wahid adalah mewujudkan proses reformasi politik dan hukum (demokrasi) dan mengatasi masalah krisis ekonomi. Indikasi pertama yang menunjukkan komitmen duet kepemimpinan atas kedua masalah ini bertumpu pada profil kabinet yang ditempuh. Indikasi yang lain akan terlihat dalam *performance* kabinet tersebut. Profil cabinet yang diharapkan publik harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya :¹²²

- a. Profil kabinet yang diharapkan masyarakat Indonesia adalah kabinet yang terdiri dari orang-orang yang jujur, sederhana, profesional dan mempunyai komitmen terhadap reformasi.
- b. *Performance* kabinet harus ditampilkan dalam kesungguhan kerja kabinet dalam menyelesaikan kasus Soeharto khususnya dan KKN

¹²² T.A.Legowo, *op.cit.*, hlm.377

pada umumnya, dalam menangani kasus pelanggaran HAM oleh aparat pemerintahan militer serta penanganan secara benar dan transparan krisis ekonomi dan sosial.

Anggota kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid ini melibatkan semua partai politik. Pada awalnya memang semua partai politik harus mendapat bagian yang sepadan termasuk militer. Untuk itu perlu perhatian akan pemerataan atas dasar wilayah, daerah dan suku bangsa serta warga keturunan. Mengingat Indonesia sedang bergejolak (wilayah Indonesia Timur) maka khusus Sulawesi Selatan mendapat alokasi besar yaitu empat kursi. Kemudian itu diimbangi dengan perwakilan-perwakilan satu kursi dari setiap agama yang ada di Indonesia yaitu Budha, Hindhu, Kristen, Katolik dan Islam.

Bila dilihat dan dicermati, susunan kabinet seperti itu sangat sulit dipadukan, karena sulitnya memadukan susunan kabinet yang berlapis-lapis dan kabinet tersebut harus ditampung menjadi susunan kabinet yang anggotanya terbatas. Akhirnya niat untuk membuat kabinet dalam jumlah kecil terpaksa ditinggalkan oleh Abdurrahman Wahid. Pada mulanya rencana jumlah menteri yang akan membantu Abdurrahman Wahid dalam bertugas adalah 25 orang namun kini ditambah 10 orang menjadi 35 orang. Para menteri ini diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan keinginan semua kelompok atau golongan di Indonesia.¹²³

Paling penting dari kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid adalah bagaimana masyarakat Indonesia percaya pada kinerja dari kabinetnya.

¹²³ -----, *ibid.*, hlm.15

Artinya kabinet ini membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu ujian bagi kepemimpinan Abdurrahman Wahid adalah bagaimana beliau dapat memenangi kepercayaan itu. Kepercayaan itu dapat Abdurrahman Wahid peroleh apabila dalam waktu yang singkat beliau dapat memberi jaminan akan kesungguhan untuk berlaku dan bertindak secara jujur dan sederhana selama menjalankan pemerintahan. Hal tersebut dapat Abdurrahman Wahid lakukan misalnya cara antara lain adalah dengan segera melaksanakan pencatatan dan pengumuman harta kekayaan pejabat, berikut dengan keluarga masing-masing yang sudah dijanjikan. Ini tidak bisa ditunda, mengingat sebentar lagi tepatnya dalam pertengahan November akan diberlakukan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Namun demikian, susunan kabinet presiden Abdurrahman Wahid telah memancing banyak kritikan dari masyarakat. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa penempatan para menteri tidak sesuai dengan bidang keahliannya. sebagai contoh Susilo Bambang Yudhoyono seorang perwira militer menangani Departemen Negara dan Lingkungan Hidup, Muh. A. S. Keraf seorang ahli filsafat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Dengan dasar itu, nampaknya kabinet Abdurrahman Wahid kurang memenuhi harapan publik. Disamping itu muncul anggapan dari beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa kabinet kompromi yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid lebih merupakan kabinet kompromi yang mengakomodasikan banyak segmen masyarakat dan kekuatan publik. Representasi etnis, agama dan daerah, partai-partai politik besar, militer, LSM

serta representasi kesinambungan dengan masa lalu terasa sangat menonjol dalam profil kabinet. Segi profesionalisme pada akhirnya kelihatan kurang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet. Dalam pengertian ini latar belakang profesi anggota kabinet bukan merupakan pertimbangan bagi penempatan mereka pada jabatan kementriannya.

Akan tetapi Abdurrahman Wahid memberikan pandangan yang berbeda, Abdurrahman Wahid memandang di samping sebagai wujud kompromi politik, susunan kabinet yang ada juga dapat dipahami dengan pikiran bahwa presiden sendiri sedang melakukan eksperimen untuk melawan kemapanan cara pandang dan pola pikir masyarakat atau dengan kata lain Abdurrahman Wahid ingin mengikis pemikiran yang ada dalam masyarakat.

Dengan politik akomodasi semacam ini, kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri mungkin sekali tidak akan mendapat tantangan dan protes dari partai-partai besar, kekuatan-kekuatan politik etnis dan daerah, militer maupun kekuatan politik lama. Tetapi nampaknya protes dan tantangan akan lebih banyak dihadirkan oleh gerakan mahasiswa dan akademisis. Bukan karena kedua segmen masyarakat ini kurang diakomodasikan dalam kabinet, melainkan karena sifat kekritisannya pada kekuasaan. Kritik tentang kurang diperhatikannya profesionalisme kabinet misalnya akan datang dari segmen-segmen ini. Hal-hal rasional yang harus ada dalam kabinet akan menjadi perhatian dan *concern* mereka. walaupun kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tidak akan menghadapi oposisi dari partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik maka beliau cenderung akan menghadapi oposisi dari gerakan mahasiswa dan kaum cendekiawan.

Menurut Abdurrahman Wahid , profesionalisme tidak bisa diukur dengan melihat satu sisi semata, mengingat tugas seorang menteri bukan hanya menangani satu bidang saja, misalnya tugas Menteri Riset dan Teknologi disini tidak semata-mata hanya melakukan kinerja dibidang mekanik dalam rangka mengembangkan teknologi, akan tetapi juga melakukan analisis mengenai harga sosial dan pengaruh kultur atas pengembangan dan penerangan teknologi. Jadi dapat dikatakan ketidaksesuaian antara keahlian dan jabatan yang terjadi dalam kabinet Abdurrahman Wahid bisa dipahami sebagai terobosan untuk menjawab masalah yakni bahwa profesionalisme tidak bisa diukur hanya dengan melihat kesesuaian antara keahlian dengan jabatan yang disandang. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial dengan taraf perkembangan pola pikir yang berlaku dalam masyarakat. Di negara maju yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, untuk mentaati aturan main baik dalam dunia politik maupun akademik, profesionalisme seseorang bisa diukur dengan keahlian yang dimilikinya, namun di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang memiliki kedisiplinan rendah dengan cara kerja yang masih didominasi oleh kepentingan emosional daripada mekanisme kerja fungsional maka dibutuhkan suatu terobosan kebijakkan agar tidak terjebak dalam profesionalisme formal.¹²⁴

Untuk itu yang menjadi dasar pemikiran dari Abdurrahman Wahid bukan semata-mata keahlian yang dimiliki oleh seseorang melainkan lebih kepada kemampuan setiap orang untuk berfikir alternatif yang dilandasi dengan kecakapannya dalam mengorganisasi serta mengonsolidasikan para pakar yang

¹²⁴ Al-Zastrow. *Profesionalisme Ala Gus Dur*. 1999. Jakarta: PT. Dian Rakyat. vol. XXVIII No. 35-43. hlm 27

ada di bawah tanggung jawabnya untuk diarahkan pada kepentingan masyarakat. dengan demikian, ukuran profesionalisme tidak saja dilihat dari kesesuaian antara keahlian dan lembaga iklim kerja yang baik serta menerapkan keahliannya secara bertanggung jawab pada bidang kerja yang diembannya.¹²⁵

Namun dengan berjalannya waktu, muncul indikasi bahwa ada tiga orang dalam kabinetnya yang dinyatakan terlibat kasus korupsi diantaranya: Hamzah Haz yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Jussuf Kalla yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Tenaga Kerja yaitu Bomer Pasaribu.

Pemerintahan baru yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid ini telah mendapat masalah yang baru juga. Dari sini rakyat Indonesia sudah mulai goyah pandangannya. Pandangan masyarakat Indonesia sudah tidak seperti pada awal Abdurrahman Wahid terpilih menjadi pemimpin Indonesia yang keempat. apabila dilihat, waktu itu masyarakat Indonesia sangat bangga atas terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menyambutnya dengan penuh gembira dan harapan-harapan, namun sebaliknya setelah beliau benar-benar telah menyandang status Presiden Republik Indonesia yang keempat, rakyat Indonesia sudah mulai meragukan kinerja beliau. Dari sinipun sudah bisa dipastikan bahwa jabatan yang disandang oleh beliau tidak akan bertahan lama.

D. Politik Luar Negeri Abdurrahman Wahid

Memasuki periode transisi pasca Orde Baru, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena masih lekatnya ketidakpastian ekonomi dan

¹²⁵ Al-Zastrow, *ibid.* hlm.27

politik sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan dan belum adanya kejelasan mengenai arah reformasi di masa mendatang. Berbagai kendala proses transisi masih terdapat di berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam perilaku politik yang tidak produktif, alasan kedua belum mempunyai UUD 1945 menjawab realitas struktur politik multipartai dalam kerangka “Republik”. Selain itu, tidak adanya *concensus building proces* dan bagaimana cara menanggulangi krisis ekonomi masih menjadi kendala bagi proses demokrasi di Indonesia.

Situasi Indonesia tersebut membuat Abdurrahman Wahid memiliki tanggung jawab yang sangat besar terutama dalam membentuk pemerintahan yang demokratis.

Kedemokratisan tersebut dapat dilihat dari proses Pemilihan Umum (pemilu) pada tahun 1999, yang merupakan proses institusionalisasi yang telah berlangsung secara relatif dan fair. Melalui Pemilihan Umum tahun 1999 inilah terbentuk kabinet Persatuan Nasional di bawah duet antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Terbentuknya kabinet tersebut merupakan akhir dari proses institusionalisasi reformasi politik di Indonesia. Proses telah mengantarkan Indonesia pada makin terbukanya peluang menuju demokratisasi. Lebih lanjut yang perlu diupayakan adalah membangun kembali *social trust* (kepercayaan masyarakat) agar tercipta rekonsiliasi nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.¹²⁶

Di samping itu proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan agenda dari Sidang Umum (SU) MPR pada tahun 1999 terlihat

¹²⁶ T. A. Legowo, *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999*, Jakarta :CSIS, Tahun XXVIII/1999 no. 4 hlm. 372



menyajikan suasana baru bagi pengembangan kultur (kebudayaan) demokrasi Indonesia. Di sisi lain proses pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut mendatangkan suatu perubahan yang mendasar dalam setting sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Tetapi, jelas tidak berarti bahwa proses institusionalisasi reformasi tanpa masalah sama sekali. Masalah pokok dari proses institusionalisasi reformasi adalah kompleksitas persoalan sosial-politik sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berlarut-larut karena kurang serius dalam penanganannya. Di samping itu ada keharusan bahwa toleransi dan kompromi politik itu harus ditempuh dengan mengorbankan optimalisasi institusionalisasi reformasi, artinya bahwa yang menjadi tuntutan dasar reformasi belum terpenuhi secara maksimal, karena toleransi dan kompromi politik harusnya diberikan demi mencegah masyarakat negara Indonesia dari disintegrasi sosial, politik, teritorial bukan sebagai keharusan untuk dikorbankan terlebih lagi toleransi dan kompromi politik itu ditempuh dengan mengorbankan optimalisasi institusionalisasi reformasi.

Proses inisial institusionalisasi reformasi ini sebenarnya telah mengeluarkan Indonesia dari sebuah terowongan yang gelap. Proses itu paling tidak telah mengantarkan Indonesia pada makin terbukanya peluang untuk melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan politik menuju demokrasi. Bila dilihat proses tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan demokrasi Indonesia selanjutnya dan demi memenuhi secara optimal tuntutan reformasi yakni dalam mengembalikan kedaulatan rakyat.

Di samping itu reformasi juga memberikan perubahan-perubahan di bidang lain terlebih lagi pada politik luar negeri. Perubahan tersebut dirasakan

oleh segenap elit politik dan masyarakat pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Politik luar negeri yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid memberikan nuansa yang berbeda dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Soeharto.

Beralihnya perhatian atau fokus politik luar negeri Indonesia dari negara-negara barat pada era Soeharto ke negara-negara Asia pada era Abdurrahman Wahid adalah tindakan politik yang sama sekali baru. Orientasi politik Abdurrahman Wahid adalah orientasi politik yang adaptif promotif. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang relatif singkat ini dapat dikatakan menimbulkan pro dan kontra terutama pernyataannya akan politik luar negerinya. Orientasi politik luar negeri Abdurrahman Wahid lebih pada negara-negara Timur Tengah seperti Palestina serta negara-negara lain seperti Israel, Jepang, India dan Cina. Alasan Abdurrahman Wahid mengadakan hubungan dengan Israel adalah bahwa hubungan dagang tersebut diharapkan akan membantu perekonomian Indonesia, juga akan meningkatkan *leverage* diplomatik Indonesia di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam konteks Israel-Palestina. Namun untuk yang terakhir ini Indonesia masih diragukan, kendati Indonesia memiliki reputasi baik dalam peran mediasi di Asia Tenggara.

Sedang indikasi lain “pergeseran” politik luar negeri yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid ke negara Cina, Jepang dan India adalah untuk membangun kekuatan bersama antara negara dengan negara Asia lainnya. Bagi Abdurrahman Wahid kekuatan tersebut akan menjadi faktor strategis terutama dalam menjalin hubungan Internasional di Asia Pasifik, khususnya dalam bidang keamanan. Pergeseran politik luar negeri Indonesia ini juga dirasakan oleh masyarakat.

Secara teoritis negara adalah sebuah organisme yang selalu berubah untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan merealisasikan tuntutan-tuntutan dalam negeri melalui politik luar negeri yang diarahkan pada tujuan tertentu. Namun bila dilihat dari konteks pengertian diatas, realisasi akan hubungan luar negeri yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid ini bisa dikatakan sebagai proses adaptif, artinya bahwa adaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal Indonesia yang juga sedang mengalami perubahan. Dalam proses adaptasi politik luar negeri ini, pemerintah baru Indonesia memunculkan aspek mutualisme yaitu mengembangkan kerjasama internasional yang didasari oleh kepentingan (*interest based*) dan mengutamakan pendekatan regional daripada global. Agar mutualisme berhasil, pemerintah harus lebih *fair sighted* dalam merumuskan kebijakkan-kebijakkan nasionalnya sesuai dengan tuntutan nasional yang muncul dan fleksibel dalam implementasinya.

Adapun tujuan kebijakkan-kebijakkan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam politik luar negerinya yang berorientasi adaptif adalah :¹²⁷

1. Memulihkan citra dan posisi internasional Indonesia
2. Memanfaatkan sumber-sumber dan peluang-peluang di dalam negeri sebesar mungkin. Ini semua dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.
3. Meningkatkan kapasitas produksi dari masyarakat dan mencegah kemungkinan kekerasan sosial oleh mereka yang tidak menikmati

¹²⁷ Bantarto Bandoro, *Politik Luar Negeri Abdurrahman Wahid*. 1999. Jakarta: Analisis CSIS. No. 4 /XVIII/1999

proses globalisasi. Artinya politik luar negeri yang berorientasi adaptif ini harus mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan di lingkungan eksternal dan jika upaya kearah itu berhasil, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan keterampilan masyarakat atau mengurangi keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, walaupun tidak dihapuskan sama sekali maka ketegangan dan kekerasan sosial akan timbul.

4. Membangun hubungan regional baru melalui kerjasama internasional selalu mungkin.
5. Menciptakan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan dan menjalankan pilihan-pilihan kebijakannya.
6. Menciptakan perubahan-perubahan yang menjangkau ke depan (*fair reacing*) baik yang menyangkut kinerja aparatur luar negeri, kualitas diplomasi dan kualitas kebijakan.

Jadi dapat dikatakan bahwa interpretasi ataupun pandangan dari masyarakat yakni adanya perubahan dalam politik luar negeri Indonesia tidak seratus persen keliru. Perubahan fokus politik luar negeri Indonesia yang semula terfokus ke barat kini setelah Abdurrahman Wahid menjabat presiden republik Indonesia fokus politik luar negeri Indonesia beralih ke negara-negara Asia yang merupakan dimensi sentral dari adaptasi bukan sebagai perubahan yang mendasar. Artinya bahwa setiap tindakan politik pasti mengandung dimensi-dimensi adaptif. Jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah baru Indonesia dalam bidang politik luar negerinya, terutama disaat menghadapi persoalan ekonomi sebenarnya citra dari Indonesia sendiri menurun dimata Internasional apalagi saat lingkungan

eksternal juga mengalami transformasi besar dalam bidang ekonomi dan politik. Dengan orientasi yang adaptif ini bangsa Indonesia ingin tetap mempertahankan dirinya sebagai bagian dari sistem internasional melalui prakarsa-prakarsa baru politik luar negeri.

Menurut pendapat Bantarto Bandoro, tindakan-tindakan politik luar negeri Indonesia di bawah Abdurrahman Wahid bersumber sekurang-kurangnya dari satu sumber umum, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan struktur esensial di dalam negara, dalam batas-batas yang dapat diterima dengan cara mencapai keseimbangan antara perubahan-perubahan serta tuntutan dari lingkungan eksternalnya dilain pihak. Artinya, bahwa dengan memperkenalkan fokus baru dalam politik luar negerinya ini, Indonesia berusaha untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dalam membuat keputusan luar negeri dan merumuskan kembali apa yang dikenal dengan istilah *self environment* (lingkungan dalam negeri sendiri). Tetapi kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dalam membangun *self-environment relationship* itu akan mengalami erosi jika pemerintah tidak mampu mengatasi atau mencegah timbulnya perpecahan dan *competing consensus* dalam politik domestik. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat ruang seluas mungkin untuk mengakomodasi kepedulian dan kepentingan-kepentingan yang berada di luar struktur formal yang berkaitan dengan substansi maupun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Untuk itu perlu penegasan akan komitmen Abdurrahman Wahid terhadap kerjasama regional Asia Tenggara, kunjungan presiden ke beberapa negara kunci Asia, pembukuan kembali dialog dengan lembaga-lembaga keuangan

internasional, kunjungan presiden ke Timur Tengah, serta rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel dan hubungan diplomatic dengan Portugal, sebab semuanya itu begitu signifikan dan mengejutkan sehingga membangkitkan keingintahuan mesyarakat mengenai apa yang sesungguhnya hendak dicapai oleh Indonesia dalam politik luar negerinya. Di samping itu masyarakat juga ingin tahu apa yang ingin dicapai dari politik luar negeri Indonesia.¹²⁸ Untuk itu politik luar negeri yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid sekurang-kurangnya harus mampu memberikan jawaban, paling tidak Abdurrahman Wahid sendiri harus mampu memperlihatkan orientasi dasarnya, yakni adaptasi yang promotif.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat memperhatikan pilihan kebijakkan pemerintah, artinya pemerintah memiliki sejumlah pilihan kebijakkan yang dapat memotivasi pemerintah itu sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam negeri maupun lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan antara komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dan keharusan dalam mengelola kembali hubungan eksternal dengan mengambil kebijakkan-kebijakkan yang mendukung perubahan dalam negeri.

Politik luar negeri Abdurrahman Wahid yang berorientasi pada adaptif promotif sejauh ini memang mendapatkan resistensi berarti dari anggota-anggota kabinetnya. Kerjasama antara individu dan kelompok-kelompok dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid sekurang-kurangnya telah berhasil membawa

¹²⁸ Bantarto Bandoro, *ibid.*, hlm. 397

“*sen se of commonidentity*” atau rasa kebersamaan dalam persoalan-persoalan nasional termasuk bagaimana menata kembali posisi internasional Indonesia. Ini penting sebagai modal wujud dukungan terhadap kebijakan Abdurrahman Wahid,¹²⁹ karena bagaimanapun juga kerjasama antar lembaga negara sangatlah dibutuhkan terutama untuk mencapai tujuan tertentu.

Di samping itu ada hal lain yang perlu dicermati oleh Abdurrahman Wahid, yaitu langkah-langkah adaptif dari politik luar negerinya. Langkah-langkah adaptif Abdurrahman Wahid itu akan menjadi tidak berarti jika beliau gagal dalam mengatasi konflik-konflik atau perbedaan di dalam pemerintahannya yang mungkin timbul begitu saja timbul sebagai reaksi terhadap langkah politik luar negeri presiden Abdurrahman Wahid yang kurang hati-hati.¹³⁰ Kondisi yang demikian akan menimbulkan beberapa dampak di antaranya :

- a. Ketidakstabilan dalam negeri yang pada gilirannya merongrong langkah-langkah baru politik luar negeri.
- b. Dorongan dari negara-negara yang menjadi fokus perhatian untuk meninjau kembali komitmen mereka.
- c. Sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakannya.
- d. Mengurangi kebebasan pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakannya.

¹²⁹ Bantarto Bandoro, *ibid.*, hlm. 398

¹³⁰ *Idem.*

- e. Stagnasi dalam interaksi dan stagnasi ini akan menghambat pemerintah dalam mencari pengaturan dan penyelesaian permanen terhadap berbagai persoalan nasional.

Untuk itu presiden sendiri harus menyadari bahwa politik luar negerinya yang berorientasi pada adaptif promotif ini sebenarnya bukannya tidak rentan terhadap setiap persoalan dalam negerinya dan kebijakan baru itu akan tetap bertahap apabila dapat memenuhi dua kondisi yaitu :

- a. Adanya potensi yang tinggi pada pelaku politik luar negeri, khususnya menteri luar negeri, untuk menciptakan perubahan-perubahan di dalam dan di lingkungan eksternal yang bisa menghasilkan keseimbangan dan diinginkan antara struktur esensial masyarakatnya dan lingkungan eksternal.
- b. Penerimaan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam pemerintahan dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Jadi politik di sini tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan nasional sesaat melainkan dapat mengimbangi hubungan tersebut dengan berat dan dapat menunjukkan kepada masyarakat dan kesungguhan para pemimpin Indonesia untuk memperbaiki kondisi dalam negeri.

Pilihan-pilihan itu harus merupakan langkah awal untuk menciptakan perubahan-perubahan yang lebih jauh dan membuka peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih kebijakan. Tetapi pemerintah harus ingat bahwa pilihan politik luar negeri tanpa kalkulasi yang tepat baik itu menyangkut reaksi masyarakat maupun kemungkinan respon lingkungan

eksternalnya hanya akan membuat Indonesia menjadi sandera dari pilihan-pilihannya sendiri-sendiri. Jika ini terjadi, maka Indonesia akan menghadapi beberapa konsekwensi yaitu :

1. Kehilangan dukungan domestik dan dengan demikian membatasi pilihan-pilihannya.
2. Kehilangan intensif untuk mendukung proses adaptasi
3. Kehilangan intensif untuk menciptakan tantangan bagi dirinya.
4. Fragmatasi dan kompartementalisasi dalam proses perumusan perencanaan kebijakan.
5. Menurunnya kredibilitas Indonesia di luar negeri

Kegagalan dalam hubungan luar negeri, dan ini pada gilirannya akan mengurangi peluang untuk mencapai sasaran nasional.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid ini dapat dikatakan cukup berani dalam mengambil resiko. Melihat iklim politik yang demokratis untuk saat ini membuat Abdurrahman Wahid cukup percaya diri dalam mengambil prakarsa-prakarsa penting dalam bidang politik luar negerinya, terutama dalam memberi perhatian yang lebih besar kepada Asia meskipun tidak mengabaikan negara-negara barat dalam hubungan luar negerinya. Dapt dikatakan bahwa langkah baru Abdurrahman Wahid adalah sebagai adaptasi dengan lingkungannya yang sedang berubah. Dalam proses adaptasi ini, perubahan merupakan suatu keharusan dan oleh karena itu osensif diplomasi baru Abdurrahman Wahid harus lebih menekankan pada hak asasi. Untuk itu perlu

beberapa konteks harus diperhatikan oleh beliau. Beberapa konteks itu diantaranya:¹³¹

- a. Membangun kembali citra dan posisi internasional
- b. Membangun kembali kepercayaan masyarakat
- c. Menciptakan tantangan baru bagi Indonesia
- d. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang.
- e. Meningkatkan diplomasi Indonesia antara lain dengan memberi perhatian lebih besar pada faktor hak asasi
- f. Pencarian sumber-sumber investasi baru dari luar negeri.

Proses adaptasi Indonesia tersebut akan dinilai berhasil apabila proses tersebut dapat membawa suatu perubahan yang sangat berarti dan perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, alasan yang kedua adalah proses adaptasi tersebut menghapuskan kompartementalisasi dalam isu yang dihadapi dan prosedur formulasi kebijakan luar negeri. Hal tersebut setidaknya harus mendapat perhatian dari Abdurrahman Wahid, hal ini mengingat pada masa kepemimpinan beliau kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan.

F. Dampak Pemerintahan Abdurrahman Wahid Bagi Indonesia

Dampak dari kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia :

¹³¹ Bantarto Bandoro, *ibid.*, hlm. 403

F. 1. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid dibidang politik

Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid yang paling menonjol dibidang politik adalah mengenai pencopotan kabinet dalam pemerintahannya. Salah satu nama kabinet yang terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya itu adalah Hamzah Haz. Pencopotan Hamzah Haz dari menteri membuat perpolitikan Indonesia semakin memanas. Para elit politik mulai memberikan inspirasi akan kondisi Indonesia. Pada dasarnya mereka menilai pegangkatan dan pemecatan para menteri pada dasarnya adalah wewenang presiden. Akan tetapi persoalan akan menjadi tidak sederhana (mudah) apabila tidak ada penjelasan yang transparan dibalik pencopotan itu. Misalnya masalah pengunduran diri Hamzah Haz dari menteri, ironisnya Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa beliau ingin berkonsentrasi pada partainya.

Bagi masyarakat Indonesia yang semakin rasional dalam mencermati perkembangan politik nasional, alasan pengunduran diri atau pencopotan Hamzah Haz yang dikemukakan Abdurrahman Wahid tidak masuk akal. Bila dilihat momentum sebelumnya, alasan utama dari pencopotan Hamzah Haz dari menteri karena beliau diduga terlibat KKN.

Tindakan Abdurrahman Wahid ini sebenarnya akan menyebabkan bencana bagi dirinya. Bila masyarakat Indonesia mulai bisa melihat dan peka terhadap situasi politik Abdurrahman Wahid, maka kemungkinan rakyat akan menuntut. Hal ini tidak disadari oleh Abdurrahman Wahid. Ceplasan dan keterbukaannya masih mewarnai hidupnya hingga masyarakat menyadari bahwa pemerintahan yang dipegang oleh Abdurrahman Wahid ternyata memberikan implikasi yang buruk bagi situasi politik Indonesia waktu itu.

Lapisan masyarakat mulai sadar, bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid tidak fair (terbuka), banyak alasan-alasan dari kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan alasan yang sebenarnya. Beliau juga tidak memberikan kesempatan kepada orang yang diduga bersalah untuk membela dirinya. Selain itu Abdurrahman Wahid selalu memberi keputusan tanpa adanya penelusuran lebih lanjut, artinya keputusan dijatuhkan setelah beliau mendapat laporan dari beberapa orang saja. Hal ini memungkinkan keputusan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid tidak valid.

Alasan mengapa presiden Abdurrahman Wahid melakukan bongkar pasang kabinet adalah beliau ingin mencoba membangun sistem demokrasi dengan berpegang pada konstitusi. Seperti kita ketahui, pada mulanya kabinet Persatuan Nasional yang beliau bentuk setelah berkonsultasi dengan eksponen berbagai partai di DPR itu terdiri dari 25 menteri dengan komposisi 51 persen dari kalangan profesional dan sisanya dari militer. Namun ditengah jalan Abdurrahman Wahid merombak kabinetnya tidak kurang dari 15 kali karena berbagai tekanan dari luar maupun dari dalam partai. dengan menganggung resiko terburuk, maka beliau terpaksa menggati menterinya yang tidak segaris dengan visi kabinetnya bahkan pada saat kekuasaannya tinggal dalam hitungan hari.

Bongkar pasang kabinet ini tidak diperhitungkan secara seksama dan matang oleh Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid cukup berani mengambil resiko dalam pemerintahannya. Resiko yang paling besar yang diterimanya adalah mulai pupusnya kepercayaan dari masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid. Imbas dari kepercayaan

masyarakat Indonesia terhadap kinerja Abdurrahman Wahid adalah hasil kinerja pemerintahan yang juga tidak maksimal.

Pencopotan kabinet dalam pemerintahannya sebenarnya membuat Abdurrahman Wahid kehilangan fokus dan prioritas tentang apa yang akan dibangun. Untuk kesekian kalinya presiden Abdurrahman Wahid menebar ranjau bagi dirinya sendiri. Pencopotan dua menteri dalam pemerintahannya telah menimbulkan reaksi keras, tidak hanya dari dua partai besar tempat mereka berasal, melainkan dari pelaku usaha secara luas.

Mengganti menteri tidaklah melanggar konstitusi atau GBHN. Itu merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi, pergantian itu telah membukakan mata orang terhadap aspek lain dari sikap pribadi dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Lebih dari sekedar kemungkinan hilangnya dukungan partai-partai aspek lain justru bisa menjadi titik mati dari pemerintahannya. Aspek lain itu adalah:¹³²

- a. Sikapnya yang “semau gue” cenderung mendekati diktorial Abdurrahman Wahid benar belaka ketika mengatakan pergantian itu sebagai hak prerogatif secara konstitusional. Namun sesungguhnya tidak memiliki legitimasi demikian besar. Hal ini karena Indonesia tidak merupakan sistem presidensiil murni, yang memberikan mandat langsung kepada presiden. Bahkan presiden Amerika Serikat pun yang dipilih langsung dan karenanya memiliki legitimasi lebih besar harus meminta persetujuan senat. Untuk setiap menteri kabinetnya.

¹³² Arif Zulkifli, *Menggerogoti Fondasi, Membakar Rumah*, 2000. Tempo. Jakarta:PT. Dian Rakyat. hlm. 22-23

- b. Sikapnya yang tidak konsisten, mengesankan tengah membangun pemerintahan yang bersih, Abdurrahman Wahid menggusur Hamzah Haz, Allirahman Laksamana dan Jusuf Kalla karena alasan bersangkutan dengan korupsi. Jika serius ingin menegakkan pemerintahan yang bersih, Abdurrahman Wahid harus memerintahkan Kejaksaan Agung agar mengusut para menteri itu dan menjebloskannya ke penjara. Memecat mereka saja tidaklah penting.

Namun bila dicermati yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dapat dikatakan menyalahi aturan atau prosedur yang telah berlaku. Beliau mengambil tindakan atas kemauannya sendiri tanpa perhitungan lebih lanjut. Pemecatan menteri beliau lakukan sendiri dengan “menuding” secara langsung menteri-menteri yang didakwa terlibat korupsi. Abdurrahman Wahid tidak melakukan kerjasama dengan kepolisian ataupun kejaksaan. Ironisnya seorang presiden sesumbar menunjuk pencuri tanpa memerintahkan polisi menusutnya dan menjebloskannya dalam penjara.

Apabila Abdurrahman Wahid bisa teliti dan cermat dalam mengambil suatu langkah atau tindakan, ini dimungkinkan kredibilitas dirinya akan tetap dikagumi oleh kalangan rakyat Indonesia. Akan tetapi jika beliau sering bertindak senonoh tanpa pertimbangan-pertimbangan panjang dimungkinkan kredibilitas dari Abdurrahman Wahid menurun dan kemungkinan terpuruk beliau akan dipecat menjadi presiden Indonesia.

F. 2. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang ekonomi

Dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid adalah semakin lemahnya kurs rupiah. Lemahnya kurs rupiah ini disebabkan oleh pernyataan-pernyataan politik yang kontroversial. Dan pernyataan-pernyataan politik kontroversial ini menjadi pemicu melemah dan bergejolaknya kurs rupiah. Di sisi lain pasar juga kurang menyukai figur Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden. Alasan pasar tidak menyukai figur Abdurrahman Wahid menjadi presiden adalah :¹³³

1. Pasar mencurigai itikad baik atau keseriusan kelompok poros tengah untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid dan PKB kurang harmonis. Pasar mencurigai bahwa pencalonan tersebut hanya sebuah “akal-akalan” saja untuk mempertentangkan atau menjebak Abdurrahman Wahid , PKB dan NU yang sebelumnya sudah mendukung Megawati dan PDI-P untuk memimpin pemerintahan baru.
2. Pasar memang lebih menyukai figur Megawati Soekarnoputri untuk di presiden daripada Abdurrahman Wahid dan B. J. Habibie.
3. Sikap Abdurrahman Wahid yang sering *mencla-mencle* dan terkadang sulit dipahami oleh pelaku pasar sehingga membuat pasar ragu akan kapabilitas Abdurrahman Wahid untuk menjadi seorang presiden

Selain itu, pasar juga bereaksi negatif terhadap pergantian menteri yang memiliki pengaruh besar dibidang ekonomi yaitu Jusuf Kalla dan Laksamana

¹³³ Budi Widianarko, dkk. *Mengurangi Belitan Krisis*. 2002. Yogyakarta: Kanisius

Sukardi. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kinerja Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi jelek?

Pasar tidak pernah berbohong. Bahkan kepada presiden Abdurrahman Wahid. Hal itu terlihat ketika presiden mengganti menteri Perindustrian dan perdagangan Jusuf Kalla dan menteri negara atau penanaman modal atau pembinaan BUMN Laksamana Sukardi. Esok hari setelah pengumuman, Indeks bursa Jakarta langsung terpangkas menjadi 2, 2 persen dan rupiah melemah sampai Rp. 8.000,00 per dolar, batas psikologis yang tidak pernah terobek enam bulan terakhir. Kondisi ini sangat berbeda dengan ketika presiden Abdurrahman Wahid mencopot Hamzah Haz, Alirahman dan Wiranto. Hal ini disebabkan tiga menteri itu tidak menduduki posisi penting terutama dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, kali ini lain. Reaksi pasar yang negatif ini terutama berkaitan dengan pencopotan Laksamana Sukardi. Banyak ekonom dan analis melihat Laksamana sudah berada di tempat yang tepat. Dia menteri yang memiliki visi. Namun, yang menyebabkan pasar sama sekali menjadi tidak ramah kepada Indonesia adalah penggantinya. Hal inilah yang membuat pasar menilai bahwa presiden Abdurrahman Wahid tidak konsisten dalam menegakkan supremasi sipil. Padahal, sebelumnya presiden dianggap sukses ketika menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Jenderal Wiranto secara mulus. Dengan melakukan pergantian itu, Abdurrahman Wahid dianggap mencari musuh baru di dua partai besar, yakni PDI Perjuangan dan Golongan Karya.¹³⁴

¹³⁴ M. Taufikgurohman. *Akhir dari Bulan Madu*. 2000. TEMPO. Jakarta:PT. Dian Rakyat. Hlm. 24

Bagaimanapun kedua partai itu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam pengumpulan suara pada pemilu 1999 lalu. Lebih dari itu, jika digabung, kedua partai itu dapat menguasai lebih dari separoh kursi MPR. Dan ini bisa memunculkan ketidakstabilan politik, jika keduanya menarik diri dari kabinet. Kalaupun sekarang rupiah dan bursa sudah mulai pulih kembali ke posisi sebelumnya, itu lebih banyak karena intervensi Bank Indonesia. Respon pasar yang begitu gawat, sebetulnya tidak terlepas dari ketidakjelasan Presiden Abdurrahman Wahid mengganti kedua pembantunya. Semula dia hanya mengemukakan bahwa ketidak kompakkan tim ekonomi sebagai alasan utama pengantinya itu. Namun dalam pertemuan konsultasinya dengan DPR Kamis pagi, presiden menyebut pula alasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Repotnya tidak semua kalangan bisa menerima bahwa kinerja dari Jusuff Kalla dan Laksamana Sukardi itu cukup baik. Mereka berdua memiliki visi dan tolak ukur yang cukup jelas.¹³⁵

Menurut para ahli ekonomi kunci utama dari para menteri terutama menteri yang terlibat langsung di bidang ekonomi adalah menteri tersebut harus memiliki visi yang kuat dan bekerja sesuai dengan visi itu.

Ada penilaian yang menyatakan bahwa kinerja tim ekonomi bisa semakin melemah karena yang diganti bukanlah faktor terlemah dalam mata rantai tim ekonomi pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, misalnya pergantian menteri tanpa melihat hasil kinerja. Artinya para menteri yang oleh Abdurrahman

¹³⁵ M. Taufigurhman. *Ibid.*, Hlm. 25

Wahid menteri tersebut dipaksa untuk mengundurkan diri, sebaliknya para menteri yang seharusnya sudah layak diganti malah tetap dipertahankan.

Sebenarnya problem utama dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pada sosial penegakan hukum. Indonesia harus memprioritaskan soal penegakan hukum ini, karena yang banyak dikomplain oleh IMF adalah soal hukum. Sayangnya, yang dilakukan oleh presiden Abdurrahman Wahid adalah mengganti menteri ekonomi. Lebih celaka lagi yang diganti adalah menteri yang kinerjanya masih lebih baik daripada penggantinya. Dampaknya pasar mulai khawatir dengan keadaan tersebut. Pasar disini sebenarnya tidak pura-pura. Jatuhnya rupiah ke level rendah bukanlah sinyal palsu yang dilontarkan pasar. Sebaliknya para investor mengirim sinyal kepada pemerintahan Abdurrahman Wahid agar berhati-hati. Kurangi bercanda dan harus mulai serius. Bulan madunya sudah selesai dan saatnya untuk bekerja keras. Jika Abdurrahman Wahid tetap pada gayanya, boleh jadi sinyal negatif benar-benar akan menjadi berita buruk bagi bangsa Indonesia. Bisa jadi pada masa yang akan datang toleransi masyarakat akan semakin kecil jika presiden Abdurrahman Wahid salah melangkah.

Bila dicermati langkah-langkah Abdurrahman Wahid bisa menimbulkan masalah besar. Mengapa demikian? Apabila yang diberhentikan adalah menteri-menteri yang tidak terkait (memiliki hubungan) dengan partai tertentu maka tidak akan menimbulkan masalah besar. Namun, persoalannya menjadi lain jika yang diberhentikan adalah tokoh dari partai besar seperti Laksamana Sukardi (dari PDI) dan Jusuf Kalla (dari Golkar). Sebab pemecatan itu akan mengurangi dukungan partai-partai besar pemilu 1999 terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Barangkali semua tahu pengangkatan dan pemberhentian para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi menjadi tidak sederhana apabila mengingat bahwa kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid dengan Megawati Soekarnoputri ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung dan pimpinan partai ternyata yang waktu itu dipegang oleh Jenderal Wiranto. Problematik dalam kabinet Persatuan Nasional tampaknya terletak disitu. Yakni kecenderungan Abdurrahman Wahid menyusun suatu kabinet politik di satu pihak dan persetujuan partai-partai besar untuk terlibat di dalamnya di lain pihak jauh hari sebelumnya para pengamat sudah mengingatkan besar resiko yang harus dihadapi kabinet yang sangat berwarna politik. Kini Abdurrahman Wahid menghadapi buah simalakama yang artinya meneruskan “tradisi” bongkar pasang atau mempertahankan format kabinet apa adanya. Dua pilihan itu sama berat bagi Abdurrahman Wahid.

Namun keliru kalau dikatakan kinerja pemerintahan yang buruk itu semata-mata kesalahan Abdurrahman Wahid. Partai-partai politik yang memiliki menteri dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya ikut bertanggung jawab atas kinerja kabinet yang amburadul.¹³⁶

Secara teoritis keberadaan pemerintahan presidensiil sebenarnya tidak sepenuhnya tergantung pada dukungan partai-partai. Masa kerja pemerintah bersifat paket selama lima tahun dan presiden berhak menentukan sendiri para menterinya. Akan tetapi karena sejak awal Abdurrahman Wahid terlanjur melibatkan partai, setiap pergantian anggota kabinet yang berasal dari sutau partai tentu kurang beresiko akan dukungannya tergantung di DPR. Meskipun demikian,

tidak berarti pula bahwa partai-partai bisa mengedepankan Sidang Istimewa. Apalagi ternyata presiden tidak melanggar konstitusi dan GBHN.¹³⁷

Tradisi berdemokrasi tidak bisa dibangun diatas suasana saling curiga diantara para elit politis. Di sini sangat dibutuhkan suasana saling percaya yang dilembagakan melalui mekanisme demokratis yang disepakati bersama melalui DPR. Begitu pula cita-cita pemerintah yang bersih tidak mungkin diwujudkan tanpa konsisten, transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Keberadaan DPR yang dihasilkan melalui pemilu menjadi mubazir apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh partai-partai sebagai forum bagi penyamaan persepsi. harus disadari, masyarakat kita dewasa ini sudah jenuh dan lelah dengan berbagai pernyataan elit politik yang membingungkan. Masyarakat yang masih terpuruk akibat krisis ekonomi menunggu pemerintah dan DPR-nya sungguh-sungguh bekerja bukan bersilang pendapat yang tidak produktif yang bisa mengundang otoritarianisme baru.

F. 3. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang keamanan

Dampak dari pemerintahan Abdurrahman Wahid Di bidang keamanan adalah:

1. Karena kurang serius dalam menangani masalah-masalah disintegrasi, maka semakin buruknya situasi di beberapa daerah yang sedang berkonflik

¹³⁶ Syamsudin Haris. *Kabinet Maju Kena Mundur Kena*. 2000. TEMPO. Jakarta:PT. Dian Rakyat

¹³⁷ Syamsudin haris. *ibid.*, Hlm. 90

2. Banyaknya korban yang meninggal akibat bentrokan-bentrokan massa
3. Penduduk setempat banyak yang kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, tempat beribadah serta saudara-saudaranya.
4. Kondisi tersebut membuat masyarakat hidup tidak nyaman dan ketakutan
5. Banyak penduduk kehilangan bahan makanan
6. Harga-harga kebutuhan pokok mulai mahal.
7. Kebijakan-kebijakan yang kurang efektif dapat menimbulkan protes
8. Rakyat Indonesia mulai tidak simpati terhadap pemerintah
9. Keterlambatan dalam penangan disintegrasi membuat konflik yang terjadi semakin memanas.
10. Gaya bicara yang terkesan “sembrono” sebenarnya akan menurunkan kredibilitasnya.

F. 4. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang sosial

Ketidakseriusan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di Indonesia membuat rakyat Indonesia semakin menderita. penderitaan akan sangat dirasakan terutama oleh masyarakat kelas bawah yang tidak tahu-menahu akan politik. Masyarakat selalu diwarnai atau diselimuti oleh kebingungan yakni akan dibawa ke mana kita.

Di samping itu kerugian yang sangat besar juga dirasakan oleh rakyat terutama rakyat yang berada diantara mereka yang berkonflik. Kerugian yang

didapat tidak hanya materi akan tetapi kerugian secara psikologis. Mayoritas masyarakat trauma untuk kembali ke daerahnya karena hidup mereka terancam.

Primordialismepun terjadi di beberapa suku atau daerah. mereka menganggap suku merekalah yang paling baik. Perang antar suku dan agama membuat banyak korban jiwa yang meninggal. Harga diri manusiapun seperti tak ternilai.

F.5. Dampak pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang hukum dan HAM

Di tanah air realitas politik dan hukum selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Buktinya, masih ada bagian dari masyarakat yang lebih berkuasa atas yang lain. Dominasi kekuasaan dan kekebalan mulai goyah, muncul berbagai upaya untuk mengembalikan dominasi lama, muncul tuduhan yang sebenarnya jauh dari kesadaran menegakkan hokum dan kemanusiaan serta keadilan.

Bila dilihat, pengusutan bagi praktik pelanggar HAM sebenarnya tidak bias diingkari keberadaannya. Persaingan politik nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk mengusut dan menghentikan praktik kemanusiaan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan bangsa ini adalah perjuangan menuju penghormatan kemanusiaan dan keadilan. Maka pengusutan dan pertanggung-jawabanlah yang akan menyelematkan bangsa ini dari berbagai kahancuran dan kehinaan. bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormat kemanusiaan.

Abdurrahman Wahid kurang peka terhadap argumen tersebut, hal ini menyebabkan pengusutan HAM waktu itu tidak memberikan hasil yang baik yaitu masyarakat yang aman, damai dan penuh persaudaraan. Sebaliknya peristiwa-peristiwa disintegrasi itu memunculkan beberapa argumen-argumen. Argumen ini mencoba menafsirkan mengapa kasus disintegrasi bangsa tidak dapat terselesaikan, melainkan terabaikan.

Ada dua persoalan penting yang membedakan mengapa kasus-kasus tersebut cenderung terabaikan :

1. Ada kecenderungan bahwa sistem politik, hukum dan ketatanegaraan banyak berorientasi pada kebutuhan melayani pejabat negara daripada kepada rakyat.
2. Konflik antar masyarakat cenderung mudah dimanipulasi untuk kepentingan pergesekan antar elit politik. Hal ini tentu membuat konflik horizontal memiliki potensi bagi konsolidasi politik dan lemahnya kontrol masyarakat atas perilaku alat negara.

Inti dari bab 4 adalah menjelaskan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Disamping itu dalam pemerintahan juga diuraikan tentang Politik Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden RI. Adapun pemerintahan Abdurrahman Wahid dibedakan menjadi beberapa bidang yaitu bidang politik, terlaksananya *reshuffle* kabinet yaitu dicopotnya Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi dari jajaran menteri karena diduga terlibat korupsi. Bidang ekonomi, ditandatanganinya surat

kesepakatan bersama atau LøI oleh Abdurrahman Wahid dan IMF pada tanggal 20 Januari 2000. Bidang keamanan, realisasi kebijakan Abdurrahman Wahid dibidang keamanan belum berjalan dengan baik. Bidang social diantaranya adanya kebebasan berfikir dan berpendapat dikalangan mahasiswa, yang ke 2 adanya pemisahan tugas antara negeri dan swasta artinya Depdiknas hanya melakukan rintisan-rintisan dan membuat suatu rancangan atau konsep sedangkan pihak swasta sebagai operasionalnya. Bidang Hukum dan HAM yaitu penghapusan disintegrasi antar sesame manusia Indonesia terutama masalah etnis. Hal ini terbukti dengan diakuinya hari raya Imlek sebagai hari tahun baru Cina. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Abdurrahman Wahid dan Megawati dibantu oleh kabinet. Kabinetnya dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 menteri. Disamping politik dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden Abdurrahman Wahid juga mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain diantaranya Israel, Cina, India dan Jepang. Hubungan tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis. Adapun dampak dari pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid adalah, bidang politik *reshuffle* kabinet menimbulkan banyak inspirasi baik di jajaran elit politik maupun masyarakat pada umumnya karena tidak ada penjelasan secara transparan di balik pencopotan dan pengangkatan kabinet. Bidang ekonomi, kurang tegasnya dalam memberi keputusan dan memberi pernyataan membuat pasar atau para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia disamping itu pasar telah meragukan kapabilitas dari kepemimpinana Abdurrahman Wahid. Bidang keamanan, karena kurang serius dalam menangani

masalah-masalah disintegrasi, maka semakin buruk situasi di beberapa daerah yang sedang berkonflik. Bidang social masih ada primordialisme terjadi di beberapa suku dan daerah. Bidang Hukum dan HAM pengusutan masalah KKN dan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid belum terlaksana dengan baik.



BAB V

**JATUHNYA ABDURRAHMAN WAHID
SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**



Berhentinya Abdurrahman Wahid sebagai presiden bersumber pada :

A. Faktor Politik

1. Keruwetan yang terjadi setelah reformasi berjalan dua setengah tahun dengan fokus utamanya adalah tentang sistem ketatanegaraan terutama masalah konstitusi dan peraturan pelaksanaannya. Seperti yang diketahui dua hal tersebut (baik yang lama maupun yang sekarang) masih menjadi acuan bagi kehidupan bernegara.
2. Terjadinya berbagai konflik diantara para elit politik yaitu presiden, MPR dan DPR. Para elit politik ini berselisih paham atau berbeda interpretasi atas pasal-pasal tertentu dari konstitusi itu. Dan konflik-konflik tersebut sangat mengganggu bahkan kontraproduktif bagi proses reformasi.

Apabila kita sebagai warga negara Indonesia dan pemimpin bangsa sebaiknya kita menyadari dan secara serius memberikan skala prioritas pada usaha-usaha perbaikan terhadap system ketatanegaraan itu. Namun hal ini ternyata hanyalah ungkapan dari beberapa orang yang begitu antusias akan keadaan Indonesia.

Hal ini dapat dilihat bahwa sejak memasuki abad ke-21 khususnya dalam triwulan yang pertama tahun 2001, perkembangan politik Indonesia masih diwarnai perseteruan para elit politik, khususnya antara legislatif dan

eksekutif. Dari luar tampak seakan-akan legislatif dan eksekutif ingin menunjukkan kiprahnya yakni menjalankan fungsi, wewenang dan hak masing-masing sesuai konstitusi. Namun dibalik itu semua secara transparan juga diperlihatkan bahwa dalam menjalankan fungsi, wewenang dan hak tersebut mereka lebih menonjolkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya yang tercipta bukan solusi atas permasalahan bangsa, melainkan munculnya konflik-konflik baru yang menyebabkan krisis politik yang tidak berkesudahan.¹³⁸ Dan persetujuan antar elit politik tersebut akan terus berlangsung sepanjang para elit politik tetap mempertahankan sikap dan gayanya masing-masing. Mulai dari sikap yang tidak taat konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya hingga sikap yang tidak mau kompromi dan saling menyalhakan satu sama lain.

Latar belakang inilah yang membuat Indonesia menjadi semakin buruk, terutama memasuki tahun keempat dari gerakan reformasi di mana pada saat itu kondisis dan situasi politik Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Meski demikian, presiden Abdurrahman Wahid juga masih saja melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang justru menambah peliknya situasi politik di tanah air. Salah satu pernyataan yang dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid dan pernyataan tersebut dianggap controversial adalah ketika beliau menyatakan bahwa sekarang ini krisis politik di tanah air sudah selesai (berakhir). Padahal kenyataannya tidak demikian. Seperti yang diketahui bahwa saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden, krisis yang

¹³⁸ I Made Leo Wiratma. *Kemelut Politik Demokrasi dan Konstitusi*. 2001. ANALISIS CSIS, tahun XXX/2001. No. 1CSIS : Centre For Strategic and International Studies. hlm. 14

melanda Indonesia belum dapat terselesaikan dan belum berakhir. Sebaliknya rakyat Indonesia sudah tidak percaya pada pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Hal itu juga ditandai dengan adanya jaminan akan tidak adanya “serangan politik” oleh kubu-kubu yang selama dikenal kontra terhadap pemerintah. Jaminan tersebut telah diungkap oleh kelompok politik besar yakni PDI-P, Golkar dan PAN. Padahal sehari sebelumnya presiden Abdurrahman Wahid menengarai bahwa terdapat 16 orang yang berhasrat untuk menjatuhkan dirinya dari kursi kepresidenan. Mereka terdiri dari empat kelompok yaitu :

- a. Kelompok yang sangat berambisi kepada kekuasaan
- b. Kelompok orang yang takut kepada tuntutan hukum karena kesalahannya
- c. Kelompok *status quo* dan pendukung mantan presiden Soeharto
- d. Kelompok garis kelas yang menggunakan Islam untuk kepentingan pribadi

Pernyataan Abdurrahman Wahid yang pertama sebetulnya dimaksudkan untuk meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa masih ada peluang untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa, apabila partai-partai besar tidak terus menerus “menjegal” pemerintahannya. Sebab tanpa dukungan kekuatan-kekuatan politik besar tersebut, pemerintahan Abdurrahman Wahid akan sulit menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk membuktikan apakah kekuatan-kekuatan politik besar tersebut memang telah

“mendukungnya” maka Abdurrahman Wahid melakukan trik yang telah menarik.¹³⁹

Abdurrahman Wahid memancing reaksi kekuatan-kekuatan politik besar itu dengan menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan politik besar tersebut telah memberi jaminan tidak akan menyerang pemerintahannya. Reaksi yang kemudian muncul ternyata secara kelembagaan kekuatan-kekuatan politik tertentu dinilai sebagai jaminan seperti itu. Jaminan yang diberikan orang-orang tertentu dinilai sebagai jaminan masing-masing pribadi orang dan bukan jaminan institusi (Partai). Dengan demikian, pernyataan Abdurrahman Wahid yang pertama sebenarnya dimaksudkan untuk mengkonfirmasi pernyataan kedua, yang menyatakan bahwa memang terdapat kelompok-kelompok politik besar tadi tidak memberikan dukungan kepada Abdurrahman Wahid. Hal ini tentu akan lebih memperjelas posisi masing-masing, Abdurrahman Wahid dan pendukungnya disatu pihak dan kelompok anti-Abdurrahman Wahid dipihak lain.

Konflik yang semua hanya terjadi diantara para elit politik itu mulai berkembang menjadi konflik antar kelompok, bahkan meluas hingga terjadi kerusuhan massal yang bisa dengan mudah terjadi setiap waktu. Di sini masing-masing kelompok melakukan aksi-aksi yang kemudian di-counter oleh kelompok yang berseberangan, begitu juga sebaliknya aksi-aksi yang pro maupun kontra terus berlangsung, baik yang dilakukan secara damai maupun dengan cara-cara intimidasi hingga tindak kekerasan secara fisik.

¹³⁹ Leo Wiratma. *ibid.*, hlm. 15

Aksi damai yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik adalah demonstrasi atau melalui pernyataan-pernyataan politik, sedangkan aksi intimidasi dilakukan dengan mendatangi kantor atau rumah tinggal seseorang yang disertai penghinaan atau ancaman-ancaman. Hal ini menyebabkan aksi yang semula damai sering berubah menjadi tindakan kekerasan fisik atau anarkis karena berbagai sebab, antara lain karena provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada hakekatnya aksi-aksi menyampaikan pendapat dan aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari partisipasi politik. Namun, dalam perkembangan yang terjadi saat ini sangat sulit untuk membedakan apakah aksi-aksi tersebut murni dilakukannya kesadaran sendiri atau karena desakan pihak lain. Apabila aksi-aksi tersebut dilakukan karena adanya desakan, maka yang terjadi adalah mobilisasi (massa) dan bila mobilisasi (massa) tersebut dilakukan untuk membela kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai politisi massa. Pada tataran ini yang muncul bukan proses adu konsep sebagaimana prinsip demokrasi melainkan saling “adu otot” atau kekuatan sehingga siapa yang kuat dialah yang menang. Dan aksi-aksi kekerasan yang tidak diinginkan inilah justru yang terjadi.¹⁴⁰

Sebab lain yang menyebabkan Abdurrahman Wahid tidak menjadi presiden, antara lain :¹⁴¹

¹⁴⁰ Leo Wiratma. *ibid.*, Hlm. 16

1. Pemilihan dan Pengangkatan Ketua MA

Pemilihan dan pengangkatan ketua MA ini membuat Abdurrahman Wahid harus turun jabatan. Abdurrahman Wahid menolak secara resmi, sehingga pengangkatan ketua MA pun mengalami kebuntuan.

Penolakan ini sebetulnya tidak mengejutkan dan sudah dapat dijaga dari pernyataan-pernyataan presiden Abdurrahman Wahid sebelumnya yang disampaikan secara lisan. Isyarat pertama penolakan terhadap calon ketua MA itu adalah ketika Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa MA tidak boleh orang partisispan dan yang loyal pada rezim lalu (orde baru). Adapun dua calon Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh DPR bernama Muladi dan Bagir Manan. Dua calon ini pernah menjabat sebagai ketua MA ketika rezim orde baru berkuasa. Pernyataan inilah kemudian memicu pro dan kontra (polemik).¹⁴²

Hal ini memunculkan beberapa argumen diantaranya datang dari kalangan DPR dan pihak yang menentang penolakan presiden. Mereka berpendapat bahwa presiden tidak bisa menolak melainkan harus memilih salah satu dari calon yang diusulkan oleh DPR. Kendati presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk dapat memilih ketua MA dari calon yang diusulkan DPR, tetapi hak itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada alasan yang masuk akal kenapa memilih dan menolak seseorang. Untuk itu presiden harus berhati-hati dalam memilih ketua MA. Presiden harus bisa menentukan siapa ketua MA yang benar-

¹⁴¹ *Idem.*

benar bisa dipercaya untuk menjalankan amanat reformasi. Penentuan ketua MA harus memprioritaskan figur yang tepat bukan sekedar mengutamakan proses pemilihannya, sebab yang menjadi salah satu gugatan reformasi adalah perlunya perbaikan item atau dibentuk suatu sistem baru yang lebih demokratis. Dengan sistem yang demokratis diharapkan produknya juga demokratis dan *legitimate* (telah diakui secara sah). Apabila ternyata hasil akhir dari pencalonan ketua MA tidak memenuhi kriteria seperti yang dituntut reformasi, maka yang keliru tentu sistemnya atau prosesnya yang tidak sesuai dengan sistem.

2. Memorandum DPR

Memorandum DPR ini dapat dikatakan sebagai pemicu berakhirnya kekuasaan Abdurrahman Wahid, disamping sebagai klimaks dari persetujuan antara DPR dan presiden Abdurrahman Wahid. Memorandum ini dikeluarkan oleh DPR untuk mengingatkan presiden.

Adapun posisi partai politik yang menghadiri rapat paripurna DPR yaitu FPDI-P (Fraksi demokrasi Indonesia Perjuangan), FPG (Fraksi Partai Golkar), FPP (fraksi Persatuan Pembangunan), FR (Fraksi Reformasi), FTNI (Fraksi Tentara Nasional Indonesia), FPBB (Fraksi Partai Bulan Bintang), FKKI (Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia), FPDU (Fraksi partai daulat Ummat) ini menyatakan menerima hasil laporan Pansus (Panitia Khusus), sedangkan 2 fraksi yaitu FKB (Fraksi Kebangkitan

¹⁴² Leo Wiratma. *Ibid.*, Hlm. 17

Bangsa) dan FPDKB (fraksi Partai demokrasi Kasih Bangsa) menyatakan menolak.¹⁴³

Adapun komposisi hasil voting tersebut, PDI-P 133 anggota menerima hasil laporan pansus, kemudian 108 FPG, 50 FPP, 40 FR, 38 FTNI, /Polri, 12 FPBB, 2 FKKI, 9FDU, 1 (non fraksi).¹⁴⁴

Dengan demikian perdebatan tentang legal dan ilegalnya pansus berakhir, bahkan mayoritas fraksi menginginkan hasil kerja pansus ini segera ditindaklanjuti, sebagai konsekwensi yaitu diberlakukannya memorandum atau peringatan kepada presiden.

Sebetulnya memorandum DPR dan SI-MPR bukan hal yang luar biasa. Melainkan persoalan ketatanegaraan yang biasa, pertama memorandum DPR dan Sidang Istimewa MPR telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bangsa Indoneia sudah pernah mengalami kedua peristiwa itu.¹⁴⁵

Memorandum DPR kedua pada tanggal 1 Februari 2001 yakni pada masalah dana Yanatera Bulog yang berisi pemberian dana sebesar 35 miliar dari Sultan Hasanal Bolkiah yakni eksistensi dari pansus dan cara kerjanya masih dipertanyakan apakah legal atau tidak. Polemik ini terjadi sebagai akibat kurangnya pemahaman atas aturan mengenai hak angket DPR. . Hal kedua yang perlu mendapat perhatian adalah prosedur tata kerja pansus. Sepanjang pansus Buloggate dan Brunaneigate melaksanakan tugasnya, DPR sebagai lembaga telah sekurang-kurangnya

¹⁴³ -----, *Terkena Memorandum Gus Dur Terjepit*, dalam [http://www. indomeia.com/bernas/022001/02/UTAMA/02utaa. htm](http://www.indonesia.com/bernas/022001/02/UTAMA/02utaa.htm)

¹⁴⁴ *Idem.*

tiga pelanggaran atau kelalaian terhadap perturan tata tertib yang dibuatnya sendiri.¹⁴⁶

- a. DPR tidak menyampaikan keputusannya tentang pembentukan, tugasnya penyelesaian dan biaya pansus kepada presiden.
- b. DPR tidak pernah menyampaikan laporan tertulis pansus yang dibuat secara berkala minimal sekali sebulan kepada presiden.
- c. DPR tidak pernah menyampaikan kepada presiden mengenai keputusan akhir rapat paripurna DPR atas pansus.

Demikian pula ketika mengambil keputusan akhir atas laporan pansus, DPR telah melakukan langkah yang tidak obyektif, karena baik dari segi hukum maupun politik dapat diklasifikasikan sebagai tindakan manipulatif. Dalam kesimpulan hasil kerjanya, pansus DPR merekomendasikan dua hal yaitu :

- a. Dalam kasus dana Yanatera Bulog, presiden Abdurrahman Wahid patut diduga terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog.
- b. Dalam kasus Bruneigate, Abdurrahman Wahid dinilai kontroversial oleh DPR dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya yang berkaitan dengan masalah bantuan kemanusiaan Sultan Brunai untuk rakyat Aceh. Maksudnya presiden telah menerima bantuan dari Sultan Brunai, akan tetapi bantuan itu tidak dilaporkan dalam lembaran negara atau berita negara.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 1 Februari 2001 di mana saat itu DPR memutuskan menyetujui dan menerima hasil!

¹⁴⁵ Leo Wiratma. *ibid.*, Hlm. 19

¹⁴⁶ Leo Wiratma. *ibid.*, hlm.21

kerja pansus Buloggate dan Bruneigate. Namun yang mengejutkan adalah tindak lanjut dari keputusan tersebut yakni:¹⁴⁷

- 1) Berdasarkan ketetapan MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara yaitu UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan, kedua Presiden telah melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, DPR menyerahkan persoalan ini untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan-keputusan tersebut ternyata memberikan kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan terjadi antara keputusan DPR untuk menyetujui dan menerima hasil kerja pansus Buloggate dan Bruneigate dengan tindak lanjut keputusan tersebut. Paling tidak ada dua kejanggalan dalam hal ini yaitu :

- 1) Bagaimanapun mungkin orang memiliki status “terdakwa” atau patut diduga dan hanya karena tidak konsisten dalam pernyataan-pernyataannya sudah divonis telah sungguh melanggar haluan negra.
- 2) Tidak dijelaskan mana tindakan presiden Abdurrahman Wahid yang melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan mana yang

¹⁴⁷ I Made Leo Wiratma, *op. cit.*, hlm. 21

melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Agar persoalan menjadi jernih maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:¹⁴⁸

- a) Perlu dijelaskan dan dibuktikan terlebih dulu seberapa jauh keterlibatan presiden Abdurrahman Wahid dalam pencairan dana Yanatera Bulog.
- b) Langkah selanjutnya yaitu menindaklanjuti apakah keterlibatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melanggar sumpah jabatan yang tercantum dalam pasal 9 UUD 1945 dan/atau tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga dia dapat dikatakan telah melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- c) Abdurrahman Wahid harus dibuktikan apakah benar-benar telah menerima bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh dari Sultan Brunai. Apabila benar, apakah tindakan menerima bantuan tersebut dikategorikan melanggar sumpah jabatan sesuai dengan pasal 9 UUD 1945 dan/atau melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Jika kedua hal itu tidak dapat dibuktikan maka berarti DPR telah melanggar praduga tak bersalah. Peliknya konflik antara elit politik yang terfokus pada perebutan kekuasaan telah mencapai klimaks yaitu dengan diselenggarakannya Sidang Umum MPR pada tanggal 21-26 Juli 2001,

¹⁴⁸ I Made Leo Wiratma, *Kemelut Politik, Demokrasi dan Konstitusi*, CSIS; Centre of strategic and International Studies. hlm. 18

dengan agenda utama adalah meminta pertanggungjawaban Abdurrahman Wahid. Sementara itu presiden Abdurrahman Wahid memberlakukan dekrit sebagai perlawanan politiknya terutama di DPR dan MPR. Dekrit ini mulai diberlakukan oleh Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli dini hari yang isinya :¹⁴⁹

- a) Membekukan MPR-RI dan DPR-RI
- b) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam satu tahun
- c) Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MA.

Abdurrahman Wahid memberlakukan dekrit sebagai perlawanan politik yang terakhir dalam rangka menghadapi lawan politiknya terutama di DPR dan MPR. Akan tetapi presiden Abdurrahman Wahid sendiri tidak mampu melawan tekanan politik tersebut.

Pemberlakuan dekrit tersebut bila dicermati sebenarnya bisa menghanjurkan kredibilitasnya sebagai presiden. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan dekrit tersebut dari MPR dengan alasan :¹⁵⁰

- a) Dijelaskan dalam UUD 1945 angka VII. yang menyatakan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan

¹⁴⁹ M. Djadjono, *ibid.*, hlm. 225

¹⁵⁰ M. Sudibjo, *Proses Menuju SI MPR dan Masalah Ketatanegaraan RI*. 2001. CSIS: Centre of strategic and International studies. hlm. 114

oleh presiden oleh karena presiden tidak dapat membekukan DPR. apalagi membekukan MPR.

- b) Pembentukan badan guna menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun adalah kewenangan MPR. Ini didasarkan pada Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
- c) Pembekuan Partai Golkar oleh presiden itu mencampuri kewenangan Badan Peradilan dan tindakan presiden itu bertentangan dengan UU No. 2/1999 tentang Partai Politik.

Ketidakmampuan Abdurrahman Wahid mengatasi persetujuan itu, membuat dirinya diberhentikan sebagai presiden RI lewat Sidang Istimewa. Persetujuan elit politik ini telah membawa serta permasalahan disekitar ketatanegaraan RI. Usaha penyempurnaan UUD 1945 telah menimbulkan masalah di sekitar konstitusi negara RI itu, baik mengenai substansinya seperti sistem pemerintahan, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif, hubungan antara agama dan negara maupun siapa yang berwenang melakukan perubahan (penyempurnaan) atas UUD 1945 itu. Hal ini terjadi karena adanya kelompok kepentingan yang singkat, supel dan sementara. Sifat UUD 1945 yang demikian itu menimbulkan multi-interpretasi yang sangat mungkin bersifat sangat subyektif, hanya sesuai dengan kepentingan atau menguntungkan pihak tertentu.

B. Faktor Sosial

Secara sosial, mundurnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan memberikan dampak yang buruk bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena selama Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden tuntutan masyarakat akan kehidupan nyaman, damai, tenteram dan bebas KKN belum terpenuhi. Ditambah lagi mundurnya beliau dari kursi presiden diawali dengan persetujuan para elit politik, yang mana hal ini akan memperburuk keadaan. Kemelut politik membuat orang tidak bisa berfikir jernih. Segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan. Manusia seakan-akan tidak memiliki harga.

Orientasi kehidupan berbangsa yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 seakan-akan tidak begitu diperhatikan oleh para elit politik. Mereka berjuang demi untuk partainya sendiri. Harapan rakyat hanya satu yaitu sikap demokratis yang menjunjung tinggi perbedaan pendapatan, kedamaian, kebersamaan dan musyawarah. Hal ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni: "Suatu negara yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur". Artinya rakyat Indonesia dalam negara Indonesia yang dibentuk itu ingin hidup dalam suasana kemerdekaan sejati, persatuan yang tulus, kedaulatan yang sejati serta dapat merasakan keadilan dan kemakmuran¹⁵¹

Persetujuan politik di tingkat elit politik memberikan konsekwensi bagi nasib rakyat menjadi terabaikan. Maraknya partai politik 1999 dan pemilihan presiden-wakil presiden (Gus Dur – Megawati) sedikit menjanjikan masa depan

¹⁵¹ F. Sihol Siagian, *Menggugat Orientasi dan Pluralisme Kita*, 2001, Jakarta: Yayasan Hidup Katolik.

kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata semua itu hanya sebatas harapan, keadaan Indonesia semakin buruk. Para elit politik berlomba menggulingkan lawan-lawan politiknya dan berusaha mendapatkan kekuasaannya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak korban jatuh, kaum nasionalis ‘berkelahi’ dengan kelompok fundamentalis. Selain itu teror-teror semakin marak, bom meledak di beberapa tempat. Masa transisi Gus Dur – Megawati ini merupakan bencana bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat hidup dalam ketakutan, kecemasan dan penderitaan.

Bila dicermati keinginan dari rakyat Indonesia adalah:¹⁵²

1. Segera keluar dari krisis multidimensi khususnya kemiskinan
2. Segera membangun kembali ekonomi
3. Menegakkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia
4. Agar setiap warga hidup sejahtera dan bangga menjadi warga Indonesia
5. Tetap utuh sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air Indonesia

Namun selama pemerintahan Abdurrahman Wahid , hal tersebut belum dapat terealisasikan dengan baik. Rakyat menjadi ragu akan kinerja dari pemerintahan Abdurrahman Wahid. Keraguan yang diberikan rakyat

¹⁵² A. Sandiwan Suharto, *Pro Gus Dur atau Mega*, 2001, Jakarta: Yayasan Hidup, hlm. 4.

Indonesia ini ikut mendorong Abdurrahman Wahid turun dari kursi kepresidenan.

C. Faktor Ekonomi

Penyebab turunnya Abdurrahman Wahid secara ekonomi antara lain:¹⁵³

1. Ketidakpercayaan pasar terhadap pengurusan ekonomi pemerintahan Abdurrahman Wahid .
2. Ketidakkonsistenan Abdurrahman Wahid dalam menangani masalah ekonomi Indonesia membuat dunia luar (pasar) “enggan” menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid yang sering berubah-ubah karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden cenderung sangat membingungkan publik.
4. Seringnya bongkar pasang kabinet, maka koordinasi pekerjaan tidak bisa dilakukan secara efektif. Di samping itu pergantian kabinet yang silih berganti ini sangat erat hubungannya dengan keadaan ekonomi.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa SI MPR tahun 2001 merupakan akhir Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden RI. hal ini disebabkan karena beberapa pihak telah menilai bahwa kinerja dari Abdurrahman Wahid kurang solid. Semua itu terjadi karena beberapa faktor yang merupakan pengaruh besar baginya, diantaranya:

▪ **Faktor Konstitusi (UUD)**

Prahara politik yang kita alami pasca Soeharto itu pada dasarnya bersumber pada kelemahan-kelemahan mendasar yang ada pada konstitusi yaitu UUD 1945.¹⁵⁴ Pelaksanaan SI MPR hanyalah sebagai dimensi dari peristiwa politik. Peristiwa yang tidak mungkin akan dihindari mengingat begitu tidak jelasnya beberapa pasal yang ada didalam konstitusi (UUD) kita. bagi negara besar seperti Indonesia tidaklah mungkin apabila suatu konstitusi hanya dirumuskan dalam waktu 20 hari. tentang waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin bisa merumuskan konstitusi bagi negara besar, kecuali ditulis dalam situasi yang menjepit dan tergesa-gesa. konstitusi bagi suatu negara meliputi konsep kekuasaan, hal-hal yang paling mendasar dalam suatu masyarakat dan yang terakhir bentuk-bentuk pemerintahan yang paling baik.

Secara riil didalam konstitusi inilah telah ditulis aturan-aturan yang menentukan posisi yang meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab antara presiden, MPR dan DPR. Hal ini juga disebabkan karena muncul beberapa penafsiran diantaranya dalam sistem presidensiil dimana seorang presiden memainkan peranan yang dominan dalam memutar roda pemerintahan, penafsiran kedua yaitu, menyatakan sistem pemerintahan yang dimaksudkan konstitusi kita sesungguhnya bersifat parlementer terutama dalam cara kerjanya.¹⁵⁵

¹⁵³ M. Sadli, *Ekonomi di Bawah Gus Dur dan Megawati*, 2001, TEMPO, No. 34, Tahun VII, 14 Juli 2001.

¹⁵⁴ Rizal Mallarangeng. *Peta Politik Indonesia*. 2001. CSIS: Centre for Strategic and international Studies. hlm. 15

¹⁵⁵ Rizal Mallaraeng. *ibid.* hlm15

Hal ini membuktikan mengapa Abdurrahman Wahid sering mengambil langkah-langkah soliter yang terkesan tidak mempedulikan para politisi di DPR. dari sudut ini bisa dijelaskan, karena beliau telah menafsirkan sendiri bahwa posisinya sama kuat sebagaimana layaknya *chief executive* dalam suatu sistem presidensiil.

▪ **Kelemahan Abdurrahman Wahid Sebagai seorang Pemimpin dalam Pemerintahan Modern Orde Baru**

Adapun kriteria dari seorang pemimpin pemerintahan modern adalah tangkas, populer, pandai memanfaatkan peluang untuk membangun dan konsensus dukungan politik. Sebagai contoh memanfaatkan posisi eksekutif yang memiliki peluang-peluang khusus memerintah dan bisa memperkecil dampak negatif dari cairnya dukunga-dukkungan yang ada diarena politik.¹⁵⁶

Namun prinsip ini berbeda dengan Abdurrahman Wahid, secara nyata hal itu belum diterapkan olehnya. buktinya beliau sering mengatakan banyak hal yang semestinya tidak dimengerti. beliau lupa pada batas-batas yang harus dijaga sepenuhnya oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seperti batas antara apa yang rasional dan irasional, apa yang bersifat umum dan pribadi, apa yang boleh dan tidak boleh dijadikan alat pencaturan kekuasaan. yang terlihat pada Abdurrahman Wahid setahun ini adalah upayanya yang hampir sepenuhnya tidak terpahami dan beliau terus mendapat musuh.

Inti dari bab 5 adalah sebab-sebab jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan antara lain karena terjadinya perseteruan antar elit politik yaitu DPR, MPR dan presiden terutama masalah pemilihan dan pengangkatan MA. Menurut Abdurrahman Wahid calon MA pernah menjabat sebagai ketua MA ketika Orde Baru berkuasa, disamping itu Abdurrahman Wahid tidak menginginkan orang partisipan dan loyal pada rezim lama (Orde Baru). Masalah yang kedua memorandum yang dikeluarkan oleh DPR tidak mendapat perhatian dari Abdurrahman Wahid dan Abdurrahman Wahid justru melakukan serangan balik dengan mengeluarkan dekrit untuk menghadapi lawan politiknya di DPR dan MPR. Pemberlakuan dekrit tersebut bila dicermati sebenarnya bisa menghancurkan kredibilitasnya sebagai presiden, karena dalam UUD 1945 disebutkan kedudukan DPR adalah kuat, presiden tidak bisa membekukan DPR dan MPR. Sedang sebab yang kedua adalah masalah sosial yaitu selama menjabat sebagai presiden Abdurrahman Wahid belum bisa memenuhi tuntutan rakyat Indonesia yang menginginkan kehidupan yang nyaman, damai, tenteran dan bebas dari KKN. Sebab yang ke 3 adalah kelemahan dari diri Abdurrahman Wahid sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan modern Orde Baru. Kelemahan Abdurrahman Wahid ini adalah ia tidak bisa memenuhi suarat-syarat dari seorang pemimpin pemerintahan modern yang tangkas, populer, pandai memanfaatkan peluang untuk membangun dukungan politik.

¹⁵⁶ Louis Gottschalk, *ibid.*, hlm 16

BAB VI PENUTUP

Abdurrahman Wahid adalah seorang politisi yang sangat demokrat. Hal ini dapat dilihat dari semua pernyataan-pernyataannya yang sangat mengejutkan banyak kalangan (manuver-manuver politiknya). Terpilihnya menjadi presiden RI yang keempat periode tahun 1999-2001 dapat memberikan gebrakan bagi perpolitikan Indonesia.

Latar belakang Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden RI adalah karena ia merupakan tokoh intelektual yang memiliki ide-ide yang sangat cemerlang, seorang tokoh yang demokrat, seorang tokoh muslim yang memiliki pendukung yang kuat dan mampu beradaptasi dengan kebudayaan setempat terutama masyarakat menengah kebawah, seorang yang memiliki sikap yang demokratis dan humanis, masih kuatnya ikatan-ikatan gender yang masih mempengaruhi dalam pemilihan presiden, pemerintahan B.J.Habibie yang dirundung masalah terutama masalah Bank Bali dan Timor Timur. Awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid mendapat sambutan yang sangat cemerlang dari rakyat Indonesia. Disini rakyat Indonesia menaruh harapan pada ia terutama dalam perubahan kondisi Indonesia yang sedang diselimuti oleh adanya krisis.

Untuk merealisasikan tugasnya, Abdurrahman Wahid dibantu oleh wakil presiden Megawati Soekarnoputri dengan beberapa jajaran kabinetnya. Kabinet yang dibentuk oleh kedua tokoh politik itu dikenal dengan sebutan kabinet

kompromi yakni kabinet yang dibentuk itu berdasarkan pada proses tukar menukar, melepas dan mengurangi sesuatu agar mendapat tambahan dari pihak lain. Anggota kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid ini melibatkan semua partai politik. Yang paling penting dari kabinet Abdurrahman Wahid adalah bagaimana masyarakat Indonesia dapat percaya pada kinerja dari kabinet tersebut.

Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid dalam skripsi ini diartikan sebagai rencana tindakan Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan masalah terkait dengan situasi konkrit. Adapun kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden RI dibedakan menjadi beberapa bidang antara lain bidang politik yaitu rencana perubahan susunan kabinet. Perubahan susunan kabinet ini dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dengan mengganti 2 menternya yaitu Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi. Bidang ekonomi yaitu dengan rencana memperluas dasar pengenaan pajak dan mengubah administrasi perpajakan melalui surat kesepakatan bersama (LoI). Bidang keamanan, Abdurrahman Wahid berusaha menetapkan berbagai keputusan dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi seperti mengadili pelanggar HAM, meyakinkan rakyat Aceh untuk menegakkan HAM. Bidang sosial, dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa Abdurrahman Wahid berencana menggunakan pendekatan secara intern terutama dengan para tokoh-tokoh daerah, bidang sosial lain adalah Abdurrahman Wahid ingin menerapkan kebebasan berfikir dan berpendapat di kampus serta dihapuskannya dikotomi antara swasta dan pemerintah. Bidang hukum dan HAM,

Abdurrahman Wahid ingin menghapuskannya disintegrasi bangsa terutama bagi etnis Cina atau Tionghoa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.6 tahun 2000 tentang kebebasan beribadat bagi orang Cina, ia juga ingin mencabut TAP MPRS No.XXV/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan marxisme serta komunisme.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam skripsi ini merupakan realisasi atau tindak lanjut dari kebijakan-kebijakannya. Pemerintahan Abdurrahman Wahid di bidang politik yaitu terjadinya pencopotan kabinet dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid yaitu Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi. Kedua menteri itu diduga telah terlibat korupsi. Bidang ekonomi, terjadinya kerjasama antara Abdurrahman Wahid dengan IMF melalui surat kesepakatan LoI yang telah ditandatanganinya pada tanggal 20 Januari tahun 2000. Bidang keamanan, kebijakan di bidang keamanan belum terealisasi dengan baik dalam pemerintahannya karena penyelesaian ia lebih pada penyelesaian masalah melalui militer daripada pendekatan secara intern. Bidang sosial, keberhasilan pemerintah Abdurrahman Wahid di bidang sosial adalah ada pembagian kerja antara swasta dan negeri dalam mengelola pendidikan sehingga diantara keduanya tidak terdapat persaingan. Bidang hukum dan HAM, dihapuskannya diskriminasi etnis Tionghoa dan Cina dengan diberlakukannya Instruksi presiden No.6 tahun 2000.

Dampak dari pemerintahan Abdurrahman Wahid bagi bangsa Indonesia, bidang politik pencopotan 2 menteri dalam kabinetnya membuat suasana perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Bidang ekonomi, sikap

Abdurrahman Wahid yang kontroversial membuat pasar dan para investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bidang keamanan, kurangnya serius dalam menangani masalah disintegrasi yang terjadi di Indonesia membuat masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan. Bidang sosial, dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid penderitaan masyarakat masih sangat terasa. Bidang hukum dan HAM, di bidang hukum Abdurrahman Wahid belum mampu mengatasi masalah-masalah kriminal terutama masalah KKN dan peradilan bagi pelanggar HAM, sedang di bidang HAM Abdurrahman Wahid telah berhasil menghapuskan disintegrasi untuk masyarakat Tionghoa dan Cina.

Faktor –faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi kepresidenan. Faktor politik, kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid kurang dapat memenuhi harapan publik. Sebagai bukti, mayoritas masyarakat Indonesia memandang bahwa penempatan para menteri tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini memberikan implikasi (dampak) diberbagai bidang terutama bidang politik dan ekonomi. Kabinet kompromi yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid lebih merupakan kabinet kompromi yang mengakomodasikan banyak segmen masyarakat dan kekuatan publik. Segi profesionalisme pada akhirnya kelihatan kurang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet, persetujuan antar elit politik yaitu antara presiden dan DPR. Faktor sosial, belum terpenuhinya tuntutan rakyat Indonesia akan kehidupan yang nyaman, damai, tenteram dan bebas KKN. Faktor ekonomi, ketidakkonsistenan

Abdurrahman Wahid dalam menangani masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia terutama masalah disintegrasi bangsa dan masalah ekonomi.

Faktor lain yang menyebabkan ia jatuh dari kursi kepresidenan adalah ia tetap optimis dalam menjalankan tugasnya. Bahayanya keoptimisan yang dimilikinya tidak disertai dengan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang profesional. Hal ini akan menurunkan kredibilitasnya dan Abdurrahman Wahid kurang menyadari hal itu, hingga akhirnya ia jatuh pada perangkapnya sendiri. Sebagai bukti saat ia mengambil suatu tindakan mengeluarkan dekrit pada detik-detik akhir pemerintahannya, dan dekrit inilah yang membawa ia pada tugas akhir sebagai presiden RI dimana ia dimintai pertanggungjawaban dalam Sidang MPR pada tanggal 21-26 Juli 2001.

Masyarakat Indonesiapun memandang bahwa kinerja dari pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak sesuai harapan. Disamping itu banyak pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya terlalu kontroversial dan lagi ia selalu memberikan keputusan-keputusan tanpa menindaklanjuti suatu masalah.

Perseteruan-perseteruan atas ketidakjelasan pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia namun juga dari kalangan elit politik yakni MPR dan DPR. Klimak dari perseteruan itu adalah seperti yang telah dijelaskan yaitu digelarnya Sidang Istimewa MPR pada tanggal 21-26 Juli 2001 yang meminta pertanggungjawaban dari presiden dan yang terakhir diberhentikannya Abdurrahman Wahid dari presiden RI.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bahar, *Biografi Politik Abdurrahman Wahid*, 1999, Jakarta: Bina Utama, hlm. 2
- Arend, Ljphart. *Sistem Pemerintahan Parlemen Dan Presidensiil Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1995, hlm. 5
- Arief Mudatsir Madan, *Sidang Umum MPR RI Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, 2000, Jakarta: FIS. hlm.42
- Berchover, Robert F. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York : A Free Prees Paperback. hlm. 25
- Edi Cahyono, *Indonesia Demokratisasi di Era Globalisasi*. 1999. Jakarta: Internasional Neo Forum On Indonesia Development. hlm. 32
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah (terj)*, 1986, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 32
- Jllianery, B.E. *Indonesia dalam Krisis*, 2000, Jakarta: _____hlm. 9
- Kansil,C.S.T. *Sistem Pemerintahan indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 21
- Koentowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Yayasan Benteng Budaya
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik*. 1987. Jakarta: Gramedia. hlm. 229
- Miriam Bidiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1993. Jakarta: Gramedia. Hlm. 50
- Pringgodigdo, A.K. *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD Dalam Teori dan Praktek*, Djakarta, pembangunan, 1956, hlm. 27
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 1992, Jakarta : PT Gramedia Widiasrama Indonesia, hlm. 113
- Rusadi Kantaprawiro. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. 1983. Bandung: Sinar Baru. hlm. 140
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1990. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 103
- Suwardiman. dkk. *Timor Timur, Aceh dan Papua 2002*. Jakarta: Buku Kompas. hlm. 265

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

_____ *Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI 2002*. Jakarta: Buku Kompas. hlm.303

Umaruddin Masdar, dkk. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar politik*. 1999. Yogyakarta: LKIS. hlm. 133



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Internet

-----, *Ensiklopedi tokoh Indonesia*. 2005 Hlm 1 dalam <http://www.tokohnasionalindonesia.com/ensiklopedi/a/abdulrachman-wahid/index.shtm!>

Mustafa Ismail, *Melawan Melalui Lelucon*, 2000 dalam *Tempo*. 2003:<http://www.gusdur.net/indonesia/detail.asp?catName=&contentOID>

Rizal Mallarangeng, *Tiga Faktor Penyebab SI MPR 2001* dalam *Kompas*: 22-07-01:<http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=115>

Rizal Mallarangeng, *Akankah Sejarah Berulang*, 2000 dalam *Kompas* 17-08-00:<http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=106>

Rizal Mallarangeng, *Ibid*, dalam *Kompas*, 20-11-99:<http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&individu=72>

-----, *Gus Dur Pahlawan HAM*, dalam <http://yyyyyy.blogspot.com>

Rizal Mallaraeng, *Akankah Sejarah Berulang* dalam <http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&id=106>

-----, *Ekonomi Pasca Gus Dur*, dalam http://www2.rnw.nl/rnw/id/tema/ekonomi.pasca_gus_dur.html.

-----, *Keluarnya Rp 35 Milyar atas Perintah Presiden*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0-10/18/UTAMA/kalu01>

-----, *Terkena Memorandum Gus Dur Terjepit*, dalam <http://www.indonesia.com/bernas/022001/02/UTAMA/02utaa.htm>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Majalah

- Al-Zastrow. *Profesionalisme Ala Gus Dur*. 1999. Jakarta: PT. Dian Rakyat. vol. XXVIII No.35-43. hlm27
- Arif Zulkifi, *Tegang di Aceh Bertemu di Jakarta*, TEMPO No.40/XXVIII/6-12 Desember 1999. hlm. 23
- . *Identitas Perlawanan Dari Aceh*. 2000. Jakarta:PT. Temprint. Tempo no. 44/ XXVIII/ 3-9 Januari 2000. hlm. 81-82
- , *Hentikan Pertikaian dan Pembantaian*,2000. Yayasan Hidup Katolik. hlm.17-18
- , *Menggerogoti Fondasi, Membakar Rumah*, 2000. Tempo. Jakarta: PT. Dian Rakyat. hlm. 22-23
- Bantarto Bandoro, *Politik Luar Negeri Abdurrahman Wahid*. 1999. Jakarta: Analisis CSIS. No. 4 /XVIII/1999
- Bere, Herman. *Pengungsi Timtim Kian Terpukul* 2000, Jakarta: Yayasan Hidup Katolik
- . *Gus Dur: Rektor Harus junjung Kebebasan Berfikir*. 2000 CSIS:Centre of Strategic and International Studies.hlm.44
- . *Gus: Depdiknas Jangan Jadi Saingan Sekolah Swasta*. 2000. CSIS:Centre of Strategic and International Studies.hlm.6
- Budi Widianarko, dkk. *Mengurangi Belitan Krisis*. 2002. Yogyakarta: Kanisius
- Djadijono,M. *SI MPR:Pemerintah Baru, Program Kerja dan Prospeknya*. 2001. CSIS: Centre of strategic and International Studies. hlm. 225
- Gaban Farid. dkk. *Yang Gelisah di Pelukan Ibu Pertiwi*. Tempo no 37/XVIII 15-21 November 1999. hlm. 42
- Gun, *Depdiknas Jangan Jadi Saingan Sekolah Swasta*, 2000, CSIS: Centre for Strategic and International Studies. hlm.6
- , *Arah Perkembangan Pendidikan di Indonesia*,2000, CSIS: Centre for Strategig and International Studies.hlm.44

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- I Made Leo Wiratma. *Kemelut Politik Demokrasi dan Konstitusi*. 2001. ANALISIS CSIS, tahun XXX/2001. No. 1 CSIS : Centre For Strategic and International Studies. hlm. 14
- _____, *Kemelut Politik, Demokrasi dan Konstitusi, CSIS; Centre of strategic and International Studies*. hlm. 18
- _____, *Perjalanan Sebuah Dialog Nasional*, 1999, Analisa CSIS, tahun XXVIII. No. 1
- _____, *Perjalanan Sebuah Dialog Nasional*, 1999, Analisis CSIS: Centre for Strategic International Studies, hlm. 8
- Kristiadi, J. *Partai Politik dan Kemampuan Kompetisi Menggalang Dukungan 1999*, Analisis CSIS: Centre for Strategic International Studies, hlm. 143
- Kurie, *Situasi Hukum Dewasa Ini*. 2001. CSIS: Centre of Strategic and International Studies. hlm. 21
- _____, *Resiko Menggati Menteri*, 2000, Jakarta: PT Dian Rakyat. No. 09/XXIX/1-7 Mei 2000. hlm. 17
- _____, *Perkembangan Ekonomi dan Politik diawal Pemerintahan Gus Dur*, 2000, CSIS: Centre for Statetegic National studies. Th. XXIX/2000. no. 1. hlm. 5
- Legowo, T.A. *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999*, 1999, Analisa CSIS, tahun XVIII/1999, No. 4 tahun 1999
- _____, *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999*, 1999, CSIS: Centre for Strategic International Studies, hlm. 380
- _____, *Politik Indonesia Pasca SU MPR*. 1999. Analisa CSIS. hlm. 372
- _____, *Kabinet Superkompromi*. 1999. Jakarta: PT Dian Rakyat. Vol. XXVIII no. 35-43. hlm. 15
- _____, *Politik Indonesia Pasca SU MPR 1999*, Jakarta: CSIS, Tahun XXVIII/1999 no. 4 hlm. 372
- _____, *Mari Kita Sayangi Habibie*, 1999, Jakarta: PT. Temprint, Tempo Edisi 27 Sept-3 Okt 1999. hlm. 15
- Monteiro, Edmond. *Meringankan Beban Berat Gus Dur*. 1999. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm. 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Munir, *Gagasan Setelah 100 Hari Pemerintahan Gus Dur*, 2000, CSIS: Centre for Strate Studies. hlm.87
- Rizal Mallarangeng. *Peta Politik Indonesia*. 2001. CSIS: Centre for Strategic and international Studies. hlm. 15
- Sadli, M. *Ekonomi di Bawah Gus Dur dan Megawati*, 2001, TEMPO, No. 34, Tahun VII, 14 Juli 2001.
- Sandiwan Suharto, A. *Pro Gus Dur atau Mega*, 2001, Jakarta:Yayasan Hidup, hlm. 4.
- Sihol Siagian, F. *Menggugat Orientasi dan Pluralisme Kita*, 2001, Jakarta: Yayasan Hidup Katolik.
- Sudibjo, M. *Pemilu Pertama Pasca Soeharto*.1999, Analisis CSIS: Centre for Strategic and International, hlm.204
- , *Proses Menuju SI MPR dan Masalah Ketatanegaraan RI*. 2001. CSIS: Centre of strategic and International studies. hlm. 114
- Susanto, *Bermimpi Tentang Pemimpin*.1999. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm.22
- Syamsudin Haris. *Kabinet Maju Kena Mundur Kena*. 2000. TEMPO. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Taufikgurohman., M. *Akhir dari Bulan Madu*. 2000. TEMPO. Jakarta: PT. Dian Rakyat. Hlm. 24
- Toto Suryaningtyas. *Penegakan Hukum Baru Sebatas Ucapan*. 2000. Jakarta: buku Kompas. hlm.212
- William, Chang OFM Cap. *Menuju Indonesia Baru*. 2000. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik. hlm.12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR

Nama Sekolah : SMU
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas, Semester : XI/2
 Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis proses jatuhnya pemerintahan orde baru serta terjadinya reformasi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Penilaian		Sumber Bahan	
					Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan		
Menguraikan pemerintahan Abdurrahman Wahid periode tahun 1999 – 2001	Mendiskripsikan latar belakang Abdurrahman Wahid diangkat sebagai Presiden	1. Latar belakang Abdurrahman Wahid diangkat sebagai Presiden a. Situasi politik Indonesia pasca Pemilu 1999. b. Pemerintahan BJ Habibie yang dirundung masalah. c. Jalannya Politik SI/MPR	Mendiskusikan latar belakang Abdurrahman Wahid diangkat sebagai Presiden periode tahun 1999 – 2001		Tugas	Uraian	1. Diskripsikan latar belakang Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden RI yang ke-4! 2. Jelaskan kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden RI. 3. Deskripsikan pemerintahan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden RI. 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi kepresidenan. 5. Buatlah contoh sikap yang meneladani sikap demokrat Abdurrahman Wahid dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat.	Lophart, Arent, <i>Pemerintah Parlemen dan Presidenstil Indonesia</i> , 1995, PT Raja Grafindo Kansil, G.S.T, <i>Sistem Pemerintahan Indonesia</i> , 1990, Jakarta : Bumi Aksara. Sandiwan Suharto, <i>Pro Gus Dur atau Mega</i> , 2000, Jakarta : Yayasan Hidup Ahmad Bahar, <i>Biografi Politik Abdurrahman Wahid</i> , 1999, Jakarta : Bina Utama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Penilaian			Sumber Bahan
					Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan	
	Mendiskripsikan kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden	2. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden a. Faktor politik b. Faktor ekonomi c. Faktor sosial d. Faktor ketahanan e. Faktor hukum dan HAM	Mendiskusikan kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden					
	Mendiskripsikan pemerintahan yang dijalankan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden	3. Pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden a. Faktor politik b. Faktor ekonomi c. Faktor sosial d. Faktor ketahanan e. Faktor hukum dan HAM	Mendiskusikan pemerintahan yang dijalankan oleh Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden					
	Mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid Jatuh dari kursi kepresidenan	4. Faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi kepresidenan. a. Faktor politik b. Faktor ekonomi c. Faktor sosial	Mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi kepresidenan					
	Meneladani sikap Abdurrahman Wahid yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari	5. Meneladani sikap Abdurrahman Wahid yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari a. Di keluarga b. Di sekolah c. Di masyarakat	Membuat contoh sikap atau tindakan yang meneladani sikap demokratis Abdurrahman Wahid dalam kehidupan sehari-hari		Ulangan	Uraian		

Mengetahui
Kepala Sekolah

Pengesahan

Yogyakarta, 4 Januari 2006
Guru Mata Pelajaran

.....
NIP.....

Yulita Ariyanti Widiuntari

